

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PENYALURAN KREDIT BANK UMUM YANG TERDAFTAR DI BURSA  
EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE TAHUN 2008-2011**



**SKRIPSI**

**Karya Tulis sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi  
Jurusan Manajemen**

**Disusun oleh :**

**SHELY HASTUTI**

**1M 081248**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI**

**STIE BANK BPD JATENG**

**SEMARANG**

**2012**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PENYALURAN KREDIT BANK UMUM YANG TERDAFTAR DI BURSA  
EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE TAHUN 2008-2011**

**Disusun Oleh :**

**SHELY HASTUTI**

**1M 081248**

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi STIE  
Bank BPD Jateng.**

**Semarang, November 2012**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Rudi Suryo Kristanto, S.Psi, M.Si**

**Siti Purvandani, SE, M.Si**

**NIDN : 0615126702**

**NIDN : 0622067302**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI**  
**PENYALURAN KREDIT BANK UMUM YANG TERDAFTAR DI BURSA**  
**EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE TAHUN 2008-2011**

**Disusun Oleh :**  
**SHELY HASTUTI**  
**1M 08.1248**

Diterima dan disetujui oleh Tim Penguji Skripsi STIE Bank BPD Jateng  
pada tanggal : .....

**TIM PENGUJI**

**TANDA TANGAN**

- |  |       |
|--|-------|
| 1. <b><u>Drs. Hery Prasetya, MM</u></b><br>NIDN: 0627026701            | ..... |
| 2. <b><u>Dwi Suryanto Hidayat, SE, MM</u></b><br>NIDN: 0017037601      | ..... |
| 3. <b><u>Rudi Suryo Kristanto, S.Psi, M.Si</u></b><br>NIDN: 0615126702 | ..... |

**MENGESAHKAN**

**Ketua STIE Bank BPD Jateng**

**H. Djoko Sudantoko, S.Sos, MM**

**NIDN : 0607084501**

## ABSTRAK

Kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, merupakan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan. Pemberian kredit bank merupakan alternatif pembiayaan modal bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi dan berinvestasi. Penelitian ini dilatarbelakangi karena belum optimalnya penyaluran kredit yang diberikan perbankan atau kredit yang belum tersalurkan (*undisbursed loan*). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Non Performing Loan* (NPL) terhadap penyaluran kredit perbankan. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 104 sampel dari 26 bank umum yang terdaftar di BEI tahun 2008-2011, menggunakan *pooling data*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis t, dan uji kelaikan model. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran kredit, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif tidak signifikan dan *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penyaluran kredit.

Kata Kunci : Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Loan* (NPL)

## ABSTRACT

*The activity of collecting and distributing funds from and to the society in the form of loan aiming to improve its prosperity is a bank's function as a financial intermediary. The banking loan is a finance alternative capital for society in conducting the economic activities and investment. This research was conducted because the distribution of the banking loan has not been maximally given by the banking or undisbursed loan. The purpose of the research is to know the effect of the third party fund (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), and Non Performing Loan (NPL) towards the distribution of the banking loan. There were 104 samples used in this research. Those were taken from 26 commercial banks listed on BEI in 2008-2011, using polling data technique. The data analysis techniques used in this research were descriptive statistical analysis, classical assumption test, multiple linear regression analysis, t test hypotheses, and feasibility test. From the result, it can be concluded that the third party fund (DPK) gives positive significant effect towards the distribution of the banking loan, Capital Adequacy Ratio (CAR), gives negative significant effect and Non-Performing Loan (NPL) gives negative significant effect towards the distribution of the banking loan.*

*Key words : third party fund (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non-Performing Loan (NPL)*

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini adalah saya,

Nama : Shely Hastuti

NIM : 1M.08.1248

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul **“ANALISIS FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN KREDIT BANK UMUM YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE TAHUN 2008-2011”** telah saya susun dengan sebenar-benarnya dengan memperhatikan kaidah akademik dan menjunjung tinggi hak atas karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya unsur plagiasi maupun unsur kecurangan lainnya pada skripsi yang telah saya buat tersebut, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya dan saya siap menerima segala konsekuensi yang ditimbulkannya termasuk pencabutan gelar kesarjanaan yang telah diberikan kepada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Semarang, November 2012

Shely Hastuti

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### *MOTTO :*

- *Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah*
- *Hidup tidak menghadirkan barang sesuatupun kepada manusia tanpa bekerja keras.*
- *selalu bersyukur dengan apa yang telah kita dapat*

### *Kupersembahkan skripsi ini kepada:*

- ♥ *Kedua orang tuaku yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan tak hentinya doa yang selau mengalir, terimakasih.*
- ♥ *kakak dan adikku tersayang yang selalu memberi dukungan*
- ♥ *Semua saudara, sahabat dan teman – teman ku yang telah membantu dalam dukungan semangat.*

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah S.W.T atas segala rahmat, hidayah dan karuniaNya sehingga skripsi tentang “ANALISIS FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN KREDIT BANK UMUM YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE TAHUN 2008-2011” dapat terselesaikan dengan baik. Disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Jurusan Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank BPD Jawa Tengah Semarang.

Skripsi ini merupakan perwujudan hasil bantuan dari berbagai pihak dalam bentuk moril maupun materiil, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih dan penghormatan yang besar kepada :

1. Bapak Dr. H.Djoko Sudantoko, S.Sos.MM. selaku ketua STIE Bank BPD Jateng.
2. Bapak Rudi Suryo Kristanto, S.Psi,MSi, sebagai dosen pembimbing I dalam penyusunan skripsi, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak telah membimbing penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ibu Siti Puryandani, SE, M.Si.sebagai dosen pembimbing II dalam penyusunan skripsi, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak telah membimbing penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Piji Pakarti, SE, M.Si, selaku Puket 1 STIE Bank BPD Jateng.
5. Bapak Drs. Hery Prasetya, MM. Selaku ketua jurusan manajemen STIE Bank BPD Jateng.
6. Bapak Taofik Hidayat, SE, M.Si. Selaku Dosen Wali STIE Bank BPD Jateng.
7. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Manajemen dan Akuntansi STIE Bank BPD Jateng yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi ini.



8. Orang Tuaku yang tiada henti memberikan semangat dan dorongan serta Motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
9. Terima kasih Kakak dan Adikku yang selalu menjadi semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih mas anung yang selalu berada dalam motivasi penulis memberikan semangat dan dorongan disaat penulis lelah sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Terima kasih buat Sahabat-Sahabatku tiwi, putri, kiki, kadjul, dinar, marya, ari, endah, iis, boby, jiro, mb iroh, abud dan ga lupa genk She nur, meta, niken, siti, putri, vero, hemas yang selalu memberikan semangat yang tak henti – hentinya dan selalu bersama dalam perjalanan kita dalam menempuh pendidikan, terimakasih sahabat, dengan kalian penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman temanku anak 2008 terima kasih banyak, sukses buat kalian semua, mari berjuang kawan kawanku.
13. Segenap karyawan dan karyawanati BAAK, BAU, Perpustakaan, CS, dan Satpam STIE Bank BPD Jateng, yang telah memberikan pelayanan dari awal sampai akhir perkuliahan, terimakasih.
14. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari akan keterbatasan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun agar kelak kemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Semarang, November 2012

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
ABSTRAKSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Pembatasan Masalah.....	8
1.3 Perumusan Masalah.....	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
1.5.1. Manfaat Teoritis.....	9
1.5.2. Manfaat Praktis .....	9
1.6 Kerangka Penelitian .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	12

2.1 kajian Pustaka.....	12
2.1.1. Bank .....	12
2.1.1.1 Definisi Bank .....	12
2.1.1.2 Fungsi Bank .....	14
2.1.2. Jenis Bank.....	15
2.1.3 Sumber Dana Bank .....	18
2.2 Operasional Bank .....	19
2.2.1 Kinerja Keuangan .....	19
2.2.2 Resiko Bank.....	19
2.2.3 Analisis Laporan Keuangan Bank .....	21
2.2.4 Pihak-Pihak yang Berkepentingan.....	23
2.2.5 Penilaian Kesehatan Bank .....	26
2.3 Variabel-variabel.....	30
2.3.1. kredit.....	30
2.3.1.1 Pengertian Kredit .....	32
2.3.1.2 Fungsi Kredit .....	35
2.3.1.3 Jenis-Jenis Kredit .....	35
2.3.1.4 Suku Bunga Kredit .....	40
2.3.2. Dana Pihak Ketiga .....	45
2.3.2.1 Pengertian DPK (Dana Pihak ketiga).....	45
2.3.2.2 Rumus Dana Pihak Ketiga.....	45

2.3.2.3 Komponen Dana Pihak Ketiga.....	46
2.3.3. CAR ( <i>Capital Adequacy Ratio</i> ).....	47
2.3.3.1 Definisi CAR ( <i>Capital Adequacy Ratio</i> ).....	47
2.3.3.2 Rumus CAR ( <i>Capital Adequacy Ratio</i> ) .....	47
2.3.3.3 CAR dalam peraturan BASEL.....	51
2.3.4. NPL ( <i>Non Performing Loan</i> ).....	58
2.3.4.1 Definisi NPL ( <i>Non Performing Loan</i> ).....	58
2.3.4.2 Penyebab terjadinya NPL .....	58
2.3.4.3 Dampak ( <i>Non Performing Loan</i> ) .....	59
2.3.4.4 Rumus NPL ( <i>Non Performing Loan</i> ).....	59
2.3.4.5 Penanganan adanya kredit bermasalah .....	62
2.3.4.6 Dampak peraturan BASEL terhadap NPL.....	63
2.4 Pengembangan Hipotesis.....	64
2.4.1. Pengaruh DPK terhadap penyaluran kredit .....	65
2.4.2. Pengaruh CAR terhadap penyaluran kredit.....	65
2.4.3. Pengaruh NPL terhadap penyaluran kredit.....	67
2.5 Model Penelitian .....	70
2.8 Penelitian Sebelumnya.....	71
BAB III METODE PENELITIAN .....	72
3.1 Definisi Konsep.....	72
3.1.1 Penyaluran Kredit .....	72

3.1.2 Dana Pihak Ketiga (DPK) .....	72
3.1.3 CAR ( <i>Capital Adequacy Ratio</i> ) .....	72
3.1.4 NPL ( <i>Non Performing Loan</i> ).....	73
3.2 Definisi Operasional .....	73
3.2.1 Penyaluran Kredit .....	73
3.2.2 Dana Pihak Ketiga.....	73
3.2.3 CAR ( <i>Capital Adequacy Ratio</i> ) .....	73
3.2.4 NPL ( <i>Non Performing Loan</i> ) .....	74
3.3 Populasi dan Sampel .....	74
3.3.1 Populasi .....	74
3.3.2 Sampel .....	75
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	77
3.4.1 Dokumentasi.....	77
3.4.2 Studi Pustaka .....	77
3.5 Statistik Deskriptif.....	78
3.6 Uji Asumsi Klasik .....	78
3.6.1 Uji Normalitas Data .....	78
3.6.2 Uji Multikolonieritas .....	79
3.6.3 Uji Heteroskedastisitas .....	80
3.6.4 Uji Autokorelasi .....	80
3.7 Uji Regresi Linier Berganda .....	81

3.8 Pengujian Hipotesis (Pengaruh Secara Parsial) .....	82
3.9 Uji Kelaikan Model .....	83
3.10 Koefisien Determinasi .....	84
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>86</b>
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian .....	86
4.2 Analisis Hasil Penelitian .....	103
4.2.1 Stastitik Deskriptif.....	103
4.3 Pengujian Asumsi Klasik .....	105
4.3.1 Uji Normalitas .....	105
4.3.2 Uji Multikolinearitas .....	107
4.3.3 Uji Heteroskedaptisitas .....	109
4.3.4 Uji Aoutokorelasi.....	109
4.4 Hasil analisis Regresi Berganda.....	111
4.5 Pengujian hipotesis secara parsial (Uji t).....	112
4.5.1 Pengaruh DPK terhadap penyaluran kredit .....	112
4.5.2 Pengaruh CAR terhadap penyaluran kredit .....	114
4.5.3 Pengaruh NPL terhadap penyaluran kredit.....	115
4.6 Uji kelaikan model .....	116
4.6.1 Pengujian hipotesis secara simultan ( Uji F).....	116
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>119</b>
5.1 Kesimpulan .....	119

5.2 Keterbatasan penelitian .....	120
5.3 Saran .....	120
5.4 Implikasi Manajerial.....	121

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

STIE BPD Jateng

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya .....	71
Tabel 3.1 Sampel Penelitian.....	75
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif .....	103
Tabel 4.2 Uji Normalitas Data.....	105
Tabel 4.3 Uji Multikolinieritas.....	108
Tabel 4.4 Tabel Uji Durbin Watson.....	110
Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Regresi berganda.....	111
Tabel 4.6 Hasil Uji t (Hipotesis).....	112
Tabel 4.7 Hasil Uji F.....	116
Tabel 4.8 Koefisien Determinasi.....	118

STIE BPPD Jateng



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran.....	11
Gambar 2.1 Model Penelitian.....	70
Gambar 4.1 Grafik histogram.....	90
Gambar 4.2 Uji Normalitas Dengan Menggunakan Grafik Normal P-Plot .....	107
Gambar 4.3 Uji Heteroskedastisitas Dengan Menggunakan Grafik Scatterplot..	109
Gambar 4.4 Grafik penerimaan/penolakan hipotesis variabel DPK.....	113
Gambar 4.5 Grafik penerimaan/penolakan hipotesis variabel CAR.....	114
Gambar 4.6 Grafik penerimaan/penolakan hipotesis variabel NPL.....	115
Gambar 4.7 Grafik penerimaan/penolakan hipotesis dari ketiga variabel.....	117

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi masyarakat bertambah (Sadono Sukirno, 2004:9). Keberadaan sektor keuangan dalam perekonomian suatu negara memiliki peran penting dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sektor keuangan yang berkembang dengan baik akan dapat mendorong kegiatan perekonomian, sebaliknya sektor keuangan yang tidak dapat berkembang dengan baik akan menyebabkan perekonomian mengalami hambatan likuiditas dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Brandl, 2002 dalam Imam Mukhlis 2011;130).

Perbankan merupakan salah satu sektor keuangan yang menentukan stabilnya perekonomian di suatu negara. Bank menurut Undang-Undang pokok perbankan nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dikatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Ketut Rindji, 2000:14). Bank merupakan suatu lembaga usaha yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*) serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar aliran lalu lintas pembayaran. Bank juga sebagai suatu industri yang dalam kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat sehingga berkewajiban memelihara tingkat kesehatan bank (Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, 2002:68). Menurut Halim Alamsyah, dkk (2005) di negara - negara seperti Indonesia peranan bank cenderung lebih penting dalam pembangunan, karena bukan hanya sebagai sumber pembiayaan tetapi juga mampu mempengaruhi siklus usaha dalam perekonomian secara

keseluruhan. Hal ini dikarenakan bank lebih berkontribusi dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya dalam menghadapi informasi yang asimetris dan mahalnnya biaya dalam melakukan fungsi intermediasi. Secara alami bank mampu melakukan kesepakatan dengan berbagai tipe peminjam.

Bank Umum menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum (*commercial bank*) memiliki peranan yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, karena lebih dari 95% Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan nasional yang meliputi bank umum (*commercial bank*), bank syariah (*sharia bank*), dan Bank Perkreditan Rakyat (*rural bank*) berada di bank umum (Statistik Perbankan Indonesia, diolah). DPK ini yang selanjutnya digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit (Billy Arma Pratama, 2010). Bank Umum sebagai institusi keuangan yang berorientasi laba. Untuk memperoleh laba tersebut bank umum melaksanakan fungsi intermediasi. Karena diizinkan mengumpulkan dana dalam bentuk deposito, bank umum disebut juga sebagai lembaga keuangan depository. Berdasarkan kemampuannya menciptakan uang (giral), bank umum dapat juga disebut sebagai bank umum pencipta uang giral (<http://putracentr.net/2009>).

Didalam perbankan, penyaluran kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank (Ramlan Ginting dalam Diskusi Hukum 2005). Menurut UU No. 10 Tahun 1998 (UU Perbankan) mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Ramlan Ginting, dalam Diskusi Hukum 2005). Menurut Lukman Dendawijaya (2005) dana-dana yang dihimpun dari masyarakat dapat mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank dan kegiatan perkreditan mencapai 70%-80% dari total aktiva bank. Bila memperhatikan neraca bank akan terlihat bahwa sisi aktiva didominasi oleh

besarnya kredit yang diberikan, dan bila memperhatikan laporan laba rugi bank akan terlihat bahwa sisi pendapatan didominasi oleh besarnya pendapatan dari bunga dan provisi kredit. Hal ini dikarenakan aktivitas bank yang terbanyak akan berkaitan erat secara langsung ataupun tidak langsung dengan kegiatan perkreditan (Nurmawan, 2005). Menurut Dahlan Siamat (2005) salah satu alasan terkonsentrasinya usaha bank dalam penyaluran kredit adalah sifat usaha bank sebagai lembaga intermediasi antara *unit surplus* dengan *unit defisit*, dan sumber utama dana bank berasal dari masyarakat sehingga secara moral mereka harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sebagaimana umumnya negara berkembang, sumber pembiayaan di dunia usaha di Indonesia masih didominasi oleh penyaluran kredit perbankan yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemberian kredit merupakan aktivitas bank yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan, tetapi risiko yang terbesar dalam bank juga bersumber dari pemberian kredit. Oleh karena itu pemberian kredit harus dikawal dengan manajemen risiko yang ketat (InfoBankNews.com, 2007). UU perbankan telah mengamankan agar bank senantiasa berpegang pada prinsip kehati – hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk dalam memberikan kredit (Ramlan Ginting dalam Diskusi Hukum 2005).

Menurut Espinoza dan Prased (2010) dalam Imam Mukhlis (2011) bank juga akan dihadapkan pada risiko kegagalan kredit yang diakibatkan oleh kondisi makroekonomi maupun *bank specific factor* dengan kata lain debitur yang telah diberikan kredit tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan semula. Dalam kondisi ini bank akan menghadapi kredit macet yang dapat mengakibatkan kerugian baik bagi bank maupun bagi debitur (Imam Mukhlis, 2011). Menurut Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono (2011) kredit bermasalah adalah suatu keadaan nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikannya. Kredit bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M).

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi keputusan bank umum untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat (Meydianawathi,2007).

Penelitian Sri Haryati (2007) menyimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap kredit perbankan. Hasil serupa juga ditemukan oleh Meydianawathi (2007) dan Billy Arma (2010). Sementara hasil yang berbeda atas penelitian yang dilakukan oleh Imam Mukhlis (2011) DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit bank umum di Indonesia. variabel DPK dipilih untuk penelitian ini dikarenakan peneliti terdahulu selalu menggunakan variabel DPK dalam penyaluran kredit perbankan, serta dikarenakan DPK merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi kredit (Desi Arisandi;2008).

Penelitian Meydianawathi (2007) menyimpulkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit, hasil serupa ditemukan oleh Desi Arisandi (2008), sedangkan penelitian Billy Arma Pratama (2010) CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit bank umum Indonesia. variable CAR dipilih dalam pertumbuhan penyaluran dalam penelitian ini adanya gap antara penelitian terdahulu serta CAR merupakan rasio kewajiban pemenuhan modal minimum yang harus dimiliki oleh bank. Modal bank cukup penting karena berfungsi untuk memperlancar operasional sebuah bank (Desi Arisandi;2008).

Penelitian Meydianawathi (2007) menyimpulkan bahwa *Non Performing Loan (Npls)* berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit, hasil serupa ditemukan oleh Desi Arisandi (2008), sedangkan penelitian Dias Satria dan Rangga Bagus Subekti (2010) NPLs tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit bank umum di Indonesia. Menggunakan variabel NPLs dalam penelitian ini karena gap antara peneliti terdahulu yang membahas tentang NPLs beserta Npls variabel penting dalam penyaluran kredit, besarnya Npls menjadi salah satu penyebab sulitnya perbankan menyalurkan kredit (Sentausa;2009) dalam (Billy Arma;2010).

Penelitian ini menggunakan variabel DPK, CAR, dan NPL sebagai variabel bebas dan Penyaluran Kredit Perbankan sebagai variabel terikat yang

didasarkan pada perbedaan penelitan diatas. Dalam memberikan kredit bank dituntut agar mendapat keuntungan yang besar, sehingga cukup untuk menutup seluruh biaya dana, baik dana yang ditempatkan pada sektor yang menghasilkan maupun dana yang tidak menghasilkan, dengan demikian kredit merupakan salah satu faktor utama untuk keuntungan bank, karena keuntungan yang diperoleh dari penempatan dalam bentuk kredit adalah besar, maka risiko yang dihadapi juga besar (Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono,2011;206). Menurut Ramlan Ginting dalam Diskusi Hukum (2005) salah satu penyebab dari kegagalan usaha bank adalah penyediaan dana yang tidak didukung dengan kemampuan bank mengelola konsentrasi penyediaan dana secara efektif.

Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga) merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (Dendawijaya, 2005). Dana Pihak Ketiga adalah seluruh dana yang berhasil dihimpun sebuah bank yang bersumber dari masyarakat luas (Kasmir, 2008) dalam meyedianawathi (2007). Pemberian kredit merupakan aktivitas bank yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan (Dendawijaya, 2005). Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/19/PBI/2008 tentang perbankan, Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang di himpun bank umum dari masyarakat yang berbentuk simpanan giro (*demand deposits*), simpanan tabungan (*saving deposits*) dan simpanan deposito (*time deposits*). Semakin tinggi dana pihak ketiga, maka jumlah kredit yang diberikan semakin meningkat, sebab jumlah dana yang tersimpan dalam bank meningkat dan akan disalurkan kepada masyarakat melalui penyaluran kredit perbankan. Sebaliknya apabila dana pihak ketiga semakin rendah, maka jumlah dana yang disalurkan kepada masyarakat melalui penyaluran kredit akan menurun

CAR (*Capital Adequacy Ratio*) menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/18/PBI/2004, adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya

finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit (Billy Arma Pratama,2010). Menurut Hasibuan (2008 :58) menyatakan bahwa CAR (KPM) adalah salah satu cara untuk menghitung apakah modal yang ada pada suatu bank telah memadai atau belum. Jika modal rata-rata suatu bank lebih baik dari pada bank lainnya maka bank yang bersangkutan akan lebih baik solvabilitasnya. Hal ini berarti semakin baiknya bank dalam memenuhi kecukupan modal dalam melakukan kegiatan bank maka semakin baik pula perusahaan dalam menyalurkan kreditnya kepada masyarakat.

*Non Performing Loan (NPL)* menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/10/PBI/2004, adalah rasio yang menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. NPL menunjukkan kemampuan kolektibilitas sebuah bank dalam mengumpulkan kembali kredit yang dikeluarkan oleh bank sampai lunas. Menurut Darmawan (2004) NPL merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meng-cover risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. Semakin besar tingkat NPL ini menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam pengelolaan kreditnya, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat risiko atas pemberian kredit pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya NPL yang dihadapi oleh bank (Desi Arisandi;2008).

Meskipun penyaluran kredit memegang peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi negara, namun kredit yang disalurkan oleh perbankan belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari *Loan to Deposit Ratio (LDR)* Bank Umum periode 2005 - 2009 yang masih berkisar pada angka 59,66% - 74,58% (Statistik Perbankan Indonesia), masih berada dibawah harapan Bank Indonesia. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, angka LDR seharusnya berada disekitar 85% - 110% (Manurung Rahardja,2004). Pada tahun 2009 kredit yang menganggur di perbankan semakin tinggi. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) per Agustus 2009, fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik (*undisbursed loan*) mencapai 20,68% dari total kredit perbankan. Porsinya terus naik jika dibandingkan dengan Desember 2008 yang baru mencapai 18,93% dari

total kredit. Penumpukan kredit terbanyak terdapat di bank umum swasta nasional (BUSN) devisa dan bank perseroan. *Undisbursed loan* di BUSN sebesar Rp110,99 miliar atau mencapai 39,29% dari total kredit perbankan yang belum dicairkan ([www.infobanknews.com/2009/12/undisbursed-loan](http://www.infobanknews.com/2009/12/undisbursed-loan)). pada tahun 2010 tingginya *undisbursed loan* (kredit yang belum dicairkan) perbankan nasional berpotensi menghambat pertumbuhan kredit nasional tahun 2010. Hingga saat ini, *undisbursed loan* perbankan nasional mencapai Rp 270 triliun (<http://managementfile.com/journal>). Pada tahun 2011 Fasilitas kredit yang belum ditarik debitor (*undisbursed loan*) bank umum naik 17,60% (*year-on-year*) menjadi Rp 623,29 triliun hingga September 2011 dari Rp 530,41 triliun pada September 2010, menurut data Bank Indonesia. Kenaikan *undisbursed loan* ini disebabkan angka penyaluran kredit juga tumbuh tinggi, menurut pejabat Bank Indonesia. Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia, angka *undisbursed loan* hingga September 2011 tersebut naik 12,36% (*year-to-date*) dibandingkan Desember 2010 yang sebesar Rp 554,71 triliun, tetapi turun 1,19% (*month-on-month*) dibandingkan Agustus 2011 yaitu Rp 630,78 triliun. Tingginya fasilitas kredit yang belum dicairkan nasabah atau *undisbursed loan* menjadi tantangan bank dalam meningkatkan penyaluran kredit (<http://atjehpost.com/read/2012>).

Adanya Gap yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu dengan variabel DPK, CAR, dan NPL yang mempengaruhi penyaluran kredit serta adanya fenomena terjadinya *undisbursed loan* perbankan, menjadi hal yang menarik bagi peneliti untuk meneliti faktor apakah yang mempengaruhi peningkatan dan penurunan jumlah kredit yang diberikan. Periode pengamatan dalam penelitian ini adalah empat tahun yaitu pada periode 2008 sampai 2011 agar kemampuan hasil penelitian dapat lebih digeneralisasi dengan periode pengamatan yang lebih terkini. Sehingga dengan adanya gambaran dari latar belakang tersebut maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN KREDIT BANK UMUM YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE TAHUN 2008-2011”**



## 2.1 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang akan di bahas, maka perlu diberikan pembatasan sebagai berikut :

1. Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini yaitu penyaluran kredit.
2. Variabel independen (X) yang dianalisis dalam penelitian ini adalah (X1) dana pihak ketiga (DPK), (X2) *capital adequacy ratio* (CAR) dan (X3) *non performing loan* (NPL).
3. Objek penelitian yang diambil adalah Bank Umum yang terdaftar di BEI periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2011.
4. Data penelitian adalah data sekunder yang di peroleh melalui data yang telah dikumpulkan oleh para peneliti, data yang diterbitkan dalam jurnal statistik dan lainnya, dan informasi yang tersedia dari sumber publikasi atau nonpublikasi baik di dalam atau di luar organisasi, semua yang dapat berguna bagi peneliti (Sekaran, 2006:245).

### 2.2.1 Perumusan Masalah

Perumusan masalah adalah rumusan fenomena yang akan akan di jawab dalam penelitian menunjukkan gambaran yang akan di capai dan arah analisis yang akan dilakukan dalam proses penulisan karya tulis ilmiah (Subiyanto, 2000:34).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit perbankan umum di BEI tahun 2008 - 2011?
2. Apakah *capital adequacy ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit perbankan umum di BEI tahun 2008 - 2011?
3. Apakah *non performing loan* (NPL) berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit perbankan umum di BEI tahun 2008 -2011?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian pada umumnya untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran dari suatu pengetahuan empiris, sedangkan dalam penelitian ini, tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis apakah terdapat pengaruh positif DPK (Dana Pihak Ketiga) terhadap penyaluran kredit pada bank umum di BEI tahun 2008-2011.
2. Mengetahui dan menganalisis apakah terdapat pengaruh positif CAR (*capital adequacy ratio*) terhadap penyaluran kredit pada bank umum di BEI tahun 2008-2011.
3. Mengetahui dan menganalisis apakah terdapat pengaruh negatif NPL (*non performing loan*) terhadap penyaluran kredit pada bank umum di BEI tahun 2008-2011.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat teoritis**

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan serta untuk memperkuat penelitian sebelumnya berkenaan dengan adanya hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit perbankan.
2. Dari hasil penelitian ini diharapkan perusahaan dapat meningkatkan mekanisme pelayanan bank.
3. Penelitian ini dapat digunakan menjadi bahan acuan bagi penelitian serupa dimasa yang akan datang dan mendukung teori-teori yang telah ada sehubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi perbankan

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak manajemen bank dalam mengevaluasi dan meningkatkan pengembangan jasa perkreditan.

## 2. Bagi akademik STIE Bank BPD Jateng

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wahana penambah informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit perbankan..

## 3. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti tentang ilmu perbankan khususnya dalam melihat perkembangan penyaluran kredit perbankan yang berkualitas sehingga peneliti dapat menilai penyaluran kredit perbankan yang berkualitas.

## 4. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kinerja keuangan bank sehingga dapat memberikan manfaat dalam mempelajari penyaluran kredit perbankan yang berkualitas. Serta diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit perbankan.

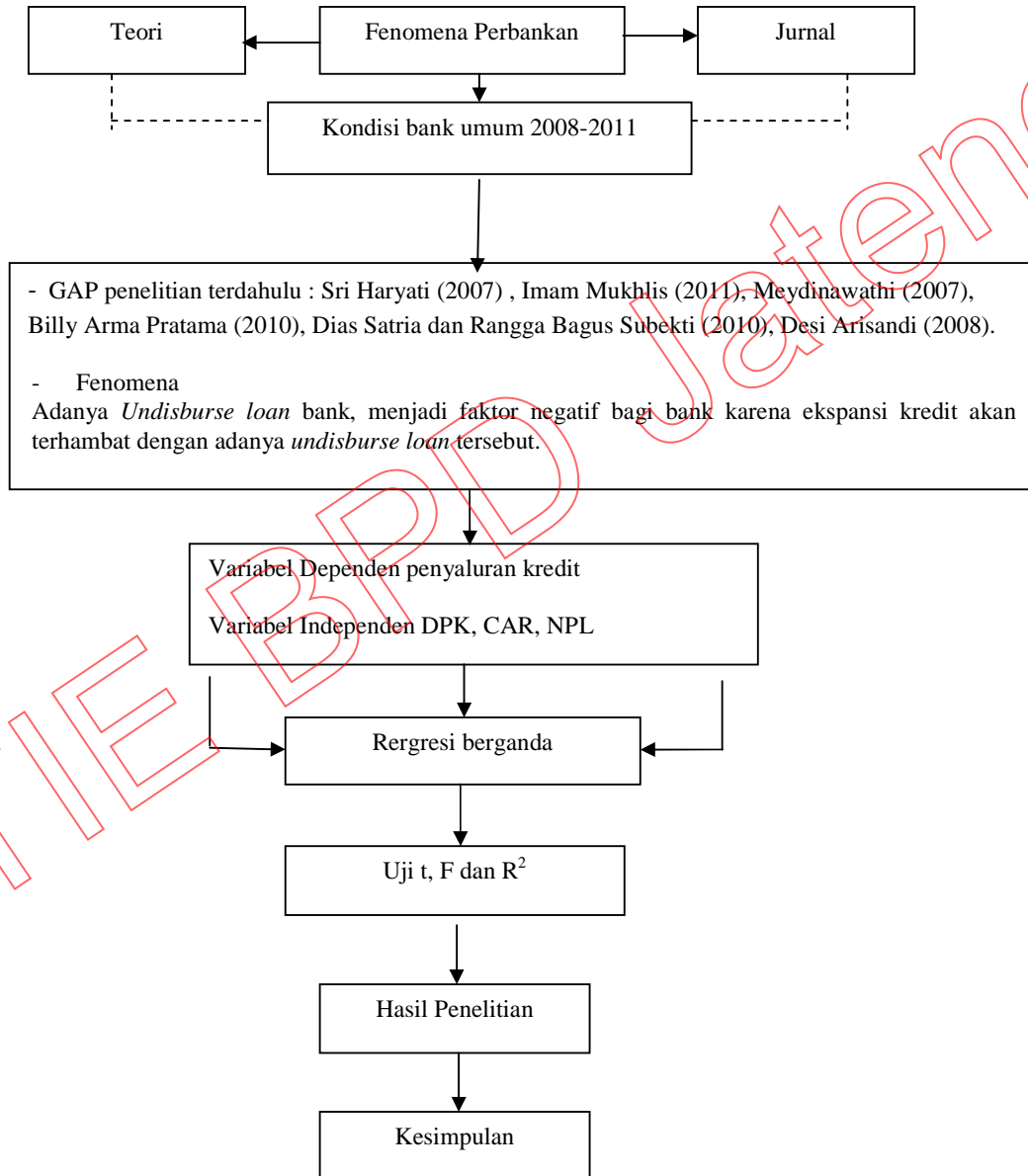
### 1.6 Kerangka Penelitian

Fenomena perbankan yang ada pada bank saat ini dalam melakukan penyaluran kredit perbankan adanya *undisburse loan* (kredit yang belum tersalurkan kepada nasabah) menjadi salah satu faktor negatif yang akan berdampak pada bank-bank di Indonesia, bank di Indonesia tidak akan bisa mengekspansi kreditnya karena terhambat dengan *undisburse loan* tersebut. Berdasarkan penelitian tentang penyaluran kredit menghasilkan kerangka penelitian tentang pengaruh Dana Pihak ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) serta *Non Performing Loans* (NPLs) terhadap penyaluran kredit perbankan pada bank umum yang terdaftar di BEI tahun 2008 sampai dengan tahun 2011

Gambar 1.1 menyajikan kerangka penelitian untuk pengembangan hipotesis pada penelitian ini. Variabel Independen (X1) Dana Pihak ketiga (DPK) mempengaruhi penyaluran kredit perbankan, (X2) *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

mempengaruhi penyaluran kredit perbankan, (X3) *Non Performing Loans* (NPLs) mempengaruhi penyaluran kredit perbankan.

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Bank**

###### **2.1.1.1 Definisi Bank**

Menurut Undang - Undang RI No. 10 tahun 1998 definisi bank adalah Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk - bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan artinya aktivitas perbankan tidak terlepas dari masalah keuangan. Sedangkan definisi bank umum secara singkat adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank-bank umum terdiri dari bank-bank umum pemerintah, bank-bank umum swasta nasional devisa, bank-bank swasta nasional nondevisa dan bank-bank asing dan campuran. Kegiatan utama bank-bank umum adalah menghimpun dana masyarakat antara lain dalam bentuk giro, deposito berjangka dan tabungan, serta menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit (Pohan, 2008). Abdurrahman (Amik Nuarani;2010) dalam menjelaskan bahwa bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain.

Definisi bank menurut UU No. 14/1967 pasal 1 tentang pokok-pokok perbankan adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Menurut Prof. G.M Verryn Stuart (Amik Nuarini;2010) bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa giral.

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok perbankan. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Strategi bank dalam menghimpun dana adalah dengan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang menarik dan menguntungkan. Semakin beragam dan menguntungkan balas jasa yang diberikan akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya. Selanjutnya pengertian menghimpun dana adalah melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit). Kegiatan menyalurkan dana ini oleh perbankan disebut dengan istilah *Lending*.

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*defisit of funds*). Dengan demikian perbankan bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan penyaluran kredit serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Lembaga perbankan dengan tugasnya yang antara lain sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*defisit of funds*) serta juga melayani kebutuhan pembayaran serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian masyarakat, maka menurut ilmu sosiologi, perbankan diakui merupakan suatu lembaga sosial. Dalam arti, bahwa perbankan tersebut merupakan bentuk himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang menyangkut kebutuhan pokok manusia (Djumhana, 1993:1-2).

Menurut Kasmir (2002: 3-4) lembaga keuangan bank pada kegiatannya terdapat definisi sebagai berikut :

a. Menghimpun dana dari masyarakat

Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi

bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Tujuan lainnya adalah untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran.

b. Menyalurkan dana ke masyarakat

Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan serta menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkan.

c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya

Jasa-jasa bank lainnya ini merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana.

### 2.1.1.2 Fungsi Bank

Fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara lebih spesifik fungsi bank dapat sebagai *agent of trust*, *agent of development* dan *agent of services* (Susilo,2000).

a. ***Agent Of Trust***

Dasar utama kegiatan perbankan adalah *trust* atau kepercayaan, baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya dibank apabila dilandasi oleh unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan juga percaya bahwa pada saat yang telah dijanjikan masyarakat dapat menarik lagi simpanan dananya di bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinjaman dengan baik, debitur akan mempunyai kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo, dan juga bank percaya bahwa debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

**b. *Agent of Development***

Sektor dalam kegiatan perekonomian masyarakat yaitu sektor moneter dan sektor riil, tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut berinteraksi saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Tugas bank sebagai penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa, mengingat semua kegiatan investasi, distribusi, konsumsi selalu berkaitan dengan penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat.

**c. *Agent of Services***

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa - jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa-jasa bank ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, jasa pemberian jaminan bank, dan jasa penyelesaian tagihan.

**2.1.2 Jenis-Jenis Bank**

**a. Jenis Bank menurut Kegiatan Usaha**

Menurut Susilo (2000), setelah diberlakukannya UU nomor 7 Tahun 1992, jenis bank menurut kegiatan usahanya terdiri dari dua jenis.

**1. Bank umum**

Bank umum menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasar prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan bank umum adalah sebagai berikut :



- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b) Memberikan kredit.
- c) Menerbitkan surat pengakuan hutang.
- d) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya, seperti:

Sertifikat Bank Indonesia

Obligasi

Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun

Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.

- e) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah (transfer).
- f) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- g) Menyiapkan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (*safe deposit box*).

Adapun kegiatan yang merupakan larangan bagi bank umum adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penyertaan modal kecuali kepada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan serta kecuali penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembayaran berdasar prinsip syariah.
2. Melakukan usaha perasuransian.
3. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana diuraikan diatas

## 2. Bank perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan rakyat adalah sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka dan tabungan pada bank lain.

Disamping kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BPR diatas, terdapat juga kegiatan yang merupakan larangan bagi BPR, yaitu:

- a) Menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut seta dalam lalu lintas pembayaran.
- b) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
- c) Melakukan penyertaan modal.
- d) Melakukan usaha perasuransian.
- e) Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud diatas.

#### **b. Jenis Bank menurut Badan Usaha**

Setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh ijin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan bank indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan UU tersendiri. Untuk memperoleh ijin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat, suatu lembaga keuangan wajib memenuhi persyaratan mengenai :

- a) Struktur organisasi dan permodalan,
- b) Kepemilikan

- c) Keahlian dibidang perbankan dan
  - d) Kelayakan rencana kerja
- bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa :

- a) Perseroan Terbatas
- b) Koperasi
- c) Perusahaan Daerah

bentuk hukum bank perkreditan rakyat dapat berupa :

- a) Perusahaan daerah
- b) Koperasi
- c) Perseroan terbatas
- d) Bentuk lain yang ditetapkan sengan peraturan pemerintah.

### c. Jenis Bank menurut Target Pasar.

#### 1. *Retail Bank*

Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah individual, perusahaan dan lembaga lain yang skalanya kecil, yaitu nasabah debitur yang dilayani adalah yang memerlukan fasilitas kredit tidak lebih besar daripada Rp. 20 milyar.

#### 2. *Corporate Bank*

Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah yang berskala besar biasanya berbentuk suatu korporasi.

#### 3. *Retail-Corporate Bank*

Bank jenis ini memberikan pelayanannya tidak hanya kepada nasabah retail tetapi juga kepada nasabah korporasi. Bank jenis ini memandang bahwa potensi pasar retail dan korporasi harus dimanfaatkan kedua-duanya untuk mencapai keuntungan yang maksimal.

### 2.1.3 Sumber Dana Bank

Menurut Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono (2011) dana bank adalah semua utang dan modal yang tercatat pada neraca bank sisi pasiva yang dapat dipergunakan sebagai modal operasional bank dalam rangka kegiatan

penyaluran/penempatan dana. Kegiatan penyaluran/penempatan dana tersebut dapat berupa pemberian kredit kepada masyarakat, pembelian surat-surat berharga dalam rangka memperkuat likuiditas bank, penyertaan ke badan usaha lain maupun penempatan sebagai alat – alat likuid. Selanjutnya dana bank yang digunakan sebagai modal operasional dalam kegiatan usaha tersebut dapat bersumber dari :

a. Dana Sendiri

Merupakan dana yang berasal dari pemegang saham bank atau pemilik bank. Dalam neraca bank dana tersebut tercatat dalam pos modal dan cadangan yang tercantum pada sisi pasiva. Dana sendiri terdiri dari beberapa pos, seperti modal disetor, cadangan-cadangan dan laba yang ditahan.

b. Dana Pinjaman

Merupakan dana yang berasal dari pihak yang memberikan pinjaman kepada bank, yang terdiri dari 4 pihak yaitu pinjaman dari bank lain di dalam negeri, pinjaman dari bank atau lembaga keuangan di luar negeri, pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank, pinjaman dari bank sentral.

c. Dana Masyarakat

Merupakan dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana masyarakat merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana dalam masyarakat. Dana masyarakat tersebut dihimpun oleh bank dengan produk-produk simpanan sebagai giro, deposito dan tabungan.

## **2.2. Operasional Bank**

### **2.2.1 Kinerja Keuangan**

Menurut Merkusiwati (2007), penilaian kinerja perusahaan bagi manajemen dapat diartikan sebagai penilaian terhadap prestasi yang dapat dicapai. Berkaitan dengan analisis kinerja keuangan bank mengandung beberapa tujuan :

- a. Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan bank terutama kondisi likuiditas, kecukupan modal dan *profitabilitas* yang dicapai dalam tahun berjalan maupun tahun sebelumnya.
- b. Untuk mengetahui kemampuan bank dalam mendayagunakan semua asset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien (Abdullah, 2005:120).

### 2.2.2 Risiko Bank

Bank Indonesia mengemukakan bahwa terdapat delapan risiko yang senantiasa terjadi dalam kegiatan usaha bank sebagaimana termuat dalam penjelasan pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/8/2003 tanggal 29 September 2003 perihal penerapan manajemen risiko bagi bank umum yaitu sebagai berikut :

- (a) Risiko kredit adalah risiko yang timbul akibat kegagalan debitur atau lawan transaksi (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya.
- (b) Risiko pasar adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portopolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank. Variabel pasar yang dimaksud dalam ketentuan bank Indonesia adalah suku bunga dan nilai tukar rupiah.
- (c) Risiko likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang jatuh waktu.
- (d) Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
- (e) Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan karena adanya tuntutan hukum ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat syahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

- (f) Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.
- (g) Risiko strategik adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategik bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.
- (h) Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan bank tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

### **2.2.3 Analisis Laporan Keuangan Bank**

Analisis laporan keuangan perbankan bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja perusahaan bank, untuk mengetahui perkembangan perbankan dari suatu periode ke periode berikutnya, sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasional dan penyusunan rencana kerja anggaran bank, untuk memonitor pelaksanaan dari suatu pertumbuhan perusahaan yang telah diterapkan, sehingga dapat diadakan perbaikan/penyempurnaan di masa yang akan datang. Pelaksanaan analisis laporan keuangan perbankan dapat dilakukan dengan berbagai metode. Hal tersebut tergantung pada kebutuhan internal masing-masing bank. Menurut Bastian Suhardjono (2006;284) metode analisis laporan keuangan yang lazim dipergunakan dalam praktik perbankan, antara lain :

- a. Analisis varians (*variance analysis*) adalah metode analisis yang dipergunakan mengetahui pencapaian kinerja dibandingkan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi terjadinya deviasi.
- b. Analisis komparatif (*comparative analysis*) adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan keragaman usaha bank pada suatu periode dengan periode lainnya, baik secara absolute maupun relative atas total/bagian tertentu.

- c. Analisis lingkungan (*environment analysis*) adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan hasil usaha yang telah dicapai suatu unit kerja terhadap industri usaha yang sama di wilayah kerjanya.
- d. Analisis rasio (*ratio analysis*) adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan pos-pos tertentu dalam neraca maupun laba rugi.

Dalam laporan keuangan termuat informasi mengenai jumlah kekayaan (*asset*) dan jenis-jenis kekayaan yang dimiliki (disisi aktiva). Kemudian akan tergambar kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang serta *ekuitas* (modal sendiri) yang dimilikinya. Informasi yang memuat seperti di atas tergambar dalam laporan keuangan yang disebut neraca. Menurut Kasmir (2004;239-240) Laporan keuangan bank juga memberikan gambaran tentang arus kas suatu bank yang tergambar dalam laporan arus kas. Tujuan pembuatan laporan keuangan suatu bank adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah aktiva dan jenis-jenis aktiva yang dimiliki.
- b. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah kewajiban dan jenis-jenis kewajiban baik jangka pendek (lancar) maupun jangka panjang.
- c. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah modal dan jenis-jenis modal bank pada waktu tertentu.
- d. Memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari jumlah pendapatan yang diperoleh dan sumber-sumber pendapatan bank tersebut.
- e. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan berikut jenis-jenis biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu.
- f. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam aktiva, kewajiban dan modal suatu bank.
- g. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen dalam suatu periode hasil laporan keuangan yang disajikan.

Dengan demikian laporan keuangan disamping menggambarkan kondisi keuangan suatu bank juga untuk menilai kinerja manajemen bank yang

bersangkutan. Penilaian kinerja manajemen akan menjadi patokan apakah manajemen berhasil atau tidak dalam menjalankan pertumbuhan yang telah digariskan oleh perusahaan.

#### **2.2.4 Pihak-pihak yang berkepentingan**

Pembuatan laporan keuangan ditunjukkan untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak, disamping pihak manajemen dan pemilik perusahaan itu sendiri. Begitu juga dengan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh bank akan memberikan berbagai manfaat kepada berbagai pihak. Menurut Kasmir, (2004:241-242) masing-masing pihak mempunyai kepentingan dan tujuan tersendiri terhadap laporan keuangan yang diberikan oleh bank. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan bank adalah sebagai berikut :

1. Pemegang saham

Bagi pemegang saham yang sekaligus merupakan pemilik bank, kepentingan terhadap laporan keuangan bank adalah untuk melihat kemajuan bank yang dipimpin oleh manajemen dalam satu periode. Kemajuan yang dilihat adalah kemampuan dalam menciptakan laba dan pengembangan aset yang dimiliki. Dari laporan ini pemilik juga dapat menilai sampai sejauh mana pengembangan usaha bank tersebut telah dijalankan pihak manajemen. Bagi pemilik dengan adanya laporan keuangan ini, akan dapat memberikan gambaran berapa jumlah deviden yang akan mereka terima serta untuk menilai kinerja pihak manajemen dalam menjalankan kepercayaan yang diberikannya.

2. Pemerintah

Bagi pemerintah, laporan keuangan yang baik bagi bank-bank pemerintah maupun bank swasta adalah untuk mengetahui kemajuan bank yang bersangkutan. Kemudian pemerintah juga berkepentingan terhadap kepatuhan bank dalam melaksanakan pertumbuhan moneter yang telah ditetapkan. Pemerintah juga berkepentingan sampai sejauh mana peranan perbankan dalam mengembangkan sektor-sektor industri tertentu.



### 3. Manajemen

Laporan keuangan bagi pihak manajemen adalah untuk menilai kinerja manajemen bank dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan. Kemudian juga untuk menilai kinerja manajemen dalam mengelola sumberdaya yang dimilikinya. Ukuran keberhasilan ini dapat dilihat dari pertumbuhan laba yang diperoleh dan pengembangan aset-aset yang dimilikinya. Pada akhirnya laporan keuangan ini juga merupakan penilaian pemilik untuk memberikan kompensasi dan karir manajemen serta mempercayakan pihak manajemen untuk memimpin bank pada periode berikutnya.

### 4. Karyawan

Bagi karyawan dengan adanya laporan keuangan juga untuk mengetahui kondisi keuangan bank yang sebenarnya. Dengan mengetahui ini mereka juga paham tentang kinerja mereka, sehingga mereka juga merasa perlu mengharapkan peningkatan kesejahteraan apabila bank mengalami keuntungan dan sebaliknya perlu melakukan perbaikan jika bank mengalami kerugian.

### 5. Masyarakat luas

Bagi masyarakat luas laporan keuangan bank merupakan suatu jaminan terhadap uang yang disimpan di bank. Jaminan ini diperoleh dari laporan keuangan yang ada dengan melihat angka-angka yang ada di laporan keuangan. Dengan adanya laporan keuangan pemilik dana dapat mengetahui kondisi bank yang bersangkutan, sehingga masih tetap mempercayakan dananya disimpan di bank yang bersangkutan.

#### **2.2.5 Jenis –jenis Laporan Keuangan Bank**

Menurut Kasmir (2004;242-244) Bank memiliki beberapa jenis laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI). Artinya laporan keuangan dibuat sesuai dengan standart yang telah ditentukan. Jenis-jenis laporan keuangan bank meliputi :

#### 1. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan bank pada tanggal tertentu. Posisi keuangan dimaksud adalah posisi aktiva (harta), pasiva (Kewajiban dan Ekuitas) suatu bank. Penyusunan komponen di dalam neraca didasarkan pada tingkat likuiditas yang jatuh tempo. Neraca bank adalah laporan dalam bentuk daftar yang disusun secara sistematis yang menyajikan informasi perbandingan apa yang dimiliki bank (aktiva) yang sekaligus menunjukkan penggunaan dana atau investasi dana pada periode yang dilaporkan, apa yang menjadi kewajiban bank (utang), dan modal bank pada suatu saat atau tanggal tertentu yang sekaligus menunjukkan sumber dana yang ada pada aktiva (Mudrajad Kuncoro dan Suharjono, 2002:541).

#### 2. Laporan Komitmen dan kontinjensi

Laporan komitmen dan kontinjensi merupakan suatu ikatan atau kontrak yang berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*irrevocable*) dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi. Contoh laporan komitmen adalah komitmen kredit, komitmen penjualan, atau pembelian aktiva bank dengan syarat *Repurchase Agreement (Repo)*, sedangkan laporan kontinjensi merupakan tagihan atau kewajiban bank yang kemungkinan timbulnya tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang. Penyajian laporan komitmen dan kontinjensi disajikan tersendiri.

#### 3. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan bank yang menggambarkan hasil usaha bank dalam satu periode tertentu. Dalam laporan ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan serta jumlah biaya dan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan.

#### 4. Laporan arus kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan bank, baik yang berpengaruh langsung atau tidak

langsung terhadap kas. Laporan arus kas harus disusun berdasarkan konsep kas selama periode laporan.

5. Catatan atas laporan keuangan

Merupakan laporan yang berisi catatan terhadap pos-pos aktiva dan L/R serta inti penting lain posisi Devisa Netto, menurut jenis mata uang dan aktivitas.

6. Laporan Keuangan Gabungan dan Konsolidasi

Laporan gabungan merupakan laporan dari seluruh cabang-cabang bank yang bersangkutan baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Sedangkan laporan konsolidasi merupakan laporan bank yang bersangkutan dengan aspek perusahaannya.

### 2.2.6 Penilaian Kesehatan Bank

Bank sebagai perusahaan perlu juga dinilai kesehatannya. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi bank tersebut sesungguhnya apakah dalam keadaan sehat, kurang sehat, atau mungkin sakit. Apabila ternyata kondisi bank tersebut dalam kondisi sehat, maka perlu dipertahankan kesehatannya. Akan tetapi, jika kondisinya dalam keadaan tidak sehat maka segera perlu diambil tindakan untuk mengobatinya. Dari penilaian kesehatan bank ini pada akhirnya akan ketahuan kinerja bank tersebut.

Untuk menilai kesehatan suatu bank dapat diukur dengan berbagai metode. Penilaian kesehatan bank akan berpengaruh terhadap kemampuan bank dan loyalitas nasabah terhadap bank yang bersangkutan. Salah satu alat untuk mengukur kesehatan bank dengan analisis CAMEL.

Unsur-unsur penilaian analisis camel adalah sebagai berikut :

1. *Capital* ( Permodalan)

Kekurangan modal merupakan gejala umum yang dialami bank-bank di negara-negara berkembang. Kekurangan modal tersebut dapat bersumber dari dua hal, yang pertama adalah karena modal yang jumlahnya kecil, yang kedua adalah kualitas modalnya yang buruk. Dengan demikian, pengawas bank harus yakin bahwa bank harus mempunyai modal yang cukup, baik jumlah maupun

kualitasnya. Para pemegang saham maupun pengurus bank harus benar-benar bertanggung jawab atas modal yang sudah ditanamkan.

Pada saat ini persyaratan untuk mendirikan bank baru memerlukan modal disetor sebesar Rp. 3 trilyun. Namun bank-bank yang saat ketentuan tersebut diberlakukan sudah berdiri jumlah modalnya mungkin kurang dari jumlah tersebut. Pengertian kecukupan modal tersebut tidak hanya dihitung dari jumlah nominalnya, tetapi juga dari rasio kecukupan modal, atau yang sering disebut sebagai *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Rasio tersebut merupakan perbandingan antara jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Pada saat ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, CAR suatu bank sekurang-kurangnya sebesar 8%. (<http://mdhaqiqi.wordpress.com>).

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor permodalan antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a) kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)
  - b) komposisi permodalan,
  - c) *trend* ke depan/proyeksi KPMM,
  - d) aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan modal Bank,
  - e) kemampuan Bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan),
  - f) rencana permodalan Bank untuk mendukung pertumbuhan usaha.
  - g) akses kepada sumber permodalan, dan
  - h) kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan Bank.
- (<http://repository.usu.ac.id>).

## 2. *Assets* (Kualitas Aset)

Dalam kondisi normal sebagian besar aktiva suatu bank terdiri dari kredit dan aktiva lain yang dapat menghasilkan atau menjadi sumber pendapatan bagi bank, sehingga jenis aktiva tersebut sering disebut sebagai aktiva produktif. Dengan kata lain, aktiva produktif adalah penanaman dana Bank baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, surat berharga, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening administratif.

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor kualitas aset antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a) aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan total Aktiva produktif,
- b) debitur inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit,
- c) perkembangan aktiva produktif bermasalah/*non performing asset* dibandingkan dengan aktiva produktif,
- d) tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP),
- e) kecukupan pertumbuhan dan prosedur aktiva produktif,
- f) sistem kaji ulang (*review*) internal terhadap aktiva produktif,
- g) dokumentasi aktiva produktif, dan
- h) kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.

3. *Management* (Manajemen)

Manajemen atau pengelolaan suatu bank akan menentukan sehat tidaknya suatu bank. Mengingat hal tersebut, maka pengelolaan suatu manajemen sebuah bank mendapatkan perhatian yang besar dalam penilaian tingkat kesehatan suatu bank diharapkan dapat menciptakan dan memelihara kesehatannya.

Penilaian terhadap faktor manajemen antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a) manajemen umum,
- b) penerapan sistem manajemen risiko,
- c) kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya
- d) *Net Profit Margin* (NPM).

4. *Earning* (Rentabilitas)

Salah satu parameter untuk mengukur tingkat kesehatan suatu bank adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan. Perlu diketahui bahwa apabila bank selalu mengalami kerugian dalam kegiatan operasinya maka tentu saja lama kelamaan kerugian tersebut akan memakan modalnya. Bank yang dalam kondisi demikian tentu saja tidak dapat dikatakan sehat.

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor rentabilitas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a) *return on assets* (ROA),
- b) *return on equity* (ROE),
- c) *net interest margin* (NIM),
- d) Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional (BOPO),
- e) perkembangan laba operasional,
- f) komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan,
- g) penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya, dan
- h) prospek laba operasional

5. *Liquidity* (Likuiditas)

Penilaian terhadap faktor likuiditas dilakukan dengan menilai dua rasio, yaitu rasio Kewajiban Bersih Antar Bank terhadap Modal Inti dan rasio Kredit terhadap Dana yang Diterima oleh Bank. Yang dimaksud Kewajiban Bersih Antar Bank adalah selisih antara kewajiban bank dengan tagihan kepada bank lain. Sementara itu yang termasuk Dana yang Diterima adalah Kredit Likuiditas Bank Indonesia, Giro, Deposito, dan Tabungan Masyarakat, Pinjaman bukan dari bank yang berjangka waktu lebih dari tiga bulan (tidak termasuk pinjaman).

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuiditas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a) aktiva likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan dengan pasiva likuid kurang dari 1 bulan,
- b) *1-month maturity mismatch ratio*,
- c) *Loan to Deposit Ratio* (LDR),
- d) proyeksi *cash flow* 3 bulan mendatang,
- e) ketergantungan pada dana antar bank dan depositan inti,
- f) pertumbuhan dan pengelolaan likuiditas (*assets and liabilities management/ ALMA*),
- g) kemampuan Bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya, dan
- h) stabilitas dana pihak ketiga (DPK).

Penilaian ini menjadi pedoman untuk menentukan langkah-langkah yang harus diambil dalam menentukan apakah keadaan suatu bank tersebut sehat atau tidak. Semakin banyak poin-poin yang diikutsertakan dalam penilaian CAMEL untuk menilai tingkat kesehatan bank, semakin banyak aspek yang diperoleh. Semakin banyak aspek yang diperoleh, semakin banyak pertimbangan yang dapat menentukan keadaan bank tersebut.

## **2.3 Variabel-variabel**

### **2.3.1. Kredit**

#### **2.3.1.1 Pengertian Kredit**

Kredit dijelaskan dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 1, dikatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunga/bagi hasilnya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Hasibuan, 2005:87). Di perbankan Penyaluran kredit usaha atau penyaluran kredit merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan penyaluran kredit akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha perbankan.

Penyaluran kredit yang diberikan oleh lembaga penyaluran kredit didasarkan atas kepercayaan sehingga dengan demikian pemberian penyaluran kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa suatu lembaga penyaluran kredit baru akan memberikan penyaluran kredit jika yakin bahwa penerima penyaluran kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tanpa keyakinan tersebut suatu lembaga penyaluran kredit tidak akan memberikan penyaluran kreditnya kepada pihak lain.

Menurut Thomas Suyatno dkk (2007;14) Dengan demikian unsur-unsur yang terdapat dalam penyaluran kredit yaitu:

1. Kepercayaan yaitu keyakinan dari pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu yang akan datang.
2. Waktu yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan di terima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai *agio* dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan di terima pada masa yang akan datang.
3. Risiko yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya.
4. Prestasi atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa.

Tujuan penyaluran penyaluran kredit menurut Hasibuan (2005:88) antara lain:

- a) Memenuhi kebutuhan nasabah dalam persediaan uang tunai saat ini.
- b) Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada.
- c) Melaksanakan kegiatan operasional bank.
- d) Memenuhi permintaan penyaluran kredit dari masyarakat.
- e) Memperlancar lalu lintas pembayaran.
- f) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan menurut Muhammad (2005:17-18) tujuan penyaluran kredit/penyaluran kredit dibedakan menjadi dua kelompok yaitu : tujuan penyaluran kredit untuk tingkat makro, dan tujuan penyaluran kredit untuk tingkat mikro. Secara makro, penyaluran kredit bertujuan untuk:

1. Peningkatan ekonomi masyarakat.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha.
3. Meningkatkan produktivitas.
4. Membuka lapangan kerja baru.
5. Terjadi distribusi pendapatan..



Bila pengelolaanya tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha perbankan. Sedangkan dilihat dari nasabah merupakan tambahan modal yang dapat digunakan untuk membiayai usaha produktif atau memperkuat usaha yang telah ada untuk membentuk usaha baru atau untuk memperoleh sarana produksi secara terus menerus dalam rangka meningkatkan pendapatan yang diperoleh sebagai akibat tambahan modal dalam usaha produktifnya (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tahun 2005 : 1-2).

Suatu penyaluran kredit mencapai fungsinya, apabila secara sosial ekonomis, baik bagi debitur, penyaluran kreditur, maupun masyarakat membawa pengaruh yang lebih baik. Bagi pihak debitur dan penyaluran kreditur, mereka memperoleh keuntungan, juga mengalami peningkatan kesejahteraan, sedangkan bagi Negara mengalami tambahan penerimaan Negara dari pajak, juga kemajuan ekonomi yang bersifat mikro maupun makro (Djumhana, 1996:233).

### **2.3.1.2 Fungsi Kredit**

Secara umum Thomas Suyatno dkk (2007;16) menyatakan ada delapan fungsi kredit yang diberikan oleh perbankan sebagai berikut :

a. Kredit dapat meningkatkan daya guna dari uang

Para pemilik uang / modal dapat secara langsung, meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan, untuk meningkatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya.

Para pemilik uang/modal dapat menyimpan uangnya pada lembaga-lembaga keuangan. Uang tersebut diberikan sebagai pinjaman kepada perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan usahanya.

b. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro, bilyet, dan wasel, sehingga apabila pembayaran-pembayaran dilakukan dengan cek, giro, bilyet, dan wasel maka akan dapat meningkatkan peredaran uang giral. Disamping itu, kredit perbankan yang di tarik secara tunai dapat pula meningkatkan

peredaran uang kartal, sehingga arus lalu lintas uang akan berkembang pula.

c. Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang

Dengan mendapat kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat. Di samping, kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang, baik melalui penjualan secara kredit maupun dengan membeli barang-barang dari satu tempat dan menjualnya ke tempat lain. Pembelian tersebut uangnya berasal dari kredit. Hal ini juga berarti bahwa kredit tersebut dapat pula meningkatkan manfaat suatu barang.

d. Kredit meningkatkan peredaran barang

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, pertumbuhan diarahkan kepada usaha-usaha antara lain :

Pengendalian inflasi

Peningkatan ekspor

Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.

Arus kredit dihadapkan pada sektor-sektor yang produktif dengan pembatasan kualitatif dan kuantitatif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan dalam negeri agar bisa diekspor.

e. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan

Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas usahanya dengan mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan usaha dan pendirian proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut. Dengan demikian mereka akan memperoleh pendapatan, apabila perluasan usaha serta pendirian proyek-proyek baru telah selesai, maka untuk mengelolanya diperlukan pula tenaga kerja. Dengan tertampungnya tenaga-tenaga kerja tersebut, maka pemerataan pendapatan akan meningkat pula.

f. Kredit dapat meningkatkan kegairahan usaha masyarakat

Setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkatkan usaha tersebut, namun ada kalanya dibatasi oleh kemampuan di bidang permodalan. Bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kekurangmampuan para pengusaha di bidang permodalan tersebut, sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.

g. Kredit dapat sebagai alat hubungan internasional

Bank-bank besar di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha, dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Begitu juga negara-negara yang mempunyai cadangan devisa dan tabungan yang tinggi, dapat bantuan-bantuan dalam bentuk kredit kepada negara-negara yang sedang berkembang untuk membangun. Bantuan dalam bentuk kredit ini tidak saja dapat mempererat hubungan ekonomi antarnegara yang bersangkutan tetapi juga meningkatkan hubungan internasional.

menurut Hasibuan (2005:88) Fungsi penyaluran kredit bagi masyarakat antara lain:

- 1) Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian.
- 2) Mempeluas lapangan kerja bagi masyarakat.
- 3) Memperlancar arus barang dan arus uang.
- 4) Meningkatkan hubungan internasional
- 5) Meningkatkan produktivitas dana yang ada.
- 6) Meningkatkan daya guna (*utility*) barang.
- 7) Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat.
- 8) Memperbesar modal kerja perusahaan.
- 9) Meningkatkan income perkapita (IPC) masyarakat.
- 10) Mengubah cara berpikir/bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.

### **2.3.1.3 Jenis-jenis Kredit**

Menurut Thomas Suyatno (2007;24) jenis-jenis kredit yang diberikan oleh perbankan kepada masyarakat dapat dilihat dari berbagai sudut, yaitu sebagai berikut:

#### **2.3.1.3.1 Kredit dilihat dari sudut tujuannya**

- a. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumtif.
- b. Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi.
- c. Kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual lagi. Kredit perdagangan tersebut dapat terdiri atas kredit perdagangan dalam negeri dan luar negeri.

#### **2.3.1.3.2 Kredit di lihat dari sudut jangka waktunya**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14/1967 tentang pokok-pokok perbankan, jenis-jenis kredit di lihat dari sudut jangka waktunya terdiri atas :

- a. Kredit jangka pendek (*Short Term Loan*) yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Dalam kredit jangka pendek juga termasuk kredit untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun. Di lihat dari segi perusahaan kredit jangka pendek tersebut dapat berbentuk :

Kredit Rekening koran yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya dengan batas plafon tertentu. Perusahaan mengambilnya tidak sekaligus melainkan sebagian demi sebagian sesuai dengan kebutuhannya.

Kredit penjualan yaitu kredit yang diberikan oleh penjual kepada pembeli, penjual menyerahkan barang-barangnya lebih dahulu, baru kemudian menerima pembayarannya dari pembeli.

Kredit wasel, ini terjadi apabila suatu perusahaan mengeluarkan Surat Pengakuan Utang yang berisikan kesanggupan untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak tertentu dan pada saat tertentu, dan setelah ditandatangani, surat wesel dapat dijual kepada bank.

Kredit eksploitasi yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk membiayai *current operation* suatu perusahaan.

- b. Kredit jangka menengah (*Medium Term Loan*) yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman.
- c. Kredit jangka panjang (*Long Term Loan*) yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun.

#### 2.3.1.3.3 Kredit di lihat dari sudut jaminannya

- a. Kredit tanpa jaminan (*Unsecured Loan*)

Dalam SK Direksi BI no. 23/69/KEP/DIR bertanggal 28 februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit, pasal 2, telah di atur ketentuan bahwa bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada siapapun tanpa jaminan pemberian kredit sebagaimana di maksud pada Pasal 1 b

Adapun yang di maksud dengan jaminan pemberian kredit pada pasal 1 b, adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

Jaminan opemberian kredit di peroleh bank melalui penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur.

- b. Kredit dalam agunan (*Second Loan*)

Agunan yang diberikan untuk suatu kredit adalah sebagaimana di atur dalam pasal 1 c dan pasal 3 SK, yang secara rinci antara lain sebagai berikut :

Agunan barang, baik barang tetap maupun barang tidak tetap (bergerak).

Agunan pribadi

Agunan efek-efek saham, obligasi, dan sertifikat yang didaftar (*listed*) di bursa efek-efek.

#### 2.3.1.3.4Kredit di lihat dari sudut penggunaanya

- a. Kredit eksploitasi adalah kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar.

Penggolongan kredit jangka pendek untuk modal kerja dibagi dalam 6 golongan, yaitu :

Golongan I dengan suku bunga 9% setahun adalah kredit modal kerja untuk pengadaan dan penyaluran beras/gabah/padi dan jagung oleh BUUD/KUD.

Golongan II dengan suku bunga 12% setahun adalah sebagai berikut :

- a. Kredit untuk penanaman padi dan palawija dalam rangka Bimas dan Inmas.
- b. Kredit pengumpulan dan penyaluran garam rakyat oleh BUUD/KUD dan PN Garam serta kredit modal kerja PN Garam
- c. Kredit modal kerja pabrik terigu
- d. Kredit ekspor dan produsen eksportir
- e. Kredit produksi, impor dan penyaluran pupuk dan obat hama.
- f. Kredit impor dan penyaluran barang-barang di luar pangan dalam rangka bantuan luar negeri.
- g. Kredit modal kerja untuk pengumpulan dan penyaluran hasil pertanian, peternakan, dan perikanan oleh BUUD/KUD dan Koperasi.
- h. Kredit modal kerja untuk usaha pertanian rakyat.

Golongan III dengan suku bunga 13,5% setahun adalah :

- a. Kredit modal kerja untuk industri dan jasa-jasa
- b. Kredit modal kerja untuk produksi lainnya
- c. Kredit impor dan penyaluran barang-barang yang di awasi
- d. Kredit untuk pembiayaan persediaan gula
- e. Kredit perdagangan dalam negeri termasuk antar pulau
- f. Kredit modal kerja kontraktor untuk proyek-proyek DIK, INPRES yang dibiayai dengan anggaran pemerintah daerah serta perumahan sederhana.

Golongan IV dengan suku bunga 15% setahun adalah kredit modal kerja untuk kontraktor lainnya yang tidak termasuk dalam butir 3f.

Golongan V dengan suku bunga 18% setahun adalah untuk kredit impor dan penyaluran barang-barang impor yang tidak termasuk dalam butir (2e), (2f), (3c).

Golongan VI dengan suku bunga 21% setahun adalah untuk kredit impor dan penyaluran barang-barang impor yang tidak termasuk dalam angka (1) sampai dengan (5),

b. Kredit investasi

Yaitu kredit jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi atau penanaman modal.

Terdapat ketentuan-ketentuan pokok mengenai kredit investasi antara lain :

Jangka waktu kredit

Jangka waktu kredit investasi didasarkan pada kemampuan membayar kembali proyek yang dibiayai sebagaimana tercermin dari proyeksi arus dana yang bersangkutan. Untuk bank-bank umum pemerintah, jangka waktu tersebut lamanya 10 tahun, termasuk masa tenggang 4 tahun. Sedangkan untuk Bank Pembangunan Indonesia jangka waktu tersebut lamanya 15 tahun termasuk masa selama 6 tahun. Jangka waktu kredit investasi dihitung sejak tanggal akad kredit ditandatangani oleh bank pelaksana dan nasabah

**2.3.1.3.5 Menurut Hasibuan (2011;206) kredit berdasarkan ciri dan tujuan penggunaan dapat dibedakan sebagai berikut :**

- a. Kredit Modal Kerja (KMK) adalah fasilitas kredit yang dipergunakan untuk membiayai aktiva lancar dan atau menggantikan hutang dagang, serta membiayai sementara kegiatan operasional rutin (sehari-hari) perusahaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.
- b. Kredit Transaksi Khusus adalah fasilitas kredit yang hanya sekali pakai yang disetujui untuk satu tujuan atau beberapa tujuan tertentu. Persetujuan atas suatu pinjaman atau transaksi khusus berlaku hingga jatuh tempo fasilitas tersebut, terkecuali dalam dokumen putusan kreditnya dicantumkan ketentuan yang memungkinkan fasilitas itu dapat diberikan

kembali atau diperbaharui. Jangka waktu kredit transaksi khusus ditetapkan berdasarkan sifat dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan khusus pemohon dan *cash flow* atau kemampuan membayar kembali.

- c. Kredit tidak langsung adalah kredit yang tidak memerlukan disposisi dana secara langsung pada saat kredit tersebut disetujui.
- d. Kredit investasi adalah fasilitas kredit yang diberikan untuk membantu pembiayaan pemohon dalam memperoleh barang modal selain tanah yang tercermin dalam aktiva tetap perusahaan.
- e. Kredit konsumtif adalah kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan konsumtif yang diperlukan pemohon dan sumber pembayaran kembali kreditnya berasal dari penghasilan/gaji pemohon.

Jenis-jenis kredit berdasarkan cara pelunasan :

- a. Kredit dengan angsuran tetap merupakan kredit-kredit yang tergolong kredit konsumtif, yang dalam angsuran tetap tersebut telah dimasukkan angsuran untuk pokok dan bunga.
- b. Kredit dengan plafon menurun secara periodik pada umumnya ditujukan untuk kredit-kredit jangka panjang,
- c. Kredit dengan plafon tetap pada umumnya ditujukan untuk modal kerja yang berjangka waktu pendek, misalnya 1 tahun.

#### **2.3.1.3.6 Jenis-jenis kredit berdasarkan jangka waktu**

- a. Kredit Kecil atau Kredit Usaha Kecil (KUK) adalah kredit yang mempunyai ciri-ciri kekayaan bersih diluar tanah dan bangunan yang ditempati maksimal Rp. 200 juta.
- b. Kredit Menengah adalah kredit yang besarnya diatas Rp. 350 juta sampai dengan Rp. 25 miliar.
- c. Kredit Besar adalah kredit yang besarnya lebih dari Rp. 25 miliar yang sumber pembayaran kembali kreditnya berasal dari *cash flow* usaha.

#### **2.3.1.3.7 Jenis-jenis kredit berdasarkan bentuk**

- a. Kredit Persekot adalah bentuk kredit yang penarikan dananya dilakukan sekaligus pada saat direalisasikan



- b. Kredit Rekening Koran adalah bentuk kredit yang penarikannya menurut kebutuhan nasabah.

#### **2.3.1.4 Suku bunga kredit**

Definisi suku bunga kredit

Modal merupakan perpindahan dana dari masyarakat, unit bisnis, dan pemerintah ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Dalam hal ini, bank menjadi kreditur dalam titik perputaran dana. Dana yang telah diterima dari masyarakat akan digunakan untuk menyalurkan kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana. Dalam hal ini masyarakat yang kekurangan dana mempunyai alternatif untuk meminjam dana dari bank. Begitupun sebelumnya masyarakat yang kelebihan dana akan menyimpan dana ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Masyarakat yang meminjam dana dibebankan bunga sebagai harga dana yang dipinjam. Jadi, tingkat bunga adalah harga dari pinjaman.

Dana yang di pinjam di bank merupakan suatu beban atas peminjaman sejumlah uang tertentu dimasa datang dan akan menjadi kewajiban berupa bunga kepada masyarakat. Tingkat bunga akan berfluktuasi sehingga akan berpengaruh pada keinginan masyarakat untuk meminjam uang di bank. Makin rendah suku bunga maka semakin tinggi keinginan masyarakat untuk meminjam uang di bank. Artinya, pada tingkat suku bunga rendah maka masyarakat akan lebih terdorong untuk meminjam uang di bank demi memenuhi kebutuhannya.

Sunariyah (2003:62) mengemukakan bahwa tingkat suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit waktu. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumberdaya yang digunakan oleh debitur yang dibayarkan kepada kreditur, Sedangkan Boediono (2001:75) menyatakan bahwa tingkat bunga adalah sebagai harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu.

Sejalan dengan uraian tersebut Kasmir (2003:37) mengemukakan bahwa bunga kredit dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga bagi bank juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus diterima oleh bank dari nasabah yang memperoleh pinjaman. Berdasarkan definisi yang

dikemukakan oleh beberapa penulis diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat suku bunga adalah tarif pinjaman yang diberikan oleh bank dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).

Lebih lanjut bagi Boediono (1992:76) mengemukakan bahwa ada beberapa teori mengenai tingkat suku bunga, yaitu :

1. Klasik, bunga harga dari penggunaan *leanable fund*. terjemahan langsung dari istilah tersebut adalah dana yang tersedia untuk dipinjamkan. Dalam satu periode, ada anggota masyarakat yang menerima pendapatan apa yang mereka perlukan untuk kebutuhan konsumsinya selama periode tersebut, mereka ini merupakan kelompok penabung, jumlah seluruh simpanan mereka membentuk suplai atau penawaran akan *leanable fund*. Apa bila tingkat suku bunga naik, maka penawaran (tabungan) akan naik dan permintaan akan dana investasi akan turun.
2. Keynesian, dalam teori Keynes tingkat suku bunga ditentukan oleh penawaran atau permintaan uang. Menurut teori ini ada 3 motif (transaksi, berjaga-jaga dan spekulasi) yang menjadi sumber timbulnya permintaan akan uang yang di beri nama *liquide preference*, yaitu bahwa permintaan uang menurut teori Keynes berlandaskan konsep bahwa orang pada umumnya menginginkan tetap *liquide* untuk memenuhi 3 motif tersebut
3. Sintesis Klasik dan Keynesian, perbedaan yang nampak mendasar antara jawaban klasik dan Keynesian mengenai mengapa ada bunga yaitu pada klasik menekankan bahwa bunga timbul karena adanya uang yang produktif artinya dengan adanya uang produktif artinya dengan adanya dana di tangan seseorang pengusaha bias menambah alat produksinya yang bisa menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi sedangkan menurut Keynesian, uang bisa produktif dengan berspekulasi di pasar modal dengan kemungkinan memperoleh keuntungan.

Menurut Kasmir (2004:152) dalam kegiatan perbankan konvensional sehari-hari, ada 3 macam bunga yang diberikan bank kepada nasabahnya :

1. Bunga simpanan, merupakan harga beli yang harus di bayar bank kepada nasabah pemilik simpanan. Bunga ini diberikan sebagai ransangan atau balas jasa kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank
2. Bunga pinjaman merupakan bunga yang di bebaskan kepada peminjam atau harga jual yang harus di bayar oleh nasabah kepada bank. Bagi bank bunga pinjaman harga jual. Contoh harga jual adalah bunga kredit konsumtif.
3. Biaya-biaya, ditentukan oleh bank seperti biaya administrasi, biaya kirim, biaya tagih, biaya sewa, biaya iuran dan biaya-biaya lain yang dikenal dengan nama *fee based*.

Ketiga macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dana yang harus di keluarkan oleh bank kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman dan biaya merupakan pendapatan bank yang diterima dari nasabah. Baik bunga simpanan maupun pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lain. Sebagai contoh, jika bunga simpanan tinggi maka secara otomatis bunga pinjaman kredit ikut naik dan demikian pula sebaliknya.

Menurut Kasmir (2003:37-38) mengemukakan bahwa: Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga secara garis besar sebagai berikut:

1. Kebutuhan dana apabila bank kekurangan dana (jumlah simpanan sedikit), sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan bank agar dana tersebut cepat terpenuhi adalah dengan meningkatkan tingkat suku bunga simpanan. Dengan meningkatnya suku bunga simpanan akan menarik nasabah untuk menyimpan dananya di bank.
2. Kebijakan pemerintah, dalam arti baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman tidak boleh melebihi yang ditetapkan pemerintah.
3. Target laba yang diinginkan, merupakan besarnya keuntungan yang diinginkan oleh bank. Jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan demikian pula sebaliknya.

4. Jangka waktu, semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko dimasa mendatang.
5. Kualitas jaminan, semakin *liquid* jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan.
6. Reputasi perusahaan, reputasi perusahaan perusahaan yang akan memperoleh kredit juga sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan risiko kredit macet dimasa mendatang relatif kecil dan sebaliknya.
7. Produk yang kompetitif, maksudnya adalah produk yang dibiayai kredit tersebut laku dipasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif.
8. Hubungan baik, dalam prakteknya pihak bank menggolongkan nasabahnya menjadi dua yaitu nasabah utama (primer) dan nasabah biasa (sekunder). Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank, sehingga dalam penentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah biasa.
9. Persaingan, dalam kondisi tidak stabil, dan kekurangan dana sementara tingkat persaingan semakin ketat, maka bank harus bersaing keras dengan bank lainnya.

Penentuan tingkat suku bunga bank Indonesia yaitu dengan acuan adanya JIBOR, *Jakarta Interbank Offered Rate* (JIBOR) adalah suku bunga indikasi penawaran dalam transaksi PUAB (Pasar Uang Antar Bank) di Indonesia. Yang dimaksud dengan suku bunga indikasi penawaran adalah suku bunga pada transaksi *unsecured loan* antar bank, yang mencerminkan:

Suku bunga pinjaman yang ditawarkan suatu bank kepada bank lain sekaligus  
Suku bunga pinjaman yang bersedia diterima suatu bank dari bank lain

JIBOR terdiri atas 2 mata uang yakni IDR dan USD, dengan masing-masing terdiri dari 6 tenor yakni 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. JIBOR diharapkan dapat menjadi suku bunga acuan yang kredibel dan digunakan pada banyak transaksi keuangan di Indonesia, sehingga mendorong pendalaman pasar keuangan domestik karena akan:

- a) mendorong pengembangan PUAB (Pasar Uang Antar Bank) terutama untuk transaksi dengan tenor diatas 1 bulan yang saat ini transaksinya sangat kecil dan tidak memiliki benchmark suku bunga.
- b) mendorong pelaku pasar untuk menciptakan instrumen pasar uang lain yang berbasis suku bunga.
- c) menciptakan *benchmark* suku bunga bagi transaksi derivatif dan transaksi yang berbasis *floating rates*.
- d) membantu bank dalam menentukan suku bunga pinjaman dan deposito bagi nasabah prima.
- e) membantu pembentukan *benchmark* untuk pasar obligasi.

Dalam menentukan bunga kredit valuta asing pada umumnya bank komersial menggunakan standar SIBOR (*singapore interbank offered rate*) dan LIBOR (*london interbank offered rate*). SIBOR Adalah *singapore interbank offered rate* yaitu suku bunga rata-rata antar bank di Singapura yang ditetapkan berdasarkan suku bunga yang ditawarkan oleh 8 bank terkemuka di singapura. Libor merupakan suku bunga yang digunakan sebagai acuan bunga pinjam-meminjam di antara bank. Artinya Libor dapat mempengaruhi bunga berbagai macam kredit dan instrumen finansial lainnya di dunia. Penetapan LIBOR dilakukan oleh bank-bank terpilih di Inggris *British Bankers Association* adalah lembaga yang menentukan level LIBOR. Angka yang dirilis adalah perhitungan rata-rata suku bunga 16 bank multinasional hingga pukul 11 pagi GMT. Masing-masing bank mengirimkan data mengenai suku bunga yang bersedia mereka kenakan untuk peminjaman antar bank dan data tersebut akan diolah oleh *Thomson Reuters*. Libor dipakai sebagai *benchmark* bunga pinjaman global karena alasan historis sekaligus geografis. London sudah lama menjadi kota pusat transaksi keuangan dunia. Letaknya juga menjadikan waktu perdagangan London

beririsan dengan waktu perdagangan dari berbagai belahan dunia (<http://vibiznews.com>).

## **2.3.2 Dana Pihak Ketiga**

### **2.3.2.1 Pengertian dana Pihak Ketiga**

Dana pihak ketiga adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1). Menurut Hasibuan (2011;140) Dana Pihak ketiga merupakan dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana masyarakat merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana dalam masyarakat.

### **2.3.2.2 Rumus DPK**

Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 dana pihak ketiga adalah giro, tabungan dan deposito. dana pihak ketiga di ukur dengan rumus

$$DPK = \text{Tabungan} + \text{giro} + \text{deposito}$$

### **2.3.2.3 Komponen Dana Pihak Ketiga (DPK)**

- a. Giro Nasabah, yaitu simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro atau surat perintah pemindah bukuan yang lain.
- b. Tabungan, yaitu simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro atau yang dipersamakan dengan itu.
- c. Deposito Berjangka, dalam pos ini termasuk deposito berjangka dalam rupiah yang penarikannya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang disepakati antar bank dengan pihak ketiga. Walaupun

deposito telah jatuh tempo namun belum ditarik oleh deposan maka tetap dimasukkan dalam komponen ini.

- d. Sertifikat Deposito, yaitu simpanan berjangka yang penarikannya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai yang diperjanjikan tetapi dapat diperjualbelikan (Taswan, 2006:106).

Prinsip dan Mekanisme Tabungan Deposito (Taswan, 2006:106) :

1. Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana.
2. Pengelolaan dana bank dapat dilakukan sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh pemilik dana atau tanpa batasan-batasan dari pemilik dana.
3. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisabah yang telah disepakati.
4. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.
5. Bank dapat membebankan biaya administrasi kepada nasabah berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan pengelolaan rekening antara lain biaya materai, biaya cetak laporan transaksi dan saldo tabungan, biaya pembukaan dan penutupan rekening.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah yang telah disepakati tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

### **2.3.3 CAR (*Capital Adequacy Ratio*)**

#### **2.3.3.1 Definisi CAR**

Menurut Hasibuan (2007:58) Pemerintah selalu menetapkan besarnya dana (modal) sendiri setiap bank di negaranya masing-masing. Penentuan besar dana sendiri suatu bank didasarkan atas ketetapan undang-undang, kepres, atau surat edaran Bank Indonesia. KPMM ( Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) atau CAR (*Capital Adequacy Ratio*) atau BIS (*Bank For International Settlements*) adalah kebutuhan modal minimum bank dihitung berdasarkan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko atau ATMR. CAR merupakan salah satu indikator

kesehatan permodalan bank. Penilaian permodalan merupakan penilaian terhadap kecukupan modal bank untuk mengcover eksposur risiko saat ini dan mengantisipasi eksposur risiko dimasa mendatang.

CAR menunjukkan seberapa besar modal bank telah memadai untuk menunjang kebutuhannya dan sebagai dasar untuk menilai prospek kelanjutan usaha bank bersangkutan. Semakin besar CAR maka akan semakin besar daya tahan bank yang bersangkutan dalam menghadapi penyusutan nilai harta bank yang timbul karena adanya harta bermasalah (<http://putracenter.net/2009/>).

### 2.3.3.2 Rumus CAR

Rasio kebutuhan modal bank dihitung dengan cara membandingkan modal sendiri dengan ATMR dengan rumus :

$$CAR = \frac{\text{Modal Sendiri (modal Inti + Modal Pelengkap)}}{\text{ATMR(Neraca Aktiva + Neraca Administrasi)}} \times 100\%$$

(SE BI No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004).

CAR atau KPMM yang didasarkan pada ketentuan BI 8% adalah salah satu cara untuk menghitung apakah modal yang ada pada suatu bank telah memadai atau belum. Jika modal rata-rata suatu bank lebih baik dari bank lainnya maka bank yang bersangkutan akan lebih baik solvabilitasnya. Menurut Hasibuan (2008;58) Ketentuan CAR sebesar 8% bertujuan untuk :

- a. menjaga kepercayaan masyarakat kepada perbankan.
- b. Melindungi dana pihak ketiga pada bank bersangkutan
- c. Untuk memenuhi ketentuan standar Basel.

Menurut (Hasibuan, 2008:58-59) Sanksi bagi bank yang tidak memenuhi CAR 8% disamping diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan bank, juga akan dikenakan sanksi dalam rangka pengawasan dan pembinaan bank

ATMR terdiri dari :

- a. Aktiva neraca yang diberikan bobot sesuai kadar risiko kredit yang melekat.
- b. Beberapa pos dalam *off balance sheet* yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko kredit yang melekat.

Modal terdiri dari :



a. Modal inti terdiri dari

1. Modal disetor

2. Cadangan tambahan modal, terdiri dari :

a. Faktor penambah, yaitu :

- Agio
- Modal sumbangan
- Cadangan umum modal
- Cadangan tujuan modal
- Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak
- Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan taksiran pajak 50%
- Selisih lebih penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri
- Dana setoran modal

b. Faktor pengurang, yaitu :

- Disagio
- Rugi tahun-tahun lalu
- Rugi tahun berjalan
- Selisih kurang penjabaran laporan keuangan cabang diluar negeri
- Penurunan nilai penyertaan pada portopolio yang tersedia untuk dijual

Modal inti diperhitungkan dengan faktor pengurang goodwill. Goodwill merupakan bagian dari aktiva dalam neraca, yang mencerminkan kelebihan pembayaran atas aktiva yang dibutuhkan perusahaan dibandingkan dengan nilai pasar. Atau aktiva tak berwujud yang merepresentasikan jumlah yang lebih besar dari nilai buku yang dibayar oleh suatu perusahaan untuk mendapatkan perusahaan lain (<http://id.wikipedia.org/wiki/Goodwill>).

Modal pelengkap terdiri dari :

a. Cadangan revaluasi aktiva tetap

- b. Cadangan umum Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) maksimal 1,25% dari ATMR
- c. Modal pinjaman subordinasi maksimal 50% dari modal inti. Pinjaman Subordinasi merupakan pinjaman yang diperoleh berdasarkan suatu perjanjian antara bank dengan pihak lain yang hanya dapat dilunasi apabila bank telah memenuhi kewajiban tertentu, dan pelunasannya dilakukan paling akhir dari semua simpanan dan pinjaman yang diterima, dalam hal terjadi likuidasi.
- d. Peningkatan nilai penyertaan pada portopolio yang tersedia untuk dijual setinggi-tingginya sebesar 45%.  
(SE. No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004).

Penilaian aspek permodalan suatu bank lebih dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana atau berapa modal bank tersebut telah memadai untuk menunjang kebutuhannya, serta kemampuan permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian dalam kegiatannya. Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penilaian terhadap faktor permodalan sebagaimana meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Kecukupan, komposisi, dan proyeksi (*trend* ke depan) permodalan serta kemampuan permodalan bank dalam mengcover aset bermasalah
- b. Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan, rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan, dan kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan bank.

Faktor permodalan suatu bank dapat dinilai dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Rasio ini digunakan sebagai indikator terhadap kemampuan bank menutupi penurunan aktiva akibat terjadinya kerugian-kerugian atas aktiva bank dengan menggunakan modal sendiri. CAR merupakan perbandingan antara modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Modal tersebut meliputi modal inti dan pelengkap. Modal inti meliputi: modal disetor, cadangan, laba ditahan, agio saham, modal donasi, dan laba

tahun berjalan (dihitung 50% dari laba atau 100% dari rugi tahun berjalan). Sedangkan modal pelengkap meliputi: cadangan revaluasi aktiva produktif (maksimum 1,25% dari ATMR), modal pinjaman dari subordinasi. ATMR menunjukkan nilai aktiva berisiko yang memerlukan antisipasi modal dalam jumlah yang cukup.

Berdasarkan ketentuan *Bank for International Settlements* (BIS) yang merupakan otoritas moneter di dunia menetapkan rasio minimum CAR sebesar 8%, ketentuan ini mengatur kompetisi yang *fair* dalam pasar keuangan global. Ketentuan tersebut juga wajib diikuti oleh bank-bank di Indonesia, untuk itu Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia melegalkan dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/67/KEP/DIR. tanggal 28 Februari 1991 dengan batas pelaksanaan hingga tahun 1993. Akan tetapi ketentuan CAR mengalami perubahan pada tahun 1997. Bank umum devisa yang modal disetornya mencapai Rp 150 Milyar ditetapkan CAR sebesar 9%, sedangkan bagi bank yang jumlah modalnya kurang dari Rp 150 Milyar dianjurkan untuk merger dengan bank lainnya agar mampu memenuhi ketentuan tersebut (Bank Indonesia, 1997). Dalam pelaksanaan program restrukturisasi perbankan tahun 1998 Bank Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/146/KEP/DIR. tanggal 12 November 1998, dimana CAR diturunkan sampai menjadi 4%. Namun, mulai 31 Desember 2001 peraturan Bank Indonesia yang mengharuskan bank-bank memiliki rasio kecukupan modal (CAR) minimal 8% resmi diberlakukan.

### **2.3.3.3 CAR dalam Peraturan BASEL**

BCBS (*Basel Committee on Banking Supervision*) mengeluarkan suatu rumusan permodalan yang dapat dijadikan acuan oleh bank dalam menetapkan permodalan yang dilandasi dengan prinsip kehati-hatian dalam manajemen risiko (*Prudential Banking*). Rumusan ini dikenal dengan nama *Basel Accord* (*Basel I*). Dalam Accord ini, modal diklasifikasi menjadi dua kategori yaitu, *Core capital* (Tier 1) dan *Supplementary Capital* (Tier 2) dimana besaran dari Tier 2 sangat ditentukan dari Tier 1. Sistem ini dibuat sebagai penerapan pengurangan

risiko kredit dengan syarat *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak boleh kurang dari 8%. Atau, dengan bahasa sederhana, bank-bank diharapkan memisahkan eksposurnya.

Basel I diakui telah berhasil mencapai dua sasaran utamanya, yaitu menjaga tingkat kecukupan modal dalam sistem perbankan internasional dan menciptakan iklim kompetisi yang lebih seimbang melalui pemeliharaan modal yang cukup diantara perbankan internasional. Namun, pada tahun 1999 (setelah dibahas sejak tahun 1996), BCBS melakukan penyempurnaan terhadap Basel I yang dianggap masih kurang mampu untuk meredam dan menghadapi potensi risiko dari sistem perbankan di masa depan.

Penyempurnaan Basel I diarahkan untuk membuat kesepakatan modal baru yang tujuan utamanya adalah untuk mengarahkan semua risiko perbankan ke dalam suatu kerangka pemikiran kecukupan modal secara menyeluruh. Kesepakatan modal baru ini dinamakan dengan *Basel Capital Accord II* (Basel II). Di dalam Basel II ada 3 (tiga) pilar yang harus diterapkan secara bersamaan, Pertama, Syarat modal minimum (*Minimum capital requirement*); kedua, Proses review pengawasan bank (*Supervisory Review Process*); ketiga, Disiplin pasar (*Market Discipline*).

Pada tahun 1997, BCBS melengkapi lagi Basel II dengan sistem supervisor yang lebih detail lagi sehingga menjadi prinsip-prinsip dasar dalam melakukan supervisi yang bernama *Basel Core Principles* (BCP). BCP diharapkan dapat menjadi rujukan dasar bagi institusi supervisor keuangan/perbankan dan otoritas publik lainnya yang berlaku secara internasional. BCP memiliki 25 acuan dasar perbankan yang telah dikelompokkan ke dalam 7 (tujuh) prinsip dasar (*core principles*), yaitu prinsip Prakondisi bagi pengawasan bank yang efektif, prinsip perizinan dan struktur, prinsip ketentuan kehati-hatian dan persyaratan, prinsip metode pengawasan perbankan yang sedang berjalan. prinsip persyaratan informasi, prinsip kewenangan pengawas.

Dengan produk-produk BCBS ini maka semakin lengkaplah infrastruktur yang dibangun oleh negara-negara maju dalam menjalankan niatnya dalam menguasai sumber-sumber keuangan secara internasional. BCBS dijadikan

sebagai acuan internasional bagi seluruh bank di dunia yang kemudian diadopsi ke dalam regulasi domestik, khususnya oleh negara berkembang. Kondisi ini berakibat bank-bank di negara berkembang semakin sulit dalam menjalankan kegiatan operasional mereka, dikarenakan standar-standar yang sangat memberatkan. Sehingga bank lebih memprioritaskan kehati-hatian ketimbang membiayai perekonomian sektor riil.

Acuan yang digunakan IMF untuk melaksanakan program pemulihan dan rehabilitasi sektor industri perbankan adalah *Basel Accord I & II*, serta *Basel Core Principles* (BCP) yang merupakan produk-produk keluaran dari BCBS. Perlu diketahui, bahwa BCBS merupakan komite yang dibentuk oleh *Bank for International Settlement* (BIS), yaitu lembaga keuangan yang dibentuk oleh kelompok negara maju G-7, kemudian berganti menjadi G-10. BIS inilah yang menjadi Bank Penjamin dari seluruh dana pinjaman yang dikeluarkan oleh IMF, ADB, dan World Bank. ([www.bis.com](http://www.bis.com)).

Selain harus berkiblat pada BCBS dalam menyusun desain perbankan, Indonesia juga diharuskan berkiblat pada *standards setters* lainnya, yaitu seperti *Financial Stability Board* (FSB) yang merupakan forum kerjasama dalam rangka meningkatkan stabilitas sistem keuangan global, menetapkan standar di sektor keuangan serta berkolaborasi dengan IMF untuk memberlakukan *Early Warning Exercise*. FSB melibatkan berbagai *standard setters* dalam menjalankan tugasnya, antara lain BCBS untuk perbankan, IOSCO, IASB, dan lain-lain sebagai anggota.

Pengadopsian sistem perbankan Indonesia dengan *Basel Accord I & II*, serta BCP telah dilakukan sejak tahun 1993 seiring dengan perjalanan deregulasi sektor perbankan Indonesia. Tabel di bawah ini memperlihatkan perjalanan penyesuaian regulasi perbankan Indonesia dengan Ketentuan Basel ([www.igj.or.id](http://www.igj.or.id)).

Masih rentannya sistem keamanan atas risiko yang dialami didalam pasar keuangan global karena lemahnya bantalan permodalan yang memadai. Hal ini memperlihatkan bahwa rezim pengaturan sektor keuangan global yang dibuat berdasarkan *Basel Core Principles* (BCP) belumlah memberikan pengaturan yang

sistemik untuk menjawab persoalan krisis. Basel II yang merupakan acuan bank-bank central internasional masih memiliki beberapa kelemahan dalam mengawasi pelaksanaan liberalisasi sektor perbankan dimana pelaku sektor keuangan menjadi sangat tidak terkontrol hanya untuk mengejar profit ditengah persaingan bebas yang semakin liar.

Untuk menjawab persoalan tersebut, disepanjang tahun tahun 2008 hingga tahun 2010, para pemimpin G-20 melakukan pertemuan maraton yang dimulai dari London, Washington, Pittsburgh, hingga disepakati di Korea pada tahun 2010. Pertemuan tersebut untuk menyikapi krisis yang terjadi dan menghasilkan suatu kesepakatan yang disebut dengan *Washington Action Plan (WAP)*. Isi dari WAP tersebut adalah mengenai rencana untuk melakukan reformasi sektor keuangan global seperti penguatan pasar keuangan, peningkatan intensitas pengawasan, serta memluas batasan-batasan pengaturan sektor keuangan untuk menghilangkan fragmentasi antara sektor perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan bukan bank.

Rekomendasi tersebut juga menugaskan kepada *Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)* untuk kembali mengeluarkan aturan internasional guna melakukan reformasi sektor keuangan. Aturan yang kemudian dikeluarkan oleh BCBS disebut dengan Basel III yang merupakan penyempurnaan dari Basel II. Basel III disepakati untuk dilaksanakan pada tahun 2013 dan telah dapat dipenuhi secara menyeluruh pada tahun 2019 oleh seluruh anggota. Dikeluarkannya Basel III ini tidak hanya sekedar untuk merespon krisis keuangan yang terjadi, tetapi juga dijadikan sebagai alat pengontrol bagi pelaku perbankan agar tidak melakukan bisnis tanpa perhitungan yang matang, yang pada akhirnya memecah fokus dan arah liberalisasi. G-20 mengarahkan Basel III untuk mengembalikan jalannya liberalisasi kekhitahnya.

Basel III merupakan pilar pokok reformasi sektor keuangan global. Krisis global memberikan pelajaran bahwa pengaturan permodalan bank Basel II dipandang masih memiliki beberapa kelemahan utama yaitu:

- a) Bersifat prosiklikal (*procyclicality*), permodalan bank cenderung untuk mengikuti siklus perekonomian. Modal dan penyisihan penghapusan

aktiva produktif (*provisioning*) cenderung untuk relatif rendah pada saat ekonomi stabil. Sebaliknya, keduanya diwajibkan (*by regulation*) untuk meningkat pada saat kondisi perekonomian memburuk;

- b) Akibat dari butir a), intermediasi menjadi sangat terhambat pada saat krisis. Sebaliknya kredit dapat tumbuh secara berlebihan pada saat perekonomian tumbuh tinggi;
- c) Beberapa ruang lingkup aplikasi masih komponen risiko tidak termasuk dalam pengaturan Basel II, antara lain modal untuk memitigasi counterparty credit risk dan likuiditas.
- d) Due diligence sangat tergantung pada external credit rating agency.

Diketahui bahwa *credit rating agency* memiliki konflik kepentingan.

Dalam Basel III, perbankan diharuskan mencadangkan modal berkualitas tinggi (*core tier-1*) sebesar 4,5% dari asetnya. Ditambah 2,5% modal bantalan, jika terjadi guncangan, sehingga menjadi 7% pada 2016. Selain itu, masih ditambah dengan modal bantalan dengan kisaran hingga 2,5% pada 2019.

Tetapi penerapan Basel III pada tahun 2015 terhadap Indonesia kemungkinan dapat meningkatkan suku bunga 25-50 basis poin (bps). Namun, Indonesia tetap harus menerapkan Basel III karena sudah merupakan kesepakatan internasional. Selain itu, industri perbankan merupakan industri yang paling dominan di sektor keuangan Indonesia, yaitu mencapai 80 %.

Pada dasarnya Basel III terkait dengan pertumbuhan kenaikan giro wajib minimum (GWM) primer menjadi 8% yang dihubungkan dengan *loan to deposit ratio* (LDR) ideal 78%-100%. Bank-bank dengan LDR rendah tentu merasa terkena dampak pertumbuhan ini. Selain harus meningkatkan biaya dana-dana (*cost of funds*), mereka harus menyediakan dana tambahan.

Peningkatan terhadap CAR di dalam Basel III, yang tadinya 8% menjadi sebesar 13%, akan mengakibatkan semakin banyaknya bank yang mencari penambahan modal, dan hal ini tidak akan mudah dilakukan apalagi dampak Basel III adalah kemungkinan terhadap kenaikan BI Rate. Dengan pendominasian asing di dalam saham-saham bank nasional kemungkinan juga akan memiliki dampak terhadap pelepasan saham jika dirasa tidak mampu di dalam memenuhi

ketentuan tersebut. Inilah yang harus dicermati agar tidak terjadi penarikan *hot money* secara besar-besaran yang dapat mempengaruhi pasar perbankan.

Namun, dari semua standarisasi perbankan BCBS yang diadopsi oleh BI (termasuk Basel III yang akan diadopsi BI pada tahun 2013) hanya memberikan keuntungan bagi kepentingan negara-negara maju, dimana praktek perbankan akan berlaku secara seragam dan liberalisasi perbankan semakin mengglobal, sehingga modal perbankan asing akan lebih mudah untuk masuk dan menguasai pasar perbankan internasional.

Hal ini dibuktikan dengan adanya kerjasama yang dibuat antara G-20 dengan IMF, mengenai kerjasama assistensi untuk negara-negara yang membutuhkan dana di dalam melakukan penanggulangan terhadap krisis keuangan yang terjadi, dengan segala persyaratan yang mengikat terhadap kesepakatan Basel III. Dan Indonesia sebagai salah satu negara anggota dari G-20 yang ikut mengambil dana program tersebut.

Di masa datang perbankan nasional akan semakin tidak memiliki keberanian untuk membiayai sektor riil. Perbankan akan memilih memegang prinsip kehati-hatian dan standar yang tinggi dan hanya berani bermain dalam pasar keuangan jangka pendek, membeli obligasi negara yang lebih aman untuk mendapatkan untung. Dengan demikian maka perbankan nasional akan semakin jauh dari tugas mendasarnya yakni menggerakkan perekonomian nasional.

Garis besar agenda Basel III adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas tier 1 capital salah satunya melalui persyaratan *predominant common equity* pada tier 1 capital, simplifikasi tier 2 capital serta penghapusan modal tier 3 dan modal inovatif tier 1;
2. Mitigasi procyclicality melalui usulan countercyclical capital framework meliputi usulan penerapan forward looking provisioning, persyaratan *capital conservation buffer* dan *countercyclical capital buffer*;
3. Penerapan *leverage ratio* sebagai ukuran untuk membatasi pembentukan leverage di sektor perbankan;
4. Peningkatan persyaratan permodalan untuk exposure *counterparty credit risk* (CCR);



5. Penerapan global liquidity standards yang akan mensyaratkan penerapan dua rasio likuiditas standard yaitu *liquidity coverage ratio* (untuk melihat stabilitas likuiditas jangka pendek) dan *net stable funding ratio* (untuk melihat stabilitas likuiditas jangka panjang) serta usulan penerapan empat *liquidity monitoring tools*
6. Revisi framework Basel II untuk pilar 1, 2 dan 3 yang terutama terkait dengan perlakuan dan persyaratan modal dan bobot risiko yang lebih tinggi untuk transaksi trading book, derivative dan sekuritisasi.

Kesepakatan yang telah dicapai dalam peningkatan kualitas permodalan dan likuiditas lembaga keuangan secara global adalah sebagai berikut:

- a) Menyepakati penyempurnaan kriteria kualitas persyaratan modal dengan diperkenalkannya *pre-dominant common equity modal tier 1*.
- b) Menyepakati ditingkatkannya minimum *common equity* dari 2% menjadi 4.5% serta minimum level tier 1 dari 4% menjadi 6%.
- c) Menyepakati penerapan *conservation buffer* (2.5%) dan *countercyclical capital buffer* (0-2.5%). *Countercyclical capital buffer* diterapkan jika terjadi pertumbuhan kredit yang berlebihan.
- d) Menyepakati penyempurnaan *risk coverage* yaitu dengan memperketat persyaratan modal untuk eksposur *trading book*, *sekuritisasi*, *off-balance sheet vehicles* dan *counterparty credit risk*
- e) Menyepakati penerapan *leverage ratio* sebesar 3% sebagai *non-risk based "backstop"* untuk membatasi pembentukan *leverage* di sektor perbankan. Leverage ratio dapat bermigrasi ke Pilar 1 berdasarkan jika hasil kalibrasi dan review menyimpulkan hal tersebut;
- f) Menyepakati penerapan standar likuiditas internasional yaitu *Liquidity Coverage Ratio (LCR)* dan *Net Stable Funding Ratio (NSFR)* serta penerapan tools untuk memantau risiko likuiditas;
- g) Kerangka permodalan Basel III dan kerangka likuiditas akan mulai diterapkan pada Januari 2013 secara bertahap hingga implementasi penuh pada Januari 2019.

- h) BCBS telah menyempurnakan kerangka Pilar 2 – Supervisory Review Process yang meliputi *firm-wide governance*, manajemen risiko konsentrasi, eksposur sekuritisasi, *stress testing*, praktek valuasi dan *eksposur off-balance sheet*. Selain itu telah pula diterbitkan berbagai panduan seperti panduan *sound compensation practices*, *corporate governance* dan *supervisory colleges*. Anggota BCBS ermasuk Indonesia diharapkan dapat secepatnya mengadopsi perubahan ini.
- i) BCBS telah menyempurnakan panduan Pilar 3 meliputi *disclosure eksposur sekuritisasi, sponsorship* dari *off-balance sheet vehicles*.
- j) BCBS telah memfinalisasi panduan *disclosure* mengenai risiko dan praktek kompensasi, serta ke depan akan menyempurnakan panduan *disclosure* untuk kerangka permodalan dan likuiditas Basel III (<http://bankirnews.com>).

### **2.3.4 NPL (*Non Performing Loan*)**

#### **2.3.4.1 Definisi NPL (*Non Performing Loan*)**

*Non Performing Loan* (NPL) menunjukkan kualitas aset suatu bank. *Non Performing Loan* (NPL) memberikan posisi kredit bermasalah industri bank yang di golongkan ke dalam kelompok kurang lancar, diragukan, dan macet terhadap total kredit yang disalurkan (Hayat, 2008). Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (SE. No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004). Semakin besarnya kredit macet akan meningkatkan NPL bank, dalam hal ini bank dengan tingkat pemberian kredit yang besar tanpa diimbangi dengan kemampuan dalam menjaga kualitas kreditnya akan berdampak pada penurunan tingkat kesehatan bank, tingkat kesehatan yang semakin menurun berdampak pada fungsi intermediasi bank dalam perekonomian (Imam Mukhlis;2011). Salah satu risiko yang dihadapi

suatu bank ialah risiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan atau yang disebut dengan risiko kredit. Risiko kredit umumnya timbul dari berbagai kredit masuk yang tergolong kredit bermasalah. Keberadaan NPL dalam jumlah yang banyak memberikan kesulitan sekaligus menurunkan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Oleh sebab itu bank dituntut untuk selalu menjaga kreditnya agar tidak masuk dalam golongan kredit bermasalah (NPL). Risiko yang dihadapi bank merupakan risiko tidak terbayarnya kredit yang disebut dengan *default risk* atau risiko kredit. Meskipun risiko kredit tidak dapat dihindarkan, maka harus diusahakan dalam tingkat yang wajar berkisar antara 3% -5% dari total kreditnya. Kredit yang termasuk dalam kategori NPL adalah kredit kurang lancar (*sub standart*), kredit diragukan (*doubtfull*) dan kredit macet (*loss*).

#### **2.3.4.2 Penyebab terjadinya Non Performing Loan**

Menurut Dendawijaya (2003:12), kemacetan fasilitas kredit disebabkan oleh dua faktor yaitu :

a. Dari pihak perbankan

Dalam hal ini pihak analis kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam menghitung rasio-rasio yang ada. Akibatnya, apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya.

b. Dari pihak nasabah

Kemacetan kredit yang disebabkan nasabah diakibatkan dari 2 hal yaitu :adanya unsur kesengajaan, dan adanya unsur tidak sengaja.

#### **2.3.4.3 Dampak NPL**

Dampak dari keberadaan *Non Performing Loan* dalam jumlah besar tidak hanya berdampak pada bank yang bersangkutan, tetapi juga meluas dalam cakupan nasional apabila tidak dapat ditangani dengan tepat. Dendawijaya (2003) mengemukakan dampak *Non Performing Loan* yang tidak wajar sebagai berikut :

- a. Hilangnya kesempatan memperoleh kesempatan pendapatan (*income*) dari kredit yang diberikan, sehingga mengurangi laba dan mengurangi kemampuan untuk memberikan kredit
- b. Rasio kualitas aktiva produktif menjadi semakin besar yang menggambarkan situasi memburuk.
- c. Bank harus memperbesar penyisihan untuk cadangan aktiva produktif yang diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi besar modal bank.
- d. Menurunkan tingkat kesehatan bank berdasarkan perhitungan kesehatan bank dengan analisis CAMELS.

#### 2.3.4.4 Rumus NPL (*Non Performing Loan*)

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit dalam kualitas kurang lancar, diragukan dan macet}}{\text{Total Kresit}} \times 100\%$$

(SE BI No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004).

Menurut Thomas Suyatno dkk (2007) Kolektibilitas aktiva produktif dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. Lancar

Kredit digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini:

1. Kredit dengan angsuran diluar kredit pemilikan rumah (KPR) :
  - a. Tidak terdapat tunggakan angsuran produk, tunggakan bunga, atau cerukan karena penarikan
  - b. Terdapat tunggakan angsuran pokok tetapi
    - Belum melampaui 1 bulan, bagi kredit yang ditetapkan masa angurannya kurang dari 1 bulan
    - Belum melampaui 3 bulan, bagi kredit yang ditetapkan masa angurannya bulanan, 2 bulanan, atau 3 bulanan
    - Belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angurannya ditetapkan 4 bulanan atau lebih.

- c. Terdapat tunggakan bunga
  - Belum melampaui 1 bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari 1 bulan
  - Belum melampaui 3 bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan
- d. Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja
- 2. Kredit dengan angsuran di luar KPR
  - a. Tidak terdapat angsuran pokok
  - b. Terdapat tunggakan angsuran pokok tetapi belum melampaui 6 bulan
- 3. Kredit tanpa angsuran atau kredit rekening koran
  - a. Kredit belum jatuh tempo dan tidak terdapat tunggakan bunga
  - b. Kredit belum jatuh tempo dan terdapat tunggakan bunga, tetapi belum melampaui 3 bulan
  - c. Kredit telah jatuh tempo dan telah dilakukan analisis perpanjangannya, tetapi karena kesulitan teknis belum dapat diperpanjang
  - d. Terdapat cerukan karena penarikan, tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja
- 4. Cerukan rekening giro
  - Terdapat cerukan rekening giro, tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.
  - b. Kurang lancar

Kredit digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini :

- 1. Kredit dengan angsuran diluar kredit pemilikan rumah (KPR) :
  - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok
    - melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan bagi kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan.

melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, 2 bulanan atau 3 bulanan.

melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 12 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulanan atau lebih.

- b. Terdapat cerukan karena penarikan yang jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja, tetapi belum melampaui 30 hari kerja.
- c. Terdapat tunggakan bunga

melampaui 1 bulan tetapi belum melampaui 3 bulan bagi kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan  
melampaui 3 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan.

2. Kredit dengan angsuran KPR

Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 6 bulan, tetapi belum melampaui 9 bulan.

3. Kredit tanpa angsuran atau kredit rekening koran

a. Kredit belum jatuh tempo

Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 bulan, tetapi belum melampaui 6 bulan

Terdapat penambahan plafon atau kredit baru yang dimaksudkan untuk melunasi tunggakan bunga.

b. Kredit telah jatuh tempo dan belum di bayar, tetapi belum melampaui 3 bulan

c. Terdapat cerukan karena penarikan, tetapi jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja namun belum melampaui 30 hari kerja.

c. Diragukan

Kredit digolongkan diragukan apabila jredit yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar. Tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa :

1. Kredit masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari utang peminjam, termasuk bunganya.
2. Kredit tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari utang peminjam.

d. Macet

Kredit digolongkan macet apabila :

1. Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan
2. Memenuhi kriteria diragukan, dan dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit.
3. Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau Badan Usaha Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

#### **2.3.4.5 Penanganan adanya kredit bermasalah**

Setiap pemberian kredit tentunya dilakukan dengan perhitungan matang atas risiko yang mungkin ditimbulkannya. Namun ketika risiko tersebut benar terjadi, penanganan atas piutang/kredit bermasalah seharusnya dilakukan secara komprehensif dan melalui prosedur serta tata cara yang sesuai dengan jalur hukum yang ada, tanpa mengurangi prinsip untuk meminimalkan kerugian *finansial* yang ditimbulkan.

Kesalahan dalam penanganan piutang/kredit bermasalah akan membawa dampak hukum dan lain-lain yang merugikan bagi semua pihak, baik dari aspek *finansial* maupun aspek bisnis dan dalam skala luas berpotensi menimbulkan bencana finansial nasional.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti:

Perjanjian dan perikatan dengan jaminan dan tanpa jaminan;

Alternatif penyelesaian hukum untuk piutang/kredit bermasalah yang berasal dari perjanjian dan perikatan dengan jaminan dan tanpa jaminan;

Prosedur dan tata cara eksekusi jaminan;

Pemahaman kasus dan antisipasi piutang/kredit bermasalah.

Beberapa bagian terkait yang diharapkan memahami penanganan kredit bermasalah adalah direktur, manager, supervisor dan staf di bagian hukum, bagian keuangan, dan bagian kredit (<http://nustaffsite.gunadarma.ac.id>).

#### **2.3.4.6 Dampak peraturan Basel terhadap NPL**

*Basel Committee* untuk pengawasan perbankan telah mengeluarkan Prinsip Dasar Basel (*Basel Core Principles/BCP*) untuk memperbaiki kekuatan sistem keuangan. Salah satu aturan penting dari Prinsip Dasar Basel adalah untuk melindungi bank agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta mewajibkan pengawas perbankan untuk dapat menentukan apakah suatu bank telah memiliki pertumbuhan, praktek, dan prosedur perbankan yang standar dan layak, termasuk juga dengan aturan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN). Aturan ini sangat mendukung kerjasama internasional dalam memberantas kejahatan pencucian uang dan keuangan terorisme. (*Basel Committee on Banking Supervision, 2001*) Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia, menyatakan industri perbankan nasional telah memiliki Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang merupakan *blueprint* mengenai arah dan tatanan perbankan nasional jangka panjang. Tujuan API sangat fundamental yaitu terciptanya industri perbankan nasional yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Membangun struktur perbankan yang sehat dan kuat dapat dilakukan dengan upaya memperkuat permodalan perbankan untuk mendukung pertumbuhan kredit yang tinggi. Peningkatan modal usaha akan mampu meningkatkan skala usaha maupun *skill level* yang dimiliki serta mengantisipasi risiko-risiko yang dihadapi. Hasil penelitian Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia, menyimpulkan bahwa pelaku perbankan di Indonesia cenderung menghindari risiko (*risk averse*) karena adanya sanksi dari Bank



Indonesia terhadap pelanggaran keputusan penyaluran kredit yang berisiko macet, yang seharusnya hanya dikenakan ketentuan ketidakhati-hatian. Sanksi tersebut berdampak pada keputusan manajemen bank dalam penyaluran kredit masih terbatas pada sektor konsumsi dan *demand* di sektor riil. (Kajian Stabilitas Keuangan BI, 2005)

Kesepakatan Basel III merupakan usaha untuk memperkuat standar modal perbankan dunia. Dengan kesepakatan tersebut, perbankan akan diharapkan menjalankan bisnisnya secara hati-hati dan tak berisiko tinggi sehingga terhindar dari krisis ekonomi yang bisa terjadi. Dalam pemberian kredit, bank-bank diharapkan senantiasa didukung oleh modal inti yang kuat.

Meski perbankan Indonesia diperkirakan relatif masih bisa menyesuaikan dengan Basel III karena modal inti perbankan Indonesia masih dalam kisaran 13%-14% atau masih dalam posisi jauh lebih aman. IMF memperkirakan perbankan akan ambruk dengan *non performing loan* (NPL) sebesar 31,5% pada kuartal pertama 2011 (*infobanknews.com*).

## **2.4 Pengembangan Hipotesis**

Hipotesis adalah sarana penelitian ilmiah yang penting dan tidak bisa ditinggalkan, karena ia merupakan instrumen kerja dari teori. Suatu hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang menghubungkan antara dua variabel atau lebih (Singarimbun dan Effendi, 1995:43). Menurut (Sekaran, 2006:235) Hipotesis adalah perkiraan ilmiah tentang hubungan yang dibangun secara logis antara dua atau lebih variabel, yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji.

### **2.4.1 Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Penyaluran kredit.**

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang di himpun bank umum dari masyarakat yang berbentuk simpanan giro ( *demand deposits* ), simpanan tabungan ( *saving deposits* ) dan simpanan deposito ( *time deposits* ). Idealnya, dana yang berasal

dari masyarakat ini, merupakan suatu tulang punggung (*basic*) dari dana yang harus diolah atau dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan. Ketiga dana pihak ketiga tersebut hanya dibedakan dalam cara penarikan oleh di pemilliknya. Pada simpanan giro, pemilik dapat menarik dananya sewaktu-waktu baik sebagian atau seluruhnya. Sedangkan pada simpanan deposito, pemilik hanya boleh menarik sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan dengan bank. Tabungan yang merupakan simpanan masyarakat pengambilannya ditetapkan. Semakin tinggi dana pihak ketiga, maka jumlah kredit yang diberikan semakin meningkat. Variabel DPK pada penelitian Sri Haryati (2011), beserta (Meydianawhati;2007) dan Billi Arma (2010) berpengaruh signifikan.

Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis yang pertama adalah :

**H1: dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap Penyaluran kredit pada bank umum di BEI.**

#### **2.4.2 Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Penyaluran kredit**

Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2002:562) CAR adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang cukup dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, dan mengendalikan risiko yang timbul dan dapat mempengaruhi saldo modal bank. Menurut Hasibuan (2008:58) menyatakan bahwa CAR (KPM) adalah salah satu cara untuk menghitung apakah modal yang ada pada suatu bank telah memadai atau belum. Faktor permodalan suatu bank dapat dinilai dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Rasio ini digunakan sebagai indikator terhadap kemampuan bank menutupi penurunan aktiva akibat terjadinya kerugian-kerugian atas aktiva bank dengan menggunakan modal sendiri. CAR merupakan perbandingan antara modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Modal tersebut meliputi modal inti dan pelengkap. Modal inti meliputi: modal disetor, cadangan, laba ditahan, agio saham, modal donasi, dan laba tahun berjalan (dihitung 50 persen dari laba atau 100 persen dari rugi tahun berjalan). Sedangkan modal pelengkap meliputi: cadangan revaluasi aktiva produktif (maksimum 1,25 persen dari ATMR), modal pinjaman dari subordinasi. ATMR

menunjukkan nilai aktiva berisiko yang memerlukan antisipasi modal dalam jumlah yang cukup.

Berdasarkan ketentuan *Bank for International Settlements* (BIS) yang merupakan otoritas moneter di dunia menetapkan rasio minimum CAR sebesar 8 persen, ketentuan ini mengatur kompetisi yang *fair* dalam pasar keuangan global. Ketentuan tersebut juga wajib diikuti oleh bank-bank di Indonesia, untuk itu Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia melegalkan dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/67/Kep/Dir. tanggal 28 Februari 1991 dengan batas pelaksanaan hingga tahun 1993. Akan tetapi ketentuan CAR mengalami perubahan pada tahun 1997. Bank umum devisa yang modal disetornya mencapai Rp 150 Milyar ditetapkan CAR sebesar 9 persen, sedangkan bagi bank yang jumlah modalnya kurang dari Rp 150 Milyar dianjurkan untuk merger dengan bank lainnya agar mampu memenuhi ketentuan tersebut (Bank Indonesia, 1997). Dalam pelaksanaan program restrukturisasi perbankan tahun 1998 Bank Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/146/Kep/Dir. tanggal 12 November 1998, dimana CAR diturunkan sampai menjadi 4 persen. Namun, mulai 31 Desember 2001 peraturan Bank Indonesia yang mengharuskan bank-bank memiliki rasio kecukupan modal (CAR) minimal 8 persen resmi diberlakukan.

Jika modal rata-rata suatu bank lebih baik dari pada bank lainnya maka bank yang bersangkutan akan lebih baik solvabilitasnya. Hal ini berarti semakin baiknya bank dalam memenuhi kecukupan modal dalam melakukan kegiatan bank maka semakin baik pula perusahaan dalam menyalurkan kreditnya kepada masyarakat. Hasil penelitian oleh Meydianawathi (2007), memberikan bukti empiris bahwa CAR berpengaruh positif signifikan.

Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis yang pertama adalah :

**H2: *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap**

**Penyaluran kredit pada bank umum di BEI.**

### **2.4.3 Pengaruh *Non Performing Loan* (NPL) terhadap Penyaluran kredit.**

Menurut Hayat (2008) *Non Performing Loan* (NPL) menunjukkan kualitas aset suatu bank. *Non Performing Loan* (NPL) memberikan posisi kredit bermasalah industri bank yang di golongkan ke dalam kelompok kurang lancar, diragukan, dan macet terhadap total kredit yang disalurkan. Menurut Faisal (2005 : 29) menyatakan bahwa NPL merupakan kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan.

Salah satu rasio penilaian kualitas aktiva produktif dapat digunakan menurut Surat Edaran BI No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 adalah rasio NPL (*Non Performing Loan*). Rasio ini menghitung tingkat kredit bermasalah bila dibandingkan dengan total kredit yang telah diberikan kepada pihak ketiga namun tidak termasuk kredit yang diberikan ke bank lain. Kredit bermasalah adalah kredit yang diklasifikasikan dalam kredit kurang lancar, diragukan, dan macet. Sedangkan kredit bermasalah itu sendiri dihitung secara kotor (*gross*) dengan tidak mengurangkan dengan penyisihan penghapusan aktiva produktif.

Semakin kecil NPL, semakin baik kinerja bank tersebut dalam mengatasi kredit bermasalah. *Non Performing Loan* (NPL) tidak sama dengan kredit macet. Di dunia perbankan, kredit digolongkan menjadi lima kategori yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, kredit yang diragukan pengambilannya dan kredit yang benar-benar macet. Semakin kecil NPL, maka semakin besar penyaluran kredit, sebab dana yang dipinjamkan akan kembali dan akan disalurkan lagi melalui penyaluran kredit. Berdasarkan penelitian Meydianawathi (2007) NPL berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis ketiga adalah :

**H3: *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh negatif terhadap Penyaluran kredit pada bank umum di BEI.**

## 2.5 Model Penelitian

Bank menurut Undang-Undang pokok perbankan nomor 7 tahun 1992 telah di ubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dikatakan bahwa “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak” ( Ketut Rindji, 2000:14 ).

Bank merupakan lembaga *intermediasi*. yang menjembatani para pemilik dana dan debitur artinya bank memperoleh dana dari debitur atau masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dimana kedua pihak saling diuntungkan. Masyarakat mau menyimpan dana di bank karena mereka percaya bahwa bank merupakan lembaga yang aman untuk menyimpan dana dan juga meningkatkan tingkat hasil berupa bunga. Bank dalam menciptakan dan menjaga kepercayaan masyarakat harus dapat menjalankan operasionalnya dengan baik sehingga dapat mencapai tujuannya yaitu menciptakan laba dan meningkatkan nilai investasi atau kekayaan para pemilik saham. Prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh, sedangkan ketentuan mengenai kegiatan usaha bank perlu disempurnakan terutama berkaitan dengan penyaluran dana termasuk di dalamnya peningkatan peranan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan bagi perusahaan berskala besar dan atau berisiko tinggi. Di perbankan Penyaluran kredit usaha atau penyaluran kredit merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan penyaluran kredit akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha perbankan.

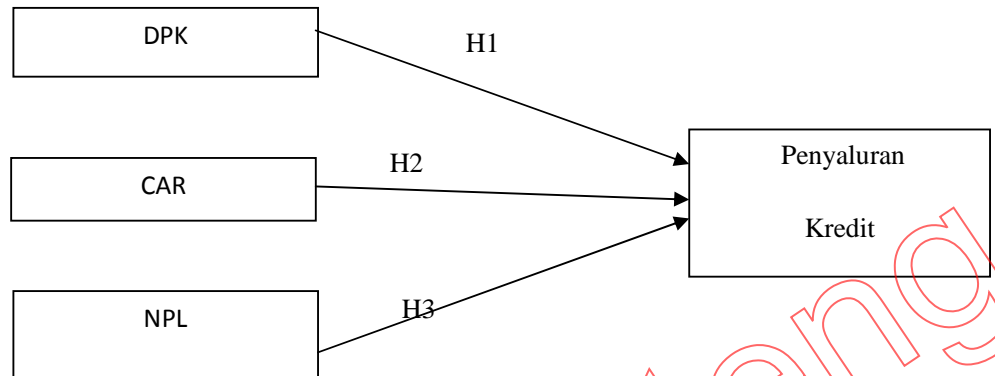
Terdapat perbedaan hasil penelitian untuk variabel DPK, CAR dan NPL, dimana dalam penelitian Sri Haryati (2007) menyimpulkan DPK berpengaruh signifikan, hasil serupa juga ditemukan oleh Meydianawathi (2007) dan Billy Arma (2010) sedangkan penelitian Imam Mukhlis (2011), DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. Variabel CAR pada penelitian Meydianawathi (2007) berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan pada penelitian Billy Arma (2010) CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit bank umum di Indonesia. Variabel NPL pada penelitian

Meydianawathi (2007) berpengaruh signifikan, sedangkan pada penelitian Dias Satria dan Ranga Bagus Subekti (2010) NPL tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit bank umum di Indonesia.

Berdasarkan pada perbedaan hasil penelitian tersebut, maka variabel penelitian terdiri dari DPK, CAR, dan NPL. Semakin tinggi dana pihak ketiga, maka jumlah kredit yang diberikan semakin meningkat, sebab jumlah dana yang tersimpan dalam bank meningkat dan akan disalurkan kepada masyarakat melalui penyaluran kredit perbankan. Sebaliknya apabila dana pihak ketiga semakin rendah, maka jumlah dana yang disalurkan kepada masyarakat melalui penyaluran kredit akan menurun. Menurut Hasibuan (2008 :58) menyatakan bahwa CAR (KPM) adalah salah satu cara untuk menghitung apakah modal yang ada pada suatu bank telah memadai atau belum. Jika modal rata-rata suatu bank lebih baik dari pada bank lainnya maka bank yang bersangkutan akan lebih baik solvabilitasnya. Hal ini berarti semakin baiknya bank dalam memenuhi kecukupan modal dalam melakukan kegiatan bank maka semakin baik pula perusahaan dalam menyalurkan kreditnya kepada masyarakat.

Semakin kecil NPL, semakin baik kinerja bank tersebut dalam mengatasi kredit bermasalah. *Non Performing Loan* (NPL) tidak sama dengan kredit macet. Di dunia perbankan, kredit digolongkan menjadi lima kategori yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, kredit yang diragukan pengambilannya dan kredit yang benar-benar macet. Semakin kecil NPL, maka semakin besar penyaluran kredit, sebab dana yang dipinjamkan akan kembali dan akan disalurkan lagi melalui penyaluran kredit.

**Gambar 2.1**  
**Model Penelitian**



Sumber : Thomas Suyatmo.dkk, (2007:2), Billy Arma (2010), Meydianawathi (2007), dan Imam Mukhlis (2011).

STIE BPPD Jateng

## 2.8 Penelitian sebelumnya

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Sebelumnya**

Peneliti	Judul	Variabel	Alat uji	Hasil
Sri Haryati (2007)	Pertumbuhan Kredit Perbankan Di Indonesia : intermediasi dan Pengaruh Variabel Makro Ekonomi.	Variabel Terikat : pertumbuhan kredit Variabel Bebas : pertumbuhan ekseks likuiditas, pertumbuhan DPK, GDP, Pertumbuhan Ekuitas, BI Rate, tingkat inflasi, kurs valas.	Analisis regresi linier berganda	Secara parsial semua variabel independen (pertumbuhan ekseks likuiditas, pertumbuhan DPK, GDP, Pertumbuhan Ekuitas, BI Rate, tingkat inflasi, kurs valas) mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan kredit
Meydianawathi (2007)	Analisis Perilaku Penawaran kredit Perbankan kepada sektor UMKM di Indonesia (2002-2006).	Variabel Terikat : penawaran kredit perbankan pada sektor UMKM. Variabel Bebas : DPK, CAR, ROA, dan NPL	Analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian secara parsial DPK, CAR, ROA berpengaruh signifikan terhadap penawaran kredit perbankan pada sektor UMKM, sebaliknya NPLs menunjukkan hubungan yang negatif dan signifikan terhadap penawaran kredit.
Dias Satria dan Ranga Bagus Subekti (2010)	Determinasi Penyaluran Kredit Bank Umum Di Indonesia Periode 2006-2009	Variabel Terikat : penyaluran kredit Variabel Bebas : NPL, BOPO, CAR, DPK, ROA, penempatan dana pada SBI	Analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian secara Variabel CAR, ROA, penempatan dana pada SBI dan market share terhadap penyaluran kredit bank umum berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit bank umum di Indonesia, sedangkan NPL, BOPO,, DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit bank umum di Indonesia
Billy Arma (2010)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Penyaluran Kredit Perbankan	Variabel Terikat : pertumbuhan penyaluran kredit Variabel Bebas : NPL, CAR, DPK, suku bunga SBI.	Analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian secara parsial Variabel DPK, CAR, NPL berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan penyaluran kredit bank umum, sedangkan suku bunga SBI tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan penyaluran kredit.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Definisi konsep**

Konsep sebagai adalah suatu gagasan/ide yang relatif sempurna dan bermakna, suatu pengertian tentang suatu objek, produk subjektif yang berasal dari cara seseorang membuat pengertian terhadap objek-objek atau benda-benda melalui pengalamannya (setelah melakukan persepsi terhadap objek/benda). Pada tingkat konkrit, konsep merupakan suatu gambaran mental dari beberapa objek atau kejadian yang sesungguhnya. Pada tingkat abstrak dan kompleks, konsep merupakan sintesis sejumlah kesimpulan yang telah ditarik dari pengalaman dengan objek atau kejadian tertentu (<http://carapedia.com>).

##### **3.1.1 Penyaluran Kredit**

Penyaluran kredit menurut UU no 10 tahun 1998 merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dengan perjanjian atau kesepakatan antara pihak pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, dimana pihak peminjam diwajibkan mengembalikan hutangnya sesuai jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

##### **3.1.2 Dana Pihak Ketiga**

Dana pihak ketiga adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan)

DPK (X1) diukur dari hasil dari penambahan dari tabungan , deposito dan giro masyarakat (Kristian;2011).

##### **3.1.3 CAR (*Capital Adequacy Ratio*)**

CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yaitu rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat

berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman(utang), dan lain-lain. CAR rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalkan kredit yang diberikan (Dendawijaya, 2003:122).

### **3.1.3 NPL (*Non Performing Loan*)**

Menurut Surat Edaran BI No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 adalah rasio NPL (*Non Performing Loan*) menghitung tingkat kredit bermasalah bila dibandingkan dengan total kredit yang telah diberikan kepada pihak ketiga namun tidak termasuk kredit yang diberikan ke bank lain.

## **3.2 Definisi Operasional**

Definisi operasional menurut Nur Indrianto dan Bambang Supono (1999:69) adalah penentuan konstruk, sehingga menjadi variable yang dapat diukur.

### **3.2.1 Penyaluran Kredit.**

Dalam penelitian ini penyaluran kredit diukur dengan melihat total jumlah kredit yang diberikan kepada nasabah bank yang terdaftar di bank umum BEI tahun 2008-2011

### **3.2.2 Dana Pihak Ketiga**

Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal , dana pihak ketiga adalah giro, tabungan dan deposito. dana pihak ketiga di ukur dengan rumus:

$$DPK = \text{tabungan} + \text{giro} + \text{deposito}$$

### 3.2.2 CAR (*Capital Adequacy Ratio*)

Rasio kebutuhan modal bank dihitung dengan cara membandingkan modal sendiri dengan ATMR dengan rumus :

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Sendiri (modal Inti + Modal Pelengkap)}}{\text{ATMR(Neraca Aktiva + Neraca Administrasi)}} \times 100\%$$

(SE BI No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004).

### 3.2.3 NPL (*Non Performing Loan*)

NPL dapat dirumuskan :

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit dalam kualitas kurang lancar, diragukan dan macet}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

(SE BI No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004).

## 3.3. Populasi dan Sampel

### 3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian di tarik kesimpulannya (Sugiyono, 1999). Suranto (1987) berpendapat bahwa, populasi atau *universe* adalah kumpulan yang lengkap mengenai elemen-elemen yang sejenis, tetapi dapat dibedakan karena karakteristiknya. Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti karena itu dipandang sebagai sebuah semesta penelitian (Ferdinand, 2006).

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga (Effendi, 1995:152). Populasi adalah keseluruhan kelompok orang, peristiwa, atau hal yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2006:241). Populasi adalah kumpulan dari semua *element* yang sedang dipelajari, dan yang dari padanya akan diambil kesimpulan tertentu (Santoso, 2003:5). Populasi dalam

penelitian ini adalah Bank umum yang terdaftar di BEI tahun 2008-2011 sebanyak 29 perusahaan.

### 3.3.2 Sampel

Sampel merupakan subset dari populasi dan terdiri dari beberapa anggota populasi. Subset ini diambil karena dalam banyak kasus tidak mungkin meneliti seluruh anggota populasi sehingga dibentuk perwakilan populasi (Ferdinand; 2006). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan bank umum yang terdaftar di BEI. Metode pengumpulan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan pertimbangan perorangan atau pertimbangan peneliti yang ahli dalam mempertimbangkan pengambilan sampel yang diperlukan (Sudjana, 2005:168). Dalam penelitian ini sampel yang digunakan harus sesuai dengan kriteria sebagai berikut :

1. Bank umum yang terdaftar di BEI tahun 2008 sampai dengan 2011
2. Menerbitkan laporan keuangan selama empat tahun berturut-turut yaitu tahun 2008, 2009, 2010, 2011
3. Bank yang mengalami masalah khusus, maka tidak masuk dalam sampel penelitian.

Berdasarkan kriteria di atas, maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 26 perusahaan sebagai berikut.

**Tabel 3.1**  
**Sampel Penelitian**

No	Nama Bank
1	Bank Artha Graha International, Tbk
2	Bank Agroniaga, Tbk
3	Bank Bumi Arta, Tbk
4	Bank Bukopin, Tbk
5	Bank Central Asia, Tbk
6	Bank CIMB Niaga, Tbk
7	Bank Ekonomi Raharja, Tbk

No	Nama Bank
8	Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk
9	Bank International Indonesia, Tbk
10	Bank ICB Bumiputera, Tbk
11	Bank Mega, Tbk
12	Bank Mayapada Inetrnational, Tbk
13	Bank Nusantara Parahyangan, Tbk
14	Bank of India Indonesia, Tbk
15	Bank OCBC NISP, Tbk
16	Bank Panin, Tbk
17	Bank Pundi Indonesia, Tbk
18	Bank Permata, Tbk
19	Bank Danamon Indonesia, Tbk
20	Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk
21	Bank Victoria International, Tbk
22	Bank Windu Kentjana Inetrnational, Tbk
23	Bank Tabungan Negara, Tbk
24	Bank Rakyat Indonesia, Tbk
25	Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
26	Bank Mandiri, Tbk

Sumber : Bank Indonesia 2012

Data panel atau juga disebut *pooling data* adalah gabungan dari data *cross section* (antar individu/ruang) dan data *time series* (antar waktu). Untuk menggambarkan panel data secara singkat, misalkan pada data *cross section*, nilai dari satu variabel atau lebih dikumpulkan untuk beberapa unit sampel pada suatu waktu waktu. Dalam panel data, unit *cross section* yang sama disurvei dalam beberapa waktu (Gujarati, 2009:592-593). Menggunakan pooled data selama 4 tahun dikalikan 26 Bank Umum maka jumlah sampel 104 ini dikarenakan untuk memenuhi sampel agar layak daam penelitian.

Alasan peneliti menggunakan pooled data adalah :

1. Dengan *pooled data* diperoleh variasi antar unit yang berbeda menurut ruang dan variasi yang muncul menurut waktu, sehingga memungkinkan untuk menguraikan, menganalisis dan menguji hipotesis lebih baik.
2. Meningkatkan jumlah observasi (sampel) sehingga dapat mengatasi masalah keterbatasan data runtut waktu yang biasa dijumpai pada penelitian bisnis, pasar modal, perusahaan, akuntansi dan regional.
3. Panel data akan memberikan: data yang lebih informatif, lebih bervariasi, sedikit kolinieritas antar variabel, derajat kebebasan yang lebih serta lebih efisien.
4. Data panel yang lebih baik dapat mendeteksi dan mengukur efek yang tidak bisa diamati dalam antar individu/ruang dan data antar waktu.
5. Data panel dapat memperkaya analisis empiris dengan cara yang mungkin tidak dapat dilakukan jika kita hanya menggunakan data *cross section* (antar individu/ruang) dan data *time series* (antar waktu).

Dengan demikian diperoleh jumlah sampel sebanyak 104 sampel yaitu gabungan dari masa penelitian selama kurun waktu 4 tahun dengan data laporan keuangan tahunan dari 26 perusahaan yang menjadi sampel penelitian.

### **3.4 Metode pengumpulan data**

#### **3.4.1 Dokumentasi**

Metode pengumpulan data adalah yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat dan mengumpulkan dokumen-dokumen serta laporan-laporan pada perusahaan yang berhubungan dengan pokok bahasan dalam penulisan skripsi ini. Adapun dokumen yang dilihat adalah laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan perusahaan yang membahas tentang variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Data-data tersebut diperoleh dari laporan tahunan Bank Indonesia serta Direktori Perbankan Indonesia

#### **3.4.2 Studi Pustaka**

Yaitu teknik yang dilakukan dengan membaca literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Data yang dikumpulkan dengan membaca

majalah dan buku-buku yang ada hubungannya dengan pendidikan. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh sumber informasi berupa data sekunder yaitu majalah infobank, internet dan berbagai literatur lainnya. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh para peneliti, data yang diterbitkan dalam jurnal statistik dan lainnya, dan informasi yang tersedia dari sumber publikasi atau nonpublikasi entah didalam atau diluar organisasi, semua yang dapat berguna bagi peneliti (Sekaran, 2006:245).

### **3.5 Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan *skewness* (kemencengan distribusi). (Ghozali, 2001:19).

### **3.6 Uji Asumsi Klasik**

Pengujian analisis regresi berganda dalam menguji hipotesis haruslah menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan asumsi klasik yaitu Uji Normalitas, Mutikolinieritas, Heterokodastisitas dan Autokorelasi yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **3.6.1 Uji Normalitas Data**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi, variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak (Ghozali, 2011:160). Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik dengan analisis grafik. Analisis grafik salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun demikian hanya dengan melihat histogram hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal, di distribusi normal. Namun demikian hanya dengan melihat histogram hal ini dapat menyesatkan

khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal, dengan distribusi normal. Namun demikian hanya dengan melihat histogram hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Pada prinsipnya normalisasi dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan :

Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalisasi (Ghozali, 2011:163).

### 3.6.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2011:105). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasinya antara sesama variabel independen sama dengan nol. *Tolerance* mengukur variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan variabel bebas lainnya. Nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena  $VIF = 1/Tolerance$ ). Nilai yang umum digunakan untuk memperlihatkan adanya



multikolinearitas adalah nilai *tolerance*  $< 0,10$  atau sama dengan nilai *VIF*  $> 10$  (Ghozali, 2011:106).

### 3.6.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2011:139). Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Menurut Ghozali (2011:139) cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen, dasar analisisnya adalah :

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 3.6.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (Ghozali, 2011:110). Jika terjadi korelasi maka disebut ada masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mengetahui adanya autokorelasi dapat digunakan beberapa cara, salah satunya yaitu uji *Durbin Watson*. Nilai uji *Durbin Watson* dapat dilihat dengan ketentuan sebagai berikut :

$H_0$  = tidak ada autokorelasi baik positif maupun negatif

$H_a$  = ada autokorelasi baik positif maupun negatif

Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Autokorelasi bila dalam DW (Uji Durbin – Watson) terletak antara batas atas atau *upper bound* ( $du$ ) dan  $(4-du)$ , maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak autokorelasi.
- b. Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau *lower bound* ( $dl$ ), maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada autokorelasi positif.
- c. Bila nilai DW lebih besar daripada  $(4-dl)$ , maka koefisien autokorelasi lebih kecil daripada nol, berarti ada korelasi negatif. Bila nilai DW terletak diantara batas atas ( $du$ ) dan batas bawah ( $dl$ ) atau DW terletak antara  $(4-dl)$ , maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

### 3.7 Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan sebuah variabel dependen dengan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linier berganda merupakan suatu metode statistik umum yang digunakan untuk meneliti hubungan antara sebuah variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Tujuan analisis regresi berganda adalah menggunakan nilai-nilai variabel independen yang diketahui untuk meramalkan nilai variabel dependen (Sulaiman, 2004:79).

Dalam penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda. Hal ini disebabkan penelitian ini dirancang untuk mengetahui pengaruh, arah dan kekuatan hubungan dari variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 \text{DPK} + b_2 \text{CAR} + b_3 \text{NPL}$$

Dengan :

Y = Penyaluran kredit

a = konstanta regresi

$b_1, b_2, b_3$  = koefisien regresi

DPK = dana pihak ketiga

CAR = *capital adequacy ratio*

NPL = *non performing loan*

### 3.8 Pengujian Hipotesis (Pengaruh Secara Parsial)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011:98). Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Langkah-langkah dalam melakukan uji t adalah sebagai berikut:

1. Hubungan positif pengaruh DPK dan CAR terhadap penyaluran kredit

Langkah-langkah dalam melakukan uji t adalah sebagai berikut:

1. Perumusan hipotesis

Ho1:  $\beta < 0$  Tidak ada pengaruh positif variabel  $X_1$  (DPK) terhadap variabel Y (penyaluran kredit).

Ha1 :  $\beta > 0$  Ada pengaruh positif variabel  $X_1$  (DPK) terhadap variabel Y (penyaluran kredit).

Ho2 :  $\beta < 0$  Tidak ada pengaruh positif variabel  $X_2$  (CAR) terhadap variabel Y (penyaluran kredit).

Ha2 :  $\beta > 0$  Ada pengaruh positif variabel  $X_2$  (CAR) terhadap variabel Y (penyaluran kredit).

2. Tingkat kepercayaan yang digunakan 95% atau taraf signifikan ( $\alpha$ ) yang digunakan adalah 5%.

3. Menentukan kriteria pengujian (daerah diterima dan ditolak) :

a. Apabila nilai  $p\text{ value} < \alpha$  maka mampu menolak Ho atau dengan kata lain hipotesis alternatif diterima, artinya terdapat pengaruh antara variabel independen ( $X_1, X_2$ ) secara individual dengan variabel dependen (Y).

b. Apabila nilai  $p\text{ value} > \alpha$  maka mampu tidak mampu menolak Ho atau dengan kata lain hipotesis alternatif ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel independen ( $X_1, X_2$ ) secara individual dengan variabel dependen (Y).

4. Hubungan negatif pengaruh pertumbuhan NPL penyaluran kredit

Langkah-langkah dalam melakukan uji t adalah sebagai berikut:

1. Perumusan hipotesis

$H_0 : \beta > 0$  Tidak ada pengaruh negatif variabel  $X_3$  (NPL) terhadap variabel Y (penyaluran kredit).

$H_a : \beta < 0$  Ada pengaruh negatif variabel  $X_3$  (NPL) terhadap variabel Y (penyaluran kredit).

2. Tingkat kepercayaan yang digunakan 95% atau taraf signifikan ( $\alpha$ ) yang digunakan adalah 5%.

3. Menentukan kriteria pengujian (daerah diterima dan ditolak) :

a. Apabila nilai  $p \text{ value} < \alpha$  maka mampu menolak  $H_0$  atau dengan kata lain hipotesis alternatif diterima, artinya terdapat pengaruh antara variabel independen ( $X_3$ ) secara individual dengan variabel dependen (Y).

b. Apabila nilai  $p \text{ value} > \alpha$  maka mampu tidak mampu menolak  $H_0$  atau dengan kata lain hipotesis alternatif ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel independen ( $X_3, X_4$ ) secara individual dengan variabel dependen (Y).

### 3.9 Uji Kelaikan Model

#### a. Uji F (Pengujian secara simultan)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011:98). Uji F untuk menguji kebaikan model regresi yang digunakan, maksudnya untuk menguji seberapa baik data sampel suatu penelitian *fit* dengan model regresi yang diajukan dalam penelitian tersebut. Jika model regresi cukup *fit* berarti pengujian dapat dilakukan ke tahap uji t. Langkah-langkah dalam melakukan uji F adalah sebagai berikut :

1. Menentukan formulasi hipotesis statistik dan hipotesis alternatif.

$H_0 : b_1 = b_2 = b_3 = 0$ , artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel independen secara bersama-sama dengan variabel dependen.

$H_{a1} : b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq 0$ , artinya terdapat pengaruh antara variabel independen secara bersama-sama dengan variabel dependen.

2. Menentukan taraf signifikansi ( $\alpha = 0,05$ ).
3. Menentukan kriteria pengujian ( daerah diterima dan ditolak ) :

Bila taraf signifikansi observasi lebih kecil 0,05 maka hipotesis alternatif dapat diterima, artinya variabel independen memiliki pengaruh signifikansi terhadap variabel dependen. Bila taraf signifikansi observasi lebih besar 0,05 maka hipotesis alternatif tidak dapat diterima, artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikansi terhadap variabel dependen.

**b. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011:97). Dengan kata lain, koefisien determinasi ( $R^2$ ) akan menggambarkan besarnya kontribusi variabel-variabel independen terhadap variasi variabel dependen dalam kaitannya dengan persamaan regresi yang dihasilkan.

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Jika  $R^2$  yang diperoleh dari hasil perhitungan menunjukkan semakin besar (mendekati satu), maka dapat dikatakan bahwa sumbangan dari variabel independen terhadap variabel dependen semakin besar. Hal ini berarti model yang digunakan semakin besar untuk menerangkan variabel terikatnya.

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka  $R^2$  meningkat, tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Penggunaan nilai *Adjusted  $R^2$*  (*Adjusted R Square*) dipakai pada saat mengevaluasi model regresi mana yang terbaik.

Tidak seperti  $R^2$ , nilai Adjusted  $R^2$  dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model (Ghozali, 2011:97). Rumus koefisien determinasi =  $R^2 \cdot 100\%$ . Jika dalam uji empiris didapat nilai Adjusted  $R^2$  negatif, maka nilai Adjusted  $R^2$  dianggap bernilai nol. Secara matematis jika nilai  $R^2 = 1$ , maka Adjusted  $R^2 = R^2 = 1$  sedangkan jika nilai  $R^2 = 0$ , maka Adjusted  $R^2 = (1-k) / (n-k)$ . Jika  $k > 1$ , maka Adjusted  $R^2$  akan bernilai negatif.

STIE BPD Jateng

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan perbankan swasta *Go Public* di Indonesia tahun 2008-2011. Berikut ini adalah perbankan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.

##### 1. Bank Artha Graha International, Tbk

Bank Artha Graha Internasional merupakan peralihan dari Bank Inter Pacific, Tbk. Peralihan ini dilakukan pada tanggal 24 Februari 1993. Bank terdaftar di BEI pada bulan Agustus 1990. Saham terbesar dimiliki oleh PT. Cenara Arthaputra sebesar 31,74 %, sedangkan saham yang dimiliki oleh publik sebesar 2,22%. Kantor pusat dari Bank Artha Graha adalah Artha Graha Building, Sudirman *Central Business District*, JL. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta dengan status sebagai bank PMDN. Berdasarkan persetujuan Ketua Badan Pelaksana dan Pengawas Pasar Modal Nomor SI-124/SHM/MK.10/1990 tanggal 10 Juli 1990, PT Inter-Pacific Financial Corporation melakukan Penawaran Umum Perdana dan mencatatkan 5.000.000 lembar sahamnya dengan nilai nominal Rp1.000 per lembar saham, yang merupakan 20% dari modal yang ditempatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.

Penawaran Umum Perdana ini telah mendapatkan pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal atau “Bapepam” (sekarang Bapepam dan LK) No. 1432/PN/1990 tanggal 10 September 1990. Berhubung tidak ada transaksi saham bank di Bursa Efek Surabaya dan untuk melakukan penghematan, pada tanggal 9 April 1999 Bank mengajukan permohonan pembatalan pencatatan (*delisting*) di Bursa Efek Surabaya. Dan pada tanggal 19 April 1999, Direksi Bursa Efek Surabaya memberikan persetujuan atas permohonan pembatalan pencatatan (*delisting*) saham-saham bank pada Bursa Efek Surabaya. Pada tanggal 14 April 2005, PT Bank Inter-Pacific, Tbk., telah menandatangani Akta Penggabungan Nomor 17, dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris

di Jakarta, dimana PT Bank Artha Graha menggabungkan diri ke dalam PT Bank Inter-Pacific, Tbk. Penggabungan tersebut berlaku efektif pada tanggal 11 Juli 2005, yang sebelumnya telah mendapat izin dari Bank Indonesia dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 7/32/KEP.GBI/2005 tanggal 15 Juni 2005.

2. Bank Agroniaga, Tbk

PT Bank Agroniaga, Tbk ("Bank") didirikan dengan akta No. 27 Notaris Raden Soekarsono, SH tanggal 27 September 1989. Anggaran dasar Bank telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C.2-10019.HT.01.01-TH.89 tanggal 28 Oktober 1989 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 Tambahan No. 3303 tanggal 1 Desember 1989. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan kegiatan umum di bidang perbankan.

Pada tanggal 9 Oktober 2003, Bank menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Umum Terbatas I kepada Ketua Bapepam dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak 305.867.338 (tiga ratus lima juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh delapan) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) per sahamnya. Pada tanggal 7 November 2003, Ketua Bapepam melalui suratnya No. S-2718/PM/2003 memberitahukan efektifnya Terbatas I tersebut. Dari Penawaran Umum terbatas ini, Bank telah meningkatkan jumlah sahamnya sebanyak 305.867.338 (tiga ratus lima juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh delapan) saham.

3. Bank Bumi Artha, Tbk

P.T. Bank Bumi Arta Tbk (Bank), didirikan berdasarkan akta No. 4 tanggal 3 Maret 1967 yang dibuat dihadapan Soeleman Ardjasmita, notaris di Jakarta. Anggaran dasar Bank telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. J.A.5/25/6 tertanggal 25 April 1967 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 23 Mei 1967 Tambahan No. 87. Berdasarkan



Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep-436/DJM/III.3/9/1976 tanggal 18 September 1976, Bank menggabungkan usahanya (merger) dengan PT Bank Duta Nusantara sesuai dengan anjuran pemerintah untuk memperluas jaringan operasional perbankan dan meningkatkan struktur permodalan.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Bank, ruang lingkup kegiatan Bank adalah melakukan usaha di bidang perbankan dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku. Kantor pusat Bank beralamat di Jl. Wahid Hasyim No. 234, Jakarta. Bank memiliki 9 kantor cabang, 19 kantor cabang pembantu, 10 kantor kas dan 38 payment points yang seluruhnya berlokasi di Indonesia.

Pada tanggal 18 Mei 2006, Bank telah memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) melalui suratnya No. S-49/BL/2006 untuk melakukan penawaran umum perdana atas 210.000.000 lembar saham Bank kepada masyarakat. Nilai nominal per saham Rp 100 dengan harga penawaran sebesar Rp 160 per saham.

#### 4. Bank Bukopin, Tbk

PT. Bukopin, Tbk didirikan di Republik Indonesia tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia. Menurut anggaran dasar, usaha bank mencakup segala kegiatan bank umum sebagaimana dimaksudkan dalam undang Perbankan dengan tujuan utama memperhatikan dan melayani kepentingan gerakan koperasi di Indonesia.

Kantor pusat bank beralamat di jalan Haryono Kav. 50-51 Jakarta 12770 Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2010, bank memiliki kantor cabang Syariah 36, kantor cabang pembantu 85, kantor fungsional 84, dan kantor kas 137.

Pada tanggal 30 juni 2003, bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) melalui suratnya No. S-1564/PM/2003 untuk melakukan penawaran umum obligasi sebesar Rp. 600.000.000.000 (nilai penuh) yang terdiri dari

obligasi seri A Bank Bukopin II tahun 2003 sebesar Rp. 45.000.000.000 (nilai penuh). Obligasi seri A Bank Bukopin II tahun 2003 dan obligasi subordinasi seri B Bank Bukopin tahun 2003 ditawarkan dengan nilai 100 % dari jumlah obligasi syariah.

5. Bank Central Asia, Tbk

Bank Central Asia berdiri pada tanggal 21 februari 1957. Perusahaan terdaftar pada tahun 1998 dengan kepemilikan saham terbesar adalah Farindo *Investment* (Mauritius) Ltd, yaitu sebesar 51,15 %, sedangkan saham yang dimiliki oleh publik sebesar 46,72%. Kantor pusat di Wisma BCA lantai 12 Jl. Jendral Sudirman Kav. 22-23 Jakarta, dengan status sebagai bank PMDN.

Berdasarkan suart Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. S-103/PM/2000 tanggal 11 Mei 2000, bank menawarkan 662.400.000 saham melalui Penawaran Umum Perdana dengan jumlah nilai nominal Rp. 331.200 (harga penawaran Rp. 1.400 (nilai penuh) eprsaham), yang merupakan 22 % dari modal saham yang ditempatkan dan disetor, sebagai bagian dari divestasi pemilihan saham Republik Indonesia yang diwakili oleh BPPN. Penawaran umum ini dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya tanggal 31 Mei 2000.

6. Bank CIMB Niaga, Tbk

PT Bank CIMB Niaga Tbk (“Bank CIMB Niaga”) didirikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 90 yang dibuat di hadapan Raden Meester Soewandi, Notaris di Jakarta tanggal 26 September 1955 dan diubah dengan akta dari notaris yang sama No. 9 tanggal 4 Nopember 1955. Akta-akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) dengan surat keputusan No. J.A.5/110/15 tanggal 1 Desember 1955 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 71 tanggal 4 September 1956, Tambahan Berita Negara No. 729/1956.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Bank CIMB Niaga, ruang lingkup kegiatan Bank CIMB Niaga adalah melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan melakukan

kegiatan perbankan lainnya berdasarkan prinsip Syariah. Bank CIMB Niaga mulai melakukan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip Syariah pada tanggal 27 September 2004.

7. Bank Ekonomi Raharja, Tbk

Bank Ekonomi Raharja didirikan pada tanggal 15 Mei 1989. bank mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 8 Maret 1990, sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar bank, maksud dan tujuan didirikannya bank adalah : menjalankan usaha dibidang bank umum, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, bank dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain menghimpun dana dari masyarakat, memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan hutang, membeli, menjual atau menjaminkan kepentingan atas perintah nasabah.

Perusahaan melakukan penawaran umum saham perdana pada tanggal 28 Desember 2007 atas 270.000.000 lembar saham bank dengan nilai nominal Rp. 100 (dalam rupiah penuh) per saham dan harga penawaran saham sebesar Rp. 1.080 (dalam rupiah penuh) per saham.

8. Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk

PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk ("Bank") didirikan berdasarkan akta notaris Noezar, SH, Notaris di Bandung No. 30 tanggal 15 Juni 1974. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/224/3 tanggal 30 Juni 1975 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bandung No. 132/1975 tanggal 17 Juli 1975 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 448 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 69 tanggal 29 Agustus 1975.

Pada tanggal 4 Desember 2006, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK") melalui surat No. S-3065/BL/2006 untuk melakukan penawaran umum saham perdana atas 1.500.000.000 saham Bank dengan nilai nominal Rp 100 per saham dengan harga penawaran saham sebesar Rp 115 per saham. Pada tanggal 15 Desember 2006 saham tersebut telah

dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta) dengan Surat Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. S-1192/BEJ-PSJ/12-2006 tanggal 12 Desember 2006.

9. Bank International Indonesia, Tbk

Bank Internasional Indonesia berdiri pada 15 Mei tahun 1959. Perusahaan terdaftar di BEI pada tahun 1988 dengan visinya "*Indonesian' Best bank, Providing World Class Standards of Customer Service & Product Innovation*". Saham terbesar dimiliki oleh Sorak Financial Holding Pte.Ltd sebesar 56,33 %, sedangkan saham yang dimiliki oleh publik sebesar 37,58 %. Kantor pusat Bank International Indonesia terletak di Plaza BII-Tower II, Jl. MH. Thamrin No. 51 Jakarta dengan status sebagai bank PMDN.

Pada bulan Oktober 1989 bank menjual 12 juta lembar saham seri A dengan nilai nominal Rp. 1.000 (nilai penuh) per saham kepada masyarakat melalui pasar modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal yang ebrlaku. Penjualan saham Seri A kepada masyarakat ini telah memperoleh pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) melalui suratnya No. SI-058/ SHM/MK.10/189 tanggal 2 Oktober 1989.

10. Bank ICB Bumiputera, Tbk

Bank Bumiputera Indonesia berdiri pada 31 Juli 1989 dan mulai beroperasi pada 4 Januari 1990. Perusahaan terdaftar di BEI pada tahun 1997 dengan saham terbesar dimiliki Che Abdul Daim Bin Haji Zainuddin dengan prosentase saham sebesar 67,07 % dan saham publik sebesar 26,95 %. Kantor pusat berada Wisma Bumiputera lantai 14 Jl. Jendral Sudirman Kav. 75 Jakarta, dengan status sebagai bank PMDN

Pada tanggal 27 Juni 2002, bank memperoleh pernyataan efektif dari ketua BAPEPAM dengan suratnya No. S-1402/PM/2002 untuk melakukan penawaran umum atas 500.000.000 saham Bank kepada masyarakat. Nilai nominal per saham adalah Rp. 100 dan harga penawaran adalah sebesar Rp. 120 per saham. Pada tanggal 15 Juli 2002, saham bank telah dicatatkan dalam Bursa Efek Indonesia.

#### 11. Bank Mega, Tbk

Bank Mega berdiri di Surabaya Jawa Timur, pada tahun 1969. Perusahaan terdaftar di BEI pada 21 Januari 2000 dengan jumlah saham terbesar adalah PT. Para Global Investindo, yaitu sebesar 52,50 %, sedangkan saham yang dimiliki oleh publik sebesar 47,80 %. Kantor pusat di Menara Bank Mega, Jl. Kapten Tendean No. 12-14 A Jakarta, dengan status PMDN. Pada tahun 2000 melakukan perubahan nama dari PT. Mega Bank menjadi PT. Bank Mega. Dalam rangka memperkuat struktur permodalan maka pada tahun yang sama PT. Bank Mega melaksanakan Initial Public Offering dengan menawarkan saham kepada masyarakat, dengan demikian sebagian saham PT. Bank Mega dimiliki oleh publik dan berubah namanya menjadi PT. Bank Mega Tbk. Saat ini PT. Bank Mega Tbk telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia sebagai bank devisa sehingga memungkinkan memperluas dan menjangkau bisnis yang lebih luas lagi.

Sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 17 Januari 2000, yang diaktakan dengan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., No. 9, Bank telah melakukan penawaran umum saham perdana kepada masyarakat sebanyak 112.500.000 saham dengan nilai nominal Rp 500 (Rupiah penuh) per saham dan harga penawaran Rp 1.200 (Rupiah penuh) per saham. Pada tanggal 15 Maret 2000, sesuai dengan surat Ketua BAPEPAM-LK No. S-493/PM/2000, Pernyataan Pendaftaran Bank untuk menawarkan saham kepada masyarakat di Indonesia menjadi efektif dan pada tanggal 17 April 2000 saham-saham yang ditawarkan tersebut dicatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

#### 12. Bank Mayapada International, Tbk

Bank Mayapada berdiri di Jakarta pada tahun 1989 dengan nama PT. Bank Mayapada International. Bank Mayapada menjadi bank komersial dengan surat keputusan Menteri Keuangan No. 342/KMK/013/1990 tanggal 16 Maret 1990. Tiga tahun kemudian bank Mayapada membuka cabang di Surabaya, Semarang, Solo dan Denpasar. Bank Mayapada terdaftar di BEI

pada tanggal 3 Juni 1993, dengan kantor pusat di Mayapada Tower lantai 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 28 Jakarta dengan status sebagai PMDN. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, Bank memiliki 1 kantor pusat , operasional (termasuk kantor pusat) serta 15 kantor cabang, 67 kantor cabang pembantu dan 14 kantor kas.

Pada tanggal 25 Juni 2002, Bank melakukan Penawaran Umum Terbatas III dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Saham Biasa Seri B kepada para pemegang saham sejumlah 765.919.200 Saham Biasa Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp 100 (dalam Rupiah penuh) setelah mendapat Surat Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dari Ketua Bapepam No.S.1382/PM/2002. Dari jumlah penawaran tersebut 650.000.000 saham telah diterbitkan.

### 13. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk

Bank Nusantara Parahyangan berdiri pada Januari 1972 dengan nama PT. Bank Pasar Karya Parahyangan. Pada Maret 1989 berubah nama menjadi PT. Bank Nusantara Parahyangan. Perusahaan terdaftar di BEI pada tahun 2000. Kepemilikan saham terbesar adalah PT. Hermawan Sentral Investama sebesar 14,99 %, dan saham yang dimiliki oleh publik sebesar 55,02 %. Kantor pusat berada di Jl. Ir. Djuanda No. 95 Bandung Jawa Barat, dengan status sebagai bank PMDN. Pada tanggal 17 Desember 2007, kepemilikan mayoritas saham Bank BNP beralih kepada ACOM dan BTMU melalui akuisisi sebesar 75,41 % saham Bank BNP, dimana ACOM menguasai 55,41 % dan MTMU menguasai 20% dari semua saham yang telah dikeluarkan oleh BNP (Bank Nusantara Parahyangan). Saat ini Bank BNP memiliki kantor cabang sebanyak 51 buah yang terdiri dari 10 kantor cabang, 16 kantor cabang pembantu, 3 kantor kas dan 22 service point yang tersebar di Bandung, Cimahi, Bogor, Jakarta, Cirebon, Jatibarang, Semarang, Surabaya dan Denpasar.

Pada tanggal 14 Desember 2000, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (“BAPEPAM”) melalui surat No. S-3663/PM/2000 melakukan Penawaran Umum Perdana atas 50.000.000 Saham

Biasa dengan harga penawaran sebesar Rp 525 setiap saham, dan 20.000.000 Waran Seri I disertai dengan Saham Biasa atas Nama, Waran diberikan secara Cuma-Cuma dan periode pelaksanaan Waran Seri I mulai dari 10 Juli 2001 sampai dengan 09 Januari 2004 dengan harga penawaran sebesar Rp 600 per saham. Pada tanggal 10 Januari 2001 saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta) dengan Surat Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. S-0058/BEJ-EEM/01-2001 tanggal 08 Januari 2001.

14. Bank of India Indonesia, Tbk

PT. Bank Swadesi Tbk. (Bank) didirikan pada tahun 1968 berdasarkan akta No. 20 tanggal 28 September 1968 dari Njoo Sioe Liep, SH, notaris di Surabaya, dengan nama PT. Bank Pasar Swadesi. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan/menyelenggarakan dan mengusahakan kegiatan yang berhubungan dengan perbankan.

Pada tanggal 12 April 2002, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dengan suratnya No. S-75/PM/2002 untuk melakukan penawaran umum atas 60.000.000 saham biasa atas nama kepada masyarakat. Nilai nominal per saham Rp 200 dengan harga penawaran Rp 250. Pada tanggal 1 Mei 2002 saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta.

15. Bank OCBC NISP, Tbk

Bank NISP berdiri pada tahun 4 April 1941 di Bandung Jawa Barat dengan nama *NV. Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank*. Pada tahun 1967 berubah menjadi bank komersial. Bank NISP terdaftar di BEI pada tanggal 20 Oktober tahun 1994. Kepemilikan saham terbesar adalah OCBC Overseas Investment Pte, Ltd 72,35% dan saham yang dimiliki oleh publik sebesar 20,33%. Kantor pusat bank NISP berada di Bank NISP Tower Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25 Jakarta dengan status PMDN.

Pada tanggal 16 September 1994, Bank melakukan Penawaran Umum Perdana atas 62.500.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal per lembar saham Rp 1.000 (nilai penuh) dan harga penawaran sebesar Rp 3.100 (nilai



penuh) per lembar saham. Pada tanggal 20 Oktober 1994, saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta).

#### 16. Bank Panin, Tbk

Bank Pan Indonesia berdiri pada tahun 1971, pada tahun 1972 merger dengan PT. Bank Industri dan Dagang Indonesia, PT. Bank Kemakmuran dan PT. Industri Djaja Indonesia. Pada tahun 2002 perusahaan terdaftar di BEI dengan kepemilikan saham terbesar oleh PT. Panin Life, Tbk sebesar 45,10 %, sedangkan saham yang dimiliki publik sebesar 25,88 %. Kantor pusat berada di Panin Bank Center Building di Jl. Jendral Sudirman Kav. 1 Senayan Jakarta, dengan status sebagai bank PMDN. Bank berkedudukan di Jakarta dengan 43 kantor cabang di Indonesia, 1 kantor perwakilan di Singapura, 1 cabang di Cayman Islands.

Sesuai dengan anggaran dasar Bank, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan usaha bank umum dalam arti kata seluas-luasnya di dalam maupun di luar negeri. Bank mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 18 Agustus 1971, sesuai dengan izin usaha yang diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. KEP-205/DDK/II/8/1971 tanggal 18 Agustus 1971. Sesuai dengan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 5/2-Kep.Dir. tanggal 21 April 1972, Bank telah mendapat persetujuan menjadi bank devisa.

Pada tanggal 28 Oktober 1982, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dengan suratnya No. SI-014/PM/E/1982 untuk melakukan penawaran umum atas 1.637.500 saham Bank kepada masyarakat.

#### 17. Bank Pundi Indonesia, Tbk

PT Bank Pundi Indonesia Tbk (d/h PT Bank Eksekutif Internasional) (“the Bank”), didirikan pada tanggal 11 September 1992. Akta pendirian telah disahkan oleh Menteri Kehakiman tanggal 10 November 1992 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103, Tambahan No. 6651 tanggal 26 Desember 1992. Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Bank, ruang lingkup kegiatan Bank bergerak dalam bidang keuangan dan pembiayaan sesuai



dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pada tanggal 22 Juni 2001, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dengan suratnya No. S-1531/PM/2001 untuk melakukan penawaran umum saham kepada masyarakat sebanyak 277.500.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham dan harga penawaran Rp 140 per saham. Secara bersamaan diterbitkan 55.500.000 Waran Seri I yang menyertai seluruh saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum tersebut secara cuma-cuma. Waran tersebut memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham baru yang dikeluarkan dari portepel dengan nilai nominal Rp 100 per saham dengan harga Rp 175 per saham mulai tanggal 13 Januari 2003 sampai dengan tanggal 12 Juli 2004. Pada tanggal 13 Juli 2001 saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta.

#### 18. Bank Permata, Tbk

Bank Permata berdiri pada 18 Pebruari 2002, yaitu penggabungan dari PT. Bank Bali Tbk, PT. Bank Universal Tbk, PT. Bank Prima Express, PT. Bank Antamedia dan PT. Bank Patriot. Kepemilikan saham terbesar adalah PT. Astra International, Tbk dan PT Standar Chartered Bank, masing-masing sebesar 44,505 %, sedangkan saham oleh publik sebesar 10,99%. Kantor pusat berada di Permata Bank Tower I di Jl. Jend. Sudirman No. 27 Jakarta dengan status sebagai bank PMDN.

Berdasarkan tanggal 15 Januari 1990, berdasarkan izin Menteri Keuangan No. Si-070/SHM/MK 10/1989 tertanggal 2 Desember 1989, saham bank sejumlah 3.999.000 saham dengan jumlah nilai nominal Rp. 3.999, telah ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat dan telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Surabaya (kedua bursa ini telah digabung dan sekarang bernama Bursa efek Indonesia).

#### 19. Bank Danamon Indonesia, Tbk

PT Bank Danamon Indonesia Tbk. didirikan pada 1956. Nama Bank Danamon berasal dari kata “dana moneter” dan pertama kali digunakan pada 1976, ketika perusahaan berubah nama dari Bank Kopra.

Pada 1988, Bank Indonesia meluncurkan paket reformasi perbankan yang dikenal dengan “Paket Oktober 1988” atau PAKTO 88. Tujuan utama PAKTO 88 adalah untuk membangun kompetisi dalam sektor perbankan dengan memberikan kemudahan persyaratan, termasuk liberalisasi peraturan tentang pendirian bank swasta domestik baru dan bank joint-venture. Sebagai hasil dari reformasi ini, Bank Danamon menjadi salah satu bank valuta asing pertama di Indonesia, dan menjadi perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Jakarta.

Saat ini, “Danamon” adalah salah satu institusi keuangan terbesar di Indonesia dari jumlah pegawai – sekitar 61,875 (termasuk karyawan anak perusahaan) pada September 2011 - yang berfokus untuk merealisasikan visinya: “Kita peduli dan membantu jutaan orang mencapai kesejahteraan.”

Sebagai *surviving entity* dari peleburan 9 Bank Taken Over (BTO) pada masa krisis keuangan Asia di akhir 1990-an, Danamon telah bangkit menjadi salah satu bank swasta terbesar dan terkuat di Asia. Didukung oleh lebih dari 50 tahun pengalaman, Danamon terus berupaya untuk memenuhi *brand promise*-nya untuk menjadi bank yang “bisa mewujudkan setiap keinginan nasabah”. Saat ini Danamon adalah bank ke-enam terbesar di Indonesia berdasarkan aset, dengan jaringan cabang kedua terbesar yaitu lebih dari 2,900 kantor cabang dan *point of sales*, termasuk unit Danamon Simpan Pinjam (DSP) dan unit Syariah, serta kantor-kantor cabang anak perusahaannya. Danamon juga didukung oleh serangkaian fasilitas perbankan elektronik yang komprehensif.

#### 20. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. (“Bank”) didirikan berdasarkan akta notaris No.31 tanggal 16 Februari 1985 dari Notaris Komar Andasmita, S.H.. Akta ini telah diubah dengan akta notaris No. 12 tanggal

13 Juli 1985 dari Notaris Dedeh Ramdah Sukarna,S.H.. Anggaran Dasar telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat No. C-2-4583-HT.01-01 TH.85 tanggal 25 Juli 1985, dan diumumkan dalam Tambahan No. 1148 Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 20 September 1985.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank, maksud dan tujuan serta kegiatan Bank adalah melakukan kegiatan usaha di bidang bank umum termasuk kegiatan perbankan yang melaksanakan usaha syariah sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kantor pusat Bank bertempat kedudukan di Jakarta Selatan beralamat di Menara Cyber 2, Lantai 24 dan 25 Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Jakarta Selatan.

Bank memperoleh pernyataan efektif dari ketua BAPEPAM-LK melalui surat No. S-1253/BL/2008 perihal pemberitahuan Efektif Penyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk pada tanggal 29 februari 2008, bank melakukan Pnawaran Umum sebesar 267.960.220 saham biasa atas nama Negara Republik Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp. 100 (nilai penuh) per saham dan harga pnawaran sebesar Rp. 2.850 (nilai penuh) setiap saham kepada masyarakat di Indonesia.

#### 21. Bank Victoria International, Tbk

PT. Bank Victoria International Tbk (“Bank”) didirikan pada tanggal 28 Oktober 1992 berdasarkan Akta Notaris A. Partomuan Pohan, SH, LLM, No. 71 yang selanjutnya diadakan pembetulan dengan Akta No. 30 tanggal 8 Juni 1993 dari notaris yang sama. Akta pendirian tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-4903.HT.01.01.TH 93 tanggal 19 Juni 1993 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39, Tambahan No. 2602 tanggal 15 Mei 1998.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan usaha sebagai bank umum dalam arti kata seluas-luasnya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Bank merupakan bank non devisa.

Pada tanggal 26 Juni 2008, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam) dengan suratnya No. S-4114/BL/2008 untuk melakukan penawaran umum kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 1.240.205.876 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100 dan harga penawaran Rp 100 per saham dan sebanyak-banyaknya 669.711.173 Waran Seri V yang menyertai Saham Biasa Atas Nama melalui pasar modal sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal 11 Juli 2008 saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta). Setiap pemegang 100 saham lama berhak membeli 100 saham baru dengan harga penawaran sebesar Rp 100 per saham dan setiap pemegang 100 saham baru memperoleh 54 Waran Seri V dimana setiap pemegang 1 Waran Seri V berhak membeli 1 saham Perusahaan dengan pelaksanaan sebesar Rp 100 per saham.

22. Bank Windu Kentjana Inetrnational, Tbk

PT Bank Windu Kentjana International Tbk (atau selanjutnya disebut “Perusahaan”) didirikan dengan nama PT Bank Multicor, pada tanggal 2 April 1974 berdasarkan Akta No. 4 dari Bagijo, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. Y.A. 5/369/19 tanggal 12 Oktober 1974 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 93 tanggal 19 November 1974, Tambahan No. 719. Pada tahun 2007, berdasarkan Akta No. 172 tanggal 28 November 2007, dibuat dihadapan Eliwaty Tjitra, S.H., notaris di Jakarta, yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 58 tanggal 18 Juli 2008 tambahan No. 12219, nama Perusahaan diubah menjadi PT Bank Windu Kentjana International Tbk.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah menjalankan kegiatan umum perbankan. Perusahaan telah beroperasi secara komersial sejak tahun 1974. Perusahaan adalah sebuah bank devisa nasional.

Pada tanggal 20 Juni 2007, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-

LK) melalui surat No. S-3023/BL/2007 untuk penawaran umum perdana atas 300.000.000 saham Perusahaan dengan nilai nominal Rp 100 per saham pada harga penawaran Rp 200 per saham. Saham-saham Perusahaan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 Juli 2007.

### 23. Bank Tabungan Negara, Tbk

Sejarah berdirinya Bank Tabungan Negara di mulai pada tahun 1897 lebih tepatnya pada tanggal 18 Oktober 1897 berdasarkan koninklijk Besluit No. 1V di sana di tegaskan bahwa di Hindia Belanda didirikan postpaarbank yang berpusat di Batavia. Postpaarbank telah membuka kantor cabang antara tahun 1928 sampai dengan tahun 1934, empat kantor cabang pertama yang didirikan di Indonesia antara lain di Huruf Besar pada tahun 1928, Surabaya pada tahun 1931, Jakarta dan Medan pada tahun 1934. Pada tahun 1934 mulai Gandeng pula sebagai mesin-mesin akuntansi dan pengenalan Sertifikat Current Account. pada tahun 1945 kekuasaan Besar di ambil alih oleh Jepang dan hal ini sangat berpengaruh bagi dunia perbankan saat itu sebab postpaarbank di bekukan dan diganti dengan Tyokin Kyoku tepatnya pada tanggal 1 April 1942.

Pada tahun 1974, pemerintah menetapkan kebijakan pembangunan untuk masyarakat menengah kebawah. Untuk menunjang berhasilnya kebijakan tersebut, BTN ditunjuk sebagai wadah pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. B/49/MK/IV/ 1974 tanggal 29 Januari 1974. Sejak resmi tahun 1950 sampai sekarang BTN telah menggeluti bidannya selama 48 tahun. Sebagai rentetan diberlakuakannya UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, untuk hukum BTN berubah menjadi perusahaan perseorangan atau yang lebih dikenal dengan sebutan PT. Bank Tabungan Negara (persero). Pendirian PT. BTN (Persero). Pendirian PT. BTN (Persero) didasarkan pada akta pendirian No. 136 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salam, SH Notaris Jakarta. Perubahan ini menjadikan PT. BTN (Persero) lebih leluasa. Kalau sebelumnya lebih ditekankan sebagai Bank Tabungan dan lembaga

pembayaran perubahan, maka sejak 11 Agustus 1992 bidang kegiatannya diperluas menjadi bank umum.

#### 24. Bank Rakyat Indonesia, Tbk

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau "Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto", suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

#### 25. Bank Negara Indonesia, Tbk

Berdiri sejak 1946, BNI yang dahulu dikenal sebagai Bank Negara Indonesia, merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Bank Negara Indonesia mulai mengedarkan alat pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia, yakni ORI atau Oeang Republik Indonesia, pada malam menjelang tanggal 30 Oktober 1946, hanya beberapa bulan sejak pembentukannya. Hingga kini, tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Keuangan Nasional, sementara hari pendiriannya yang jatuh pada tanggal 5 Juli ditetapkan sebagai Hari Bank

Nasional. Menyusul penunjukan De Javasche Bank yang merupakan warisan dari Pemerintah Belanda sebagai Bank Sentral pada tahun 1949, Pemerintah membatasi peranan Bank Negara Indonesia sebagai bank sirkulasi atau bank sentral. Bank Negara Indonesia lalu ditetapkan sebagai bank pembangunan, dan kemudian diberikan hak untuk bertindak sebagai bank devisa, dengan akses langsung untuk transaksi luar negeri.

Sehubungan dengan penambahan modal pada tahun 1955, status Bank Negara Indonesia diubah menjadi bank komersial milik pemerintah. Perubahan ini melandasi pelayanan yang lebih baik dan tuas bagi sektor usaha nasional. Sejalan dengan keputusan penggunaan tahun pendirian sebagai bagian dari identitas perusahaan, nama Bank Negara Indonesia 1946 resmi digunakan mulai akhir tahun 1968. Perubahan ini menjadikan Bank Negara Indonesia lebih dikenal sebagai 'BNI 46'.

Penggunaan nama panggilan yang lebih mudah diingat - 'Bank BNI' - ditetapkan bersamaan dengan perubahan identitas perusahaan tahun 1988. Tahun 1992, status hukum dan nama BNI berubah menjadi PT Bank Negara Indonesia (Persero), sementara keputusan untuk menjadi perusahaan publik diwujudkan melalui penawaran saham perdana di pasar modal pada tahun 1996. Kemampuan BNI untuk beradaptasi terhadap perubahan dan kemajuan lingkungan, sosial-budaya serta teknologi dicerminkan melalui penyempurnaan identitas perusahaan yang berkelanjutan dari masa ke masa. Hal ini juga menegaskan dedikasi dan komitmen BNI terhadap perbaikan kualitas kinerja secara terus-menerus.

#### 26. Bank Mandiri, Tbk

Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998, sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia -- dilebur menjadi Bank Mandiri, dimana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan hari ini, Bank Mandiri

meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia.

Bank Mandiri melaksanakan proses konsolidasi secara menyeluruh. menutup 194 kantor cabang yang saling berdekatan dan rasionalisasi jumlah karyawan dari jumlah gabungan 26.600 menjadi 17.620. Brand Bank Mandiri diimplementasikan ke semua jaringan dan seluruh kegiatan periklanan dan promosi lainnya. Salah satu prestasi Bank Mandiri yang paling signifikan adalah dengan mengganti platform teknologinya secara menyeluruh. Bank Mandiri mewarisi total *9core banking system* yang berbeda dari 4 bank pendahulunya. Bank Mandiri segera berinvestasi untuk mengkonsolidasikan sistem-sistem dari platform yang terkuat.

## 4.2 Analisis Hasil Penelitian

### 4.2.1 Statistik Deskriptif

Sebagai bentuk upaya untuk memberikan tinjauan awal terhadap data penelitian, berikut ini akan disajikan statistik deskriptif untuk tiap-tiap variabel. Variabel dalam penelitian ini dapat dideskripsikan dengan menggunakan statistik deskriptif yaitu dengan nilai minimum, maksimum, *mean* (rata-rata), dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Adapun statistik deskriptif dari masing-masing variabel selengkapnya dapat dilihat di dalam tabel 4.1 dibawah ini :

**Tabel 4.1**

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean
PENYALURAN KREDIT	104	612751.00	298988258.00	45853100.31
DPK	104	931211.00	384728603.00	64014945.54
CAR	104	8.02	41.42	17.08
NPL	104	.07	18.39	2.05
Valid N (listwise)	104			

Sumber : Data Sekunder yang telah diolah



Pada tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 104 sampel data. Menjelaskan penyaluran kredit dari perbankan yang dijadikan sampel adalah memiliki nilai minimum sebesar Rp 612.751 juta yang dimiliki oleh Bank Pundi Indonesia, Tbk pada tahun 2010 dan penyaluran kredit maksimum sebesar Rp 298.988.258 juta yang dimiliki oleh Bank Mandiri Tbk pada tahun 2011. Kesenjangan antara nilai minimum dan nilai maksimum sangat bervariasi. Nilai rata-rata yang diperoleh sebesar Rp 45.853.100,31 juta.

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa dana pihak ketiga perbankan yang dijadikan sampel memiliki nilai minimum sebesar Rp 931.211 juta yang dimiliki oleh Bank Pundi Indonesia Tbk tahun 2010 dan dana pihak ketiga maksimum adalah sebesar Rp 384.728.603 juta yang dimiliki oleh Bank Mandiri Tbk tahun 2011, kesenjangan antara nilai maksimum dan minimum sangat bervariasi. Nilai rata-rata dari dana pihak ketiga adalah sebesar Rp 64.014.945 juta.

Pada tabel 4.1 terlihat bahwa variabel CAR memiliki nilai terkecil sebesar 8.02 persen yang terjadi pada Bank Pundi Indonesia Tbk pada tahun 2009. Nilai terbesar terjadi pada Bank Pundi Indonesia tahun 2010 sebesar 41.42 persen. Nilai rata-rata dari CAR adalah 17.08 persen. Nilai rata-rata CAR sebesar 17.08 persen, dapat diartikan bahwa kemampuan bank menutupi penurunan aktiva akibat terjadinya kerugian-kerugian atas aktiva bank dengan menggunakan modal sendiri modal bank adalah sebesar 17.08 persen. Berdasarkan ketetapan Direktur Bank Indonesia per 31 Desember 2001 peraturan Bank Indonesia yang mengharuskan bank-bank memiliki rasio kecukupan modal (CAR) minimal 8, maka sampel dalam penelitian ini rata-rata CARnya memenuhi ketentuan dari BI.

Pada variabel NPL mempunyai nilai terkecil sebesar 0.07 persen yang terjadi pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk tahun 2009. Nilai terbesar terjadi pada Bank Pundi Indonesia Tbk pada tahun 2009 sebesar 18.39 persen. Kesenjangan antara nilai minimum dan maksimum sangat bervariasi. nilai rata-rata dari NPL sebesar 2.05 persen. Bank pundi memiliki CAR terbesar pada tahun

2010 dan NPL terbesar pada tahun 2010 dikarenakan fokus utama dalam penyaluran kredit bank pundi indonesia tbk, pada kredit mikro masyarakat, sedangkan risiko kredit yang terbesar pada kredit mikro masyarakat.

### 4.3 Pengujian Asumsi Klasik

Berikut akan disajikan hasil pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Pengujian asumsi klasik didalam regresi berganda bertujuan mengetahui hubungan antara variabel bebas yang digunakan dalam penelitian.

#### 4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghocali, 2011;160). Ada dua cara mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Hasil pengujian normalitas pada tabel 4.2 sebagai berikut :

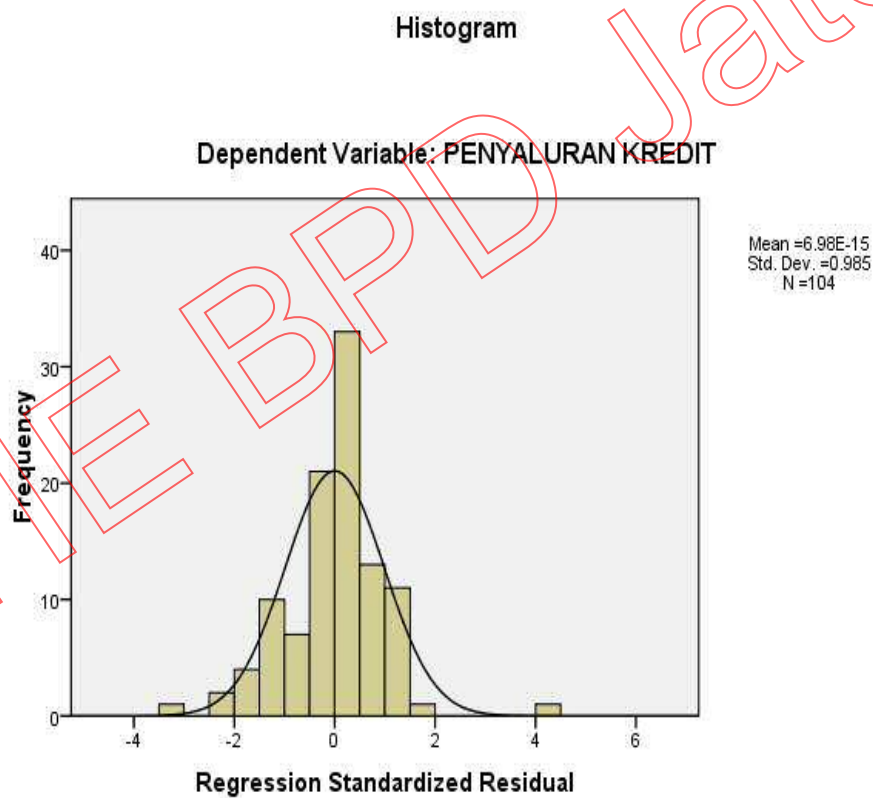
**Tabel 4.2**  
**Normalitas Data**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		104
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.23020729
Most Extreme Differences	Absolute	.123
	Positive	.066
	Negative	-.123
Kolmogorov-Smirnov Z		1.258
Asymp. Sig. (2-tailed)		.085
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data		

Sumber : Data Sekunder yang Telah diolah

Dari hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa data telah terdistribusi secara normal. Hal ini ditunjukkan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* yang menunjukkan besarnya nilai *Kolmogorov-Smirnov* adalah 1.258 dan memperlihatkan hasil yang memiliki tingkat signifikan sebesar 0.085 yang berada diatas taraf signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 0.05. Hasil analisis grafiknya yaitu dari grafik histogram dan grafik normal *Probability Plot*-nya. Hasil grafik tersebut dapat dilihat pada gambar 4.1 dan 4.2 sebagai berikut :

**Gambar 4.1**  
**Grafik Histogram**

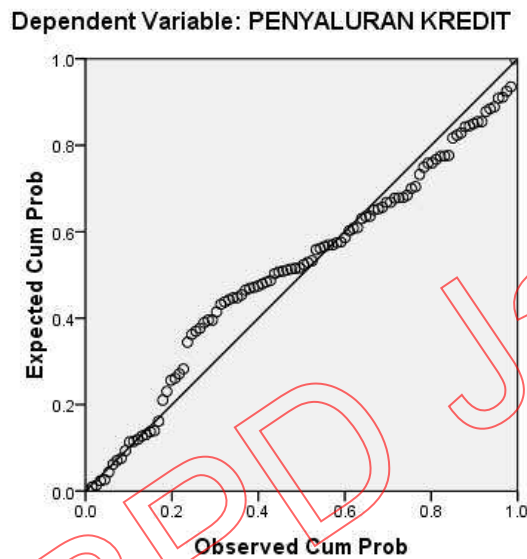


Sumber : Data Sekunder yang telah diolah

**Gambar 4.2**

**Uji Normalitas dengan menggunakan grafik Normal Probability Plot**

**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**



Sumber : Data sekunder yang telah diolah

Dengan melihat tampilan grafik/histogram maupun grafik normal plot dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi normal. Grafik normal plot menunjukkan data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian dikatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

#### **4.3.2 Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2011;105). Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*.

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

		Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.735	.313		2.347	.021		
	DPK	.948	.015	.982	61.953	.000	.727	1.376
	CAR	-.004	.005	-.013	-.841	.402	.780	1.283
	NPK	-.009	.011	-.013	-.855	.394	.797	1.255

a. Dependent Variable: PENYALURAN KREDIT

Sumber : data sekunder yang telah diolah

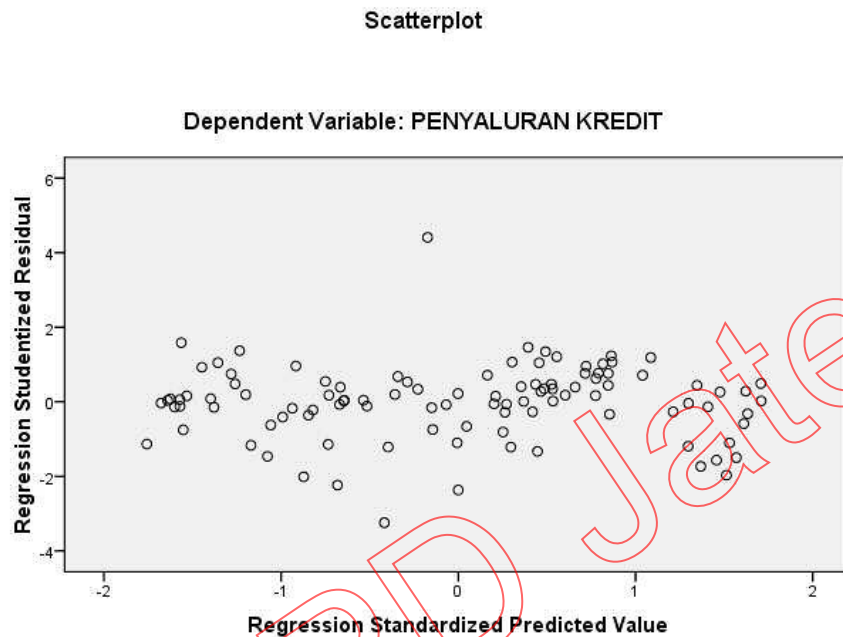
Suatu model regresi dikatakan bebas dari multikolinearitas jika mempunyai nilai *tolerance* diatas 0.10 dan nilai VIF kurang dari 10. Pada tabel 4.4 terlihat bahwa hasil perhitungan nilai *tolerance* kurang dari 0.10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Hasil perhitungan VIF juga menunjukkan tidak ada variabel yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi.

#### 4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain ( Ghozali, 2011;139). Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan gradik *scatterplot* ditunjukkan pada gambar 4.3 dibawah ini :

**Gambar 4.3**

**Uji Heteroskedastisitas dengan menggunakan Grafik *Scatterplot***



Sumber : Data sekunder yang telah diolah

Dari Grafik *Scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas dan model regresi layak untuk digunakan.

#### **4.3.4 Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka disebut ada problem autokorelasi (Ghozali, 2011;110). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari nilai uji Durbin-Watson dengan ketentuan sebagai berikut :

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	<i>No decision</i>	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	<i>No decision</i>	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Tidak ditolak	$du < d < 4 - du$

**Tabel 4.4**  
**Uji Durbin-Watson**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.991 <sup>a</sup>	.982	.981	.23363	2.267

a. Predictors: (Constant), NPL, CAR, DPK

b. Dependent Variable: PENYALURAN KREDIT

Sumber : Data sekunder yang telah diolah

Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel 4.4 diperoleh nilai hitung Durbin-Watson sebesar 2.267. nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan nilai signifikan 5%. Jumlah sampel 104 dan jumlah variabel independent 3 (k=3). Nilai dl (batas luar) = 1.693 dan du (batas dalam) = 1,774, maka di tabel Durbin-Watson diperoleh nilai sebagai berikut :

$$1.774 < 2.267 < 4 - 1.774$$

Oleh karena nilai Durbin-watson 2.267 lebih besar dari nilai du sebesar 1.774 dan kurang dari 4-1.774, maka disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

#### 4.4 Hasil Analisis Regresi Berganda

Dari data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan model regresi dan dihitung dengan menggunakan SPSS. Berdasarkan *output* SPSS diperoleh hasil yang ditunjukkan dalam tabel 4.5 sebagai berikut :

**Tabel 4.5**  
**Hasil Perhitungan Regresi Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.735	.313		2.347	.021
	DPK	.948	.015	.982	61.953	.000
	CAR	-.004	.005	-.013	-.841	.402
	NPL	-.009	.011	-.013	-.855	.394

a. Dependent Variable: PENYALURAN KREDIT  
sumber : data sekunder yang telah diolah

dengan melihat tabel 4.5 diatas, dapat disusun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$PPK = 0.735 + 0.948 \text{ DPK} - 0.004 \text{ CAR} - 0.009 \text{ NPL}$$

Dari hasil persamaan regresi linear berganda tersebut dapat dilihat nilai konstanta sebesar 0.735. hal ini mengindikasikan bahwa penyaluran kredit mempunyai nilai sebesar 0.735 dengan tidak dipengaruhi variabel independen (DPK,CAR,NPL). Persamaan regresi diatas memiliki makna sebagai berikut :

1. variabel DPK menunjukkan hasil yang positif dan signifikan terhadap Penyaluran kredit dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.948. hal ini menunjukkan bahwa setiap ada peningkatan DPK sebesar Rp 1, sedangkan faktor lain dianggap konstan, maka akan ada peningkatan pada penyaluran kredit sebesar Rp. 0.948



2. CAR (*Capital Adequacy Ratio*) menunjukkan hasil yang negatif dan tidak signifikan terhadap penyaluran kredit dengan nilai koefisien regresi sebesar - 0.004 %.
3. Variabel NPL (*non performing loan*) menunjukkan hasil yang negatif dan tidak signifikan terhadap Penyaluran kredit dengan nilai koefisien regresi sebesar - 0.009.

#### 4.5 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel-variabel dependen (Ghozali; 2011;98). Hasil uji statistik t dapat dilihat dalam tabel 4.6 sebagai berikut :

**Tabel 4.6**

**Hasil uji t**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.735	.313		2.347	.021
DPK	.948	.015	.982	61.953	.000
CAR	-.004	.005	-.013	-.841	.402
NPL	-.009	.011	-.013	-.855	.394

a. Dependent Variable: PENYALURAN KREDIT

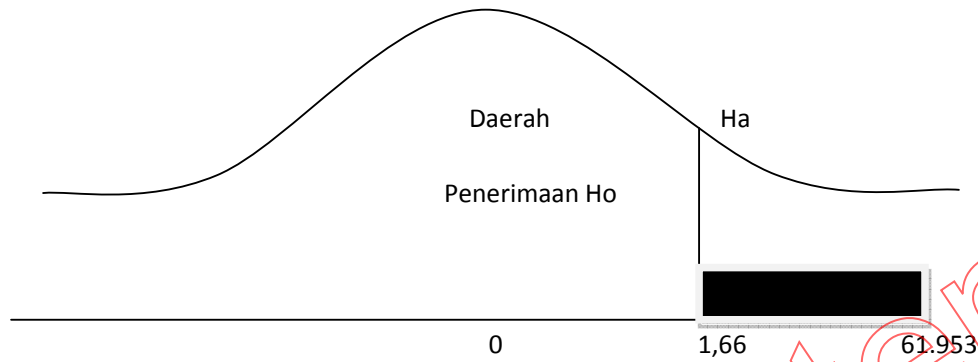
Sumber : data sekunder yang telah diolah

##### 4.5.1 Pengaruh DPK terhadap Penyaluran kredit

Dengan tingkat kepercayaan = 95% atau ( $\alpha$ ) = 0,05. Derajat kebebasan (df) = n-k-1 = 104-3-1 = 100, serta pengujian satu sisi diperoleh dari nilai  $t_{0,05}$  = 1.66, berikut adalah penjelasan mengenai pengaruh DPK terhadap Penyaluran kredit.

**Gambar 4.4**

**Grafik daerah penerimaan /Penolakan Hipotesis Variabel DPK**



Pada variabel DPK diperoleh t-hitung sebesar 61,953 dengan signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Oleh karena itu  $H_0$  ditolak, artinya  $H_a$  diterima.  $H_0$  ditolak jika  $t\text{-hitung} > \text{nilai } t\text{-tabel}$ . Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap Penyaluran kredit pada bank umum di BEI sebesar 0,000 yang berada dibawah taraf signifikansi yang digunakan yaitu 0,05. **Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyaluran Kredit Bank Umum di Indonesia tahun 2008-2011.**

Dana yang di himpun bank umum dari masyarakat yang berbentuk simpanan giro ( *demand deposits* ), simpanan tabungan ( *saving deposits* ) dan simpanan deposito ( *time deposits* ). Idealnya, dana yang berasal dari masyarakat ini, merupakan suatu tulang punggung ( *basic* ) dari dana yang harus diolah atau dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan. Ketiga dana pihak ketiga tersebut hanya dibedakan dalam cara penarikan oleh di pemilliknya. Pada simpanan giro, pemilik dapat menarik dananya sewaktu-waktu baik sebagian atau seluruhnya. Sedangkan pada simpanan deposito, pemilik hanya boleh menarik sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan dengan bank. Tabungan yang

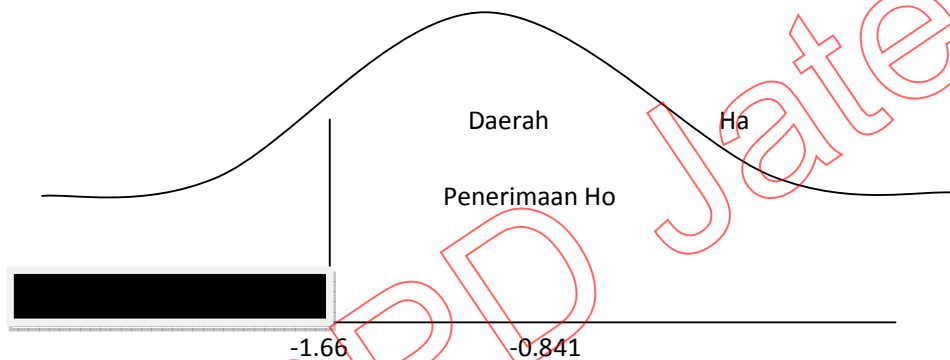
merupakan simpanan masyarakat pengambilannya ditetapkan. Semakin tinggi dana pihak ketiga, maka jumlah kredit yang diberikan semakin meningkat.

#### 4.5.2 Pengaruh CAR terhadap Penyaluran kredit

Dengan tingkat kepercayaan = 95% atau ( $\alpha$ ) = 0,05. Derajat kebebasan (df) =  $n-k-1 = 104-3-1 = 100$ , serta pengujian satu sisi diperoleh dari nilai  $t_{0,05} = 1.66$ . berikut penjelasan mengenai pengaruh CAR terhadap penyaluran kredit :

Gambar 4.5

Grafik daerah penerimaan /Penolakan Hipotesis Variabel CAR



Pada variabel CAR diperoleh nilai t-hitung sebesar -0.841 dan sig = 0.402  $>$  0.05 sehingga  $H_a$  ditolak, karena  $-0.841 <$  1.66. berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa CAR secara parsial variabel independen CAR memiliki pengaruh yang negative dan tidak signifikan terhadap variabel dependen yaitu penyaluran kredit, karena 0.402 berada diatas taraf signifikansi yang digunakan yaitu 0.05. **Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rasio CAR tidak berpengaruh terhadap Penyaluran Kredit Bank Umum di Indonesia tahun 2008-2011.**

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan atau penurunan CAR selama periode penelitian tidak mempengaruhi penyaluran kredit. CAR tidak mempengaruhi secara langsung terhadap penyaluran kredit karena CAR mempunyai pengaruh secara langsung terhadap ATMR (aktiva tertimbang menurut risiko) pada bank. Sedangkan pada posisi aktiva tidak

semua dananya disalurkan untuk penyaluran kredit, tetapi oleh bank bisa saja ATMR bank digunakan untuk penempatan, efek-efek, ataupun penyertaan.

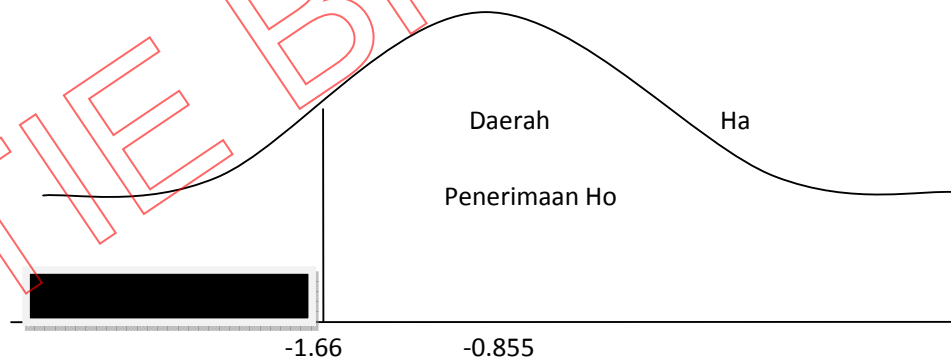
Tingginya CAR mengindikasikan adanya sumber daya finansial (modal) yang *idle*. Tingginya nilai CAR mungkin disebabkan oleh sebagian besar dana yang telah diperoleh dari aktivitas perbankan dialokasikan pada cadangan minimum bank atau digunakan untuk menutupi potensi kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan aktivitas bank. Sehingga secara parsial CAR tidak berpengaruh signifikan (tidak nyata) terhadap penyaluran Kredit Bank Umum di Indonesia.

#### 4.5.3 Pengaruh NPL terhadap Penyaluran kredit

Dengan tingkat kepercayaan = 95% atau  $(\alpha) = 0,05$ . Derajat kebebasan (df) =  $n-k-1 = 104-3-1 = 100$ , serta pengujian satu sisi diperoleh dari nilai  $t_{0,05} = 1,66$ , berikut adalah penjelasan mengenai pengaruh NPLs terhadap Penyaluran kredit.

Gambar 4.6

#### Grafik daerah penerimaan /Penolakan Hipotesis Variabel NPL



Pada variabel NPL diperoleh t-hitung sebesar  $-0,855$  dengan signifikansi sebesar  $0.394 > 0.05$ . Oleh karena itu  $H_a$  ditolak.  $H_a$  ditolak jika nilai t-hitung > nilai t-tabel. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa NPLs mempunyai nilai signifikan sebesar  $0.394$  yang berada atas taraf signifikansi yang digunakan yaitu  $0.05$ . **Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rasio NPL tidak**

**berpengaruh terhadap Penyaluran Kredit Bank Umum di Indonesia tahun 2008-2011.**

Faktor yang menyebabkan variabel NPL tidak berpengaruh secara signifikan pada periode penelitian dikarenakan oleh adanya regulasi dari Bank Indonesia yang mewajibkan agar masing-masing bank mampu menekan tingkat NPL-nya hingga berada pada angka dibawah 5%, tingkat rata-rata bank Umum tahun 2008-2011 di Indonesia berkisar 2.05%, sehingga dengan rendahnya tingkat persentase pada NPL tersebut menyebabkan variabel NPL tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran kredit bank umum di Indonesia. Selain itu, dengan didukung oleh evaluasi dan restrukturisasi dalam manajemen persetujuan pemberian kredit yang berkualitas, seperti produktivitas latar belakang dan kualitas dari debitur kredit yang sangat diperhatikan bank umum untuk menginvestasikan dananya. NPL bank sebesar 2.05% Tidak berpengaruh karena bank juga bisa melakukan cash inflow, sehingga bank bisa memberikan kredit kembali dengan hanya NPL yang rendah.

**4.6 Uji Kelayakan Model**

**4.6.1 Pengujian Hipotesis secara Simultan (Uji F)**

Uji stastitik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali,2011;98). Hasil perhitungan dati uji F dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut :

**Tabel 4.7**

**Hasil Uji F**

**ANOVA<sup>b</sup>**

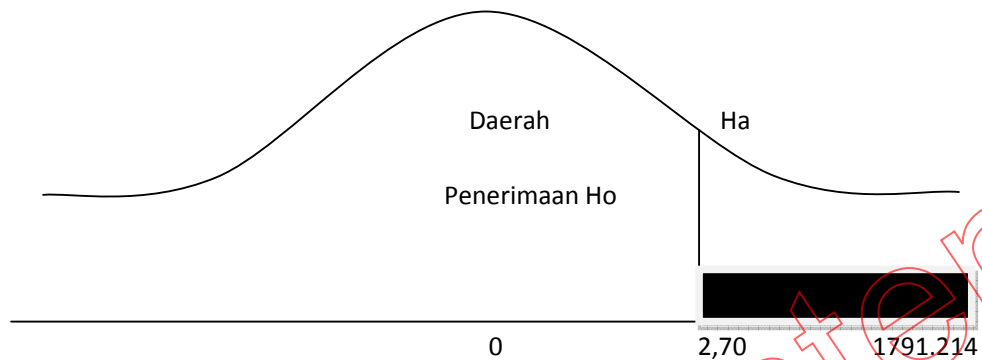
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	293.322	3	97.774	1791.214	.000 <sup>a</sup>
Residual	5.459	100	.055		
Total	298.780	103			

a. Predictors: (Constant), NPL, CAR, DPK

b. Dependent Variable: PENYALURAN KREDIT

Sumber : Data sekunder yang telah diolah

**Gambar 4.7**  
**Grafik Daerah Penerimaan/Penolakan Hipotesis Dari Ketiga Variabel**  
**Independen**



Dengan  $n = 104$  dan  $k = 3$ , maka diperoleh nilai  $F_{\text{tabel}} = 2.70$ . pada tabel Anova diperoleh nilai  $F_{\text{hitung}} = 47.152 > 2.70$  dan  $\text{sig} = 0.000 < 0.05$ , maka  $H_0$  ditolak. Artinya variabel independen meliputi DPK, CAR, dan NPL secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu penyaluran kredit.

#### 4.6.2 Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011;97). Nilai yang mendekati atau berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Hasil perhitungan koefisien determinasi ( $R^2$ ) dapat dilihat pada tabel 4.8 sebagai berikut :

**Tabel 4.8**  
**Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.991 <sup>a</sup>	.982	.981	.23363

a. Predictors: (Constant), NPL, CAR, DPK

Sumber : Data sekunder yang telah diolah

Berdasarkan tabel 4.8 diperoleh hasil perhitungan koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0.981. hal ini menunjukkan bahwa besar pengaruh variabel independen yaitu DPK, CAR, dan NPL terhadap variabel dependen yaitu penyaluran kredit dapat diterangkan oleh model persamaan ini adalah sebesar 98.1%. sedangkan sisanya 1.9% ( $100\% - 98.1\% = 1.9\%$ ) dipengaruhi oleh faktor faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi atau dijelaskan oleh sebab – sebab yang lain diluar model regresi. Faktor-faktor tersebut misalnya seperti, suku bunga, kebijakan pemerintah, inflasi dll

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengujian dari pengaruh DPK, CAR, NPL terhadap penyaluran kredit bank yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEI) tahun 2008-2011, maka dapat disimpulkan :

1. DPK ( Dana Pihak Ketiga) memiliki pengaruh positif terhadap penyaluran kredit. Hal ini dibuktikan dari pengujian stastitik diperoleh hasil tingkat signifikan sebesar 0.000 yang artinya berada dibawah 0.05. hai ini berarti  $H_a$  diterima. Ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi DPK (Dana Pihak Ketiga) pada bank maka semakin tinggi tingkat penyaluran kredit.
2. CAR ( *capital adequacy ratio* ) tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. Hal ini dibuktikan dari hasil pengujian stastitik diperoleh hasil tingkat signifikan sebesar 0.402, yang artinya diatas 0.05. hal ini berarti  $H_a$  ditolak. Dengan demikian mengindikasikan bahwa CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit bank umum di Indonesia tahun 2008-2011.
3. NPL ( *non performing loan* ) tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. Hal ini dibuktikan dari hasil pengujian stastitik diperoleh hasil tingkat signifikan sebesar 0.394 yang artinya berada diatas 0,05. Hal ini berarti  $H_a$  ditolak. Ini mengindikasikan bahwa NPL tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit bank umum di Indonesia tahun 2008-2011.
4. Pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan hasil nilai Fhitung sebesar Fhitung sebesar 1791.214 artinya lebih besar dari Ftabel = 2.70. pada tabel Anova diperoleh nilai Fhitung = 1791.214 > 2.70 dan sig = 0.000 < 0.05, maka  $H_0$  ditolak. Artinya variabel independen meliputi DPK, CAR, dan NPL secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu penyaluran kredit.



5. Pada nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0.981 atau 98.1%. hal ini menunjukkan bahwa besar pengaruh variabel independen yaitu DPK, CAR, dan NPL terhadap variabel dependen yaitu penyaluran kredit dapat diterangkan oleh model persamaan ini adalah sebesar 98.1%. sedangkan sisanya 1.9% (100% - 98.1% = 1.9%) dipengaruhi oleh faktor faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dirumuskan dalam penelitian ini.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti. Kelemahan dan kekurangan yang ditemukan setelah dilakukan analisis dan interpretasi data adalah Periode penelitian yang digunakan terbatas, yaitu selama empat tahun pengamatan sehingga menyebabkan hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasikan.

## 5.3 Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melengkapi keterbatasan penelitian dengan mengembangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel yang dapat mempengaruhi penyaluran kredit. Variabel yang mungkin dapat ditambahkan yaitu inflasi, suku bunga, bi rate, kebijakan pemerintah, dan BOPO.
2. Melakukan penelitian dengan periode dalam kurun waktu yang lebih lama sehingga dapat menambah jumlah sampel. Dengan sampel penelitian yang lebih banyak diharapkan hasil penelitian menjadi lebih baik dan lebih dapat digeneralisasikan.

#### 5.4 Implikasi Manajerial

Berdasarkan hasil pengujian stastitik diatas, maka dapat dirumuskan implikasi manajerial dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat, semakin tinggi dana pihak ketiga yang dihimpun oleh suatu bank, maka bank akan menyalurkan kreditnya semakin besar pula karena dana untuk menyalurkan kredit sebagian besar berasal dari masyarakat yang sesuai dengan fungsi intermediasi bank, yaitu bank menarik dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat, sebaiknya bank menambah penghimpunan DPK dari masyarakat, agar bank bisa menyalurkan kredit yang lebih besar karena didukung oleh modal bank yang besar.
2. Variabel CAR merupakan rasio kecukupan modal yang dimiliki oleh suatu bank, Hal ini berarti semakin baik CAR suatu bank, maka semakin baik dalam memenuhi kecukupan modal dalam melakukan kegiatan bank dalam penyaluran kredit bank, sehingga semakin baik pula bank dalam menyalurkan kreditnya kepada masyarakat, tetapi saat penelitian ini variabel CAR tidak berpengaruh disebabkan oleh karena dana CAR pada bank umum yang terdaftar di BEI tidak hanya digunakan untuk penyaluran kredit bank, tetapi juga di gunakan untuk penyertaan, surat berharga, maka sebaiknya bank bisa meningkatkan nilai CAR yang ada, karena dengan CAR yang tinggi, bank mampu menutup resiko adanya penyaluran kredit dengan modal sendiri, serta baik dalam menyalurkan kreditnya kepada masyarakat.
3. Variabel NPL merupakan rasio yang menunjukkan kualitas asset suatu bank, dimana NPL dalam jumlah besar tidak hanya berdampak pada bank yang bersangkutan, tetapi juga meluas dalam cakupan nasional apabila tidak ditangani dengan tepat, maka bank sebaiknya perlu selalu melakukan monitoring, pengawasan terhadap penyaluran kredit agar uang yang di salurkan dapat kembali, dan tidak terjadi NPL.

## Daftar Pustaka

- Alamsyah, Halim, dkk, (2005). Banking Disintermediation and Its Implication for Monetary Policy The Case of Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*. Maret 2005 : 499 - 521
- Arisandi, Desi. (2008). Analisis Faktor Penawaran Kredit Pada Bank Umum di Indonesia. *Jurnal Program Studi Manajemen Perbankan*, Universitas Gunadarma
- Drs.Thomas Suyatno, dkk, (2007), *Dasar-Dasar Perkreditan* (Edisi Keempat), Jakarta; P.T Gramedia Pustaka Utama.
- Dias, Rangga (2010), Determinasi Penyaluran Kredit Bank Umum Di Indonesia Periode 2006-2009, *Jurnal Keuangan Perbankan*, Vol 14, No.3 September 2010, hlm 415-4254.
- Dr. Thomas Suyatmo,M.M.,dkk, (2007), *Kelembagaan Perbankan* (Edisi Ketiga), Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Dendawijaya, Lukman. (2005).Manajemen Perbankan. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Faisal, Abdullah, (2005). *Manajemen Perbankan* (Cetakan Ketiga). Malang; UMM Press,
- Ghozali, Imam, (2009), *Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 16*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar. (2006). *Dasar-Dasar Ekonometrika*.Jakarta: Erlangga
- Harmanta dan Ekananda, (2005). Disintermediasi Fungsi Perbankan di Indonesia Pasca Krisis 1997; *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*
- Haryati, Sri, (2009), Pertumbuhan Kredit Perbankan di Indonesia; Intermediasi dan Pengaruh Variabel Makro Ekonomi, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 13, No.2 Mei 2009, hal 299-310.
- Hasibun, Malayu. (2006). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta;PT. Bumi Aksara.
- <http://atjehpost.com/read/2012>
- <http://carapedia.com>
- <http://mdhaqiqi.wordpress.com>
- <http://putracenter.net/2009>.
- <http://repository.usu.ac.id>

<http://www.oocities.org/hukum97/kredit>.

<http://managementfile.com/journal>

<http://atjehpost.com/read/2012>

<http://putracenter.net/2009>

<http://id.wikipedia.org/wiki/goodwill>

<http://www.infobanknews/2007.com>

<http://www.infobanknews/2008.com>

<http://www.infobanknews/2009.com>

<http://www.infobanknews/2010.com>

<http://www.infobanknews/2011.com>

<http://www.jurnas.com/halaman/7/2012>

<http://www.bi.go.id>

<http://www.newsbanking.com>

<http://www.suarakarya-online.com>

<http://www.infobanknews.com/2009/12/undisbursed-loan>

Imam mukhis, (2010), Penyaluran Kredit Bank Ditinjau dari Jumlah Dana Pihak Ketiga Dan Tingkat Non Performing Loan, *Jurnal keuangan dan Perbankan*, Volume 15, No.1 Januari 2011, hlm 130-138.

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.

Kasmir, Se., MM., (2000), *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Edisi Keempat), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kuncoro, Mudrajat. Dan Suhardjono, (2011), *Manajemen Perbankan Teori Dan Aplikasi* (Edisi Kedua), Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM.

Manurung, Mandala, Prathama Rahardja. (2004). *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter* (Kajian Kontekstual Indonesia). Jakarta : Penerbit FE UI

Meydianawathi, Luh Gede, (2007), *Analisis Perilaku Penawaran Kredit Perbankan Kepada Sektor UMKM di Indonesia (2002-2006)*, Vol 12, No.2 tahun 2007

- Nurmawan, (2005). Uang Dan Lembaga Keuangan, *Jurnal Keuangan*
- Pratama, Billy A, (2010), Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Penyaluran Kredit dalam Perbankan; *Buletin Studi Ekonomi*, Vol 12, No 2, 133-149.
- Pohan, Aulia. *Potret Kebijakan Moneter Indonesia*, Jakarta; P.T Raja Grafindo Persada, 2008.
- Rindjin, Ketut, (2000). *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta; P.T Gramedia Pustaka Utama.
- Rifai, Muhammad, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Perbankan Pada Bank Umum Di Propinsi Jawa Tengah Periode 1990-2005. Yogyakarta; Universitas Islam Indonesia.
- Sadono, Sukirno, (2004), *Makroekonomi Teori Pengantar* (Edisi Ketiga), Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada.
- Sekaran, Uma. *Research Methods for bussiness*, Metodologi Penelitian Untuk Bisnis 1. Jakarta. Salemba Empat, 2006
- Susilo, Sri et al, (2000). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta; Salemba Empat
- Singarimbun dan Effendi . (1995). *Metode Penelitian Survei*. LP3ES. Jakarta
- Sudjana, (2005). *Metode Statistika*. Edisi VI. Bandung: Tarsito. Hal. 93, 168, 239
- Suyatno, (1999). *Dasar-Dasar Perkreditan* (Edisi Keempat), Jakarta; P.T Gramedia pustaka Utama
- Suhardjono, (2003). *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, Yogyakarta; UPP AMP YKPN
- Taswan, (2006). *Manajemen Perbankan*, Yogyakarta; UPP AMP YKPN.
- Data Bursa Efek Indonesia (BEI)
- Data Bank Indonesia (BI)

# LAMPIRAN

STIE BPPD Jateng

### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PERTUMBUHAN KREDIT	104	6.13E5	2.99E8	4.5853E7	6.34803E7
DPK	104	9.31E5	3.85E8	6.4015E7	9.53490E7
CAR	104	8.02	41.42	17.0840	5.36687
NPK	104	.07	18.39	2.0504	2.40297
Valid N (listwise)	104				

### Regression

#### Variables Entered/Removed<sup>b</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	NPK, CAR, DPK <sup>a</sup>		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: PERTUMBUHAN KREDIT

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.991 <sup>a</sup>	.982	.981	.23363	2.267

a. Predictors: (Constant), NPK, CAR, DPK

b. Dependent Variable: PERTUMBUHAN KREDIT

#### ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	293.322	3	97.774	1.791E3	.000 <sup>a</sup>
	Residual	5.459	100	.055		
	Total	298.780	103			

a. Predictors: (Constant), NPK, CAR, DPK

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	293.322	3	97.774	1.791E3	.000 <sup>a</sup>
	Residual	5.459	100	.055		
	Total	298.780	103			

b. Dependent Variable: PERTUMBUHAN KREDIT

Collinearity Diagnostics<sup>a</sup>

Model	Dimensi on	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	DPK	CAR	NPK
1	1	3.401	1.000	.00	.00	.01	.02
	2	.527	2.540	.00	.00	.01	.72
	3	.068	7.057	.01	.03	.64	.03
	4	.003	32.637	.99	.97	.34	.23

a. Dependent Variable: PERTUMBUHAN.KREDIT

Residuals Statistics<sup>a</sup>

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	13.5565	19.4068	16.5227	1.68754	104
Std. Predicted Value	-1.758	1.709	.000	1.000	104
Standard Error of Predicted Value	.024	.159	.042	.019	104
Adjusted Predicted Value	13.6301	19.4066	16.5239	1.68609	104
Residual	-.74650	1.02492	.00000	.23021	104
Std. Residual	-3.195	4.387	.000	.985	104
Stud. Residual	-3.243	4.410	-.002	1.000	104
Deleted Residual	-.76919	1.03592	-.00120	.23735	104
Stud. Deleted Residual	-3.412	4.889	-.001	1.031	104
Mahal. Distance	.054	46.714	2.971	5.699	104

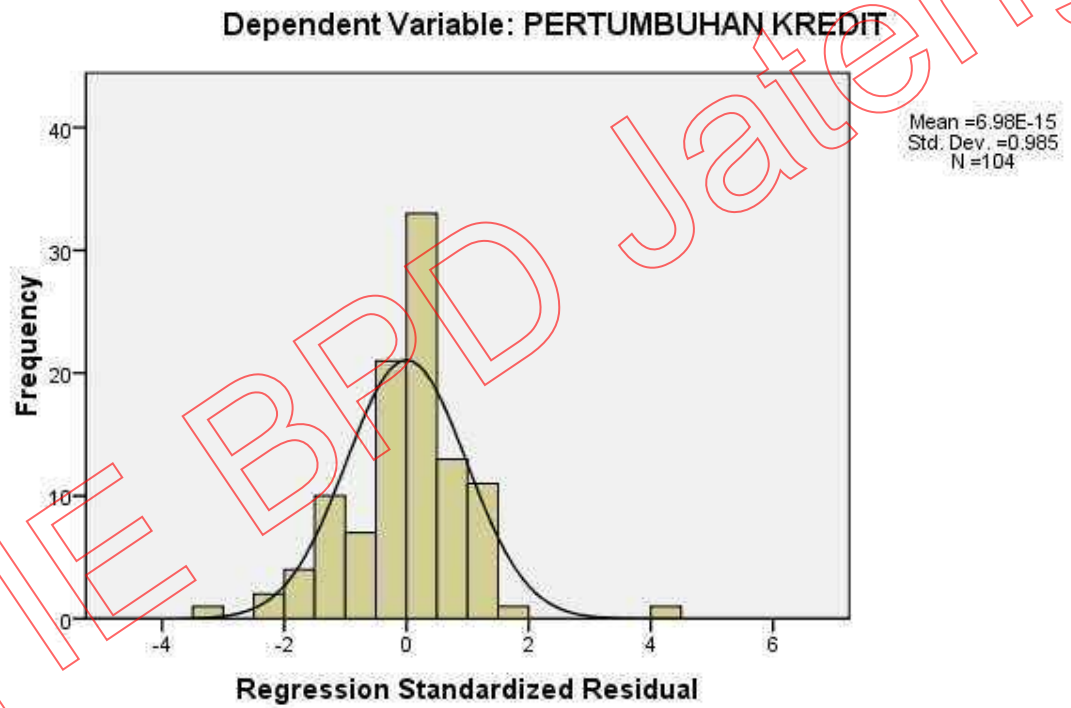


Cook's Distance	.000	.103	.008	.016	104
Centered Leverage Value	.001	.454	.029	.055	104

a. Dependent Variable: PERTUMBUHAN KREDIT

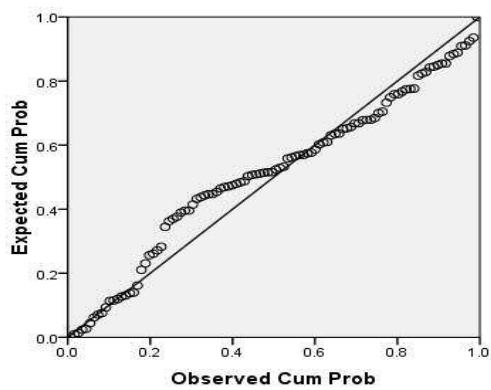
## Charts

Histogram



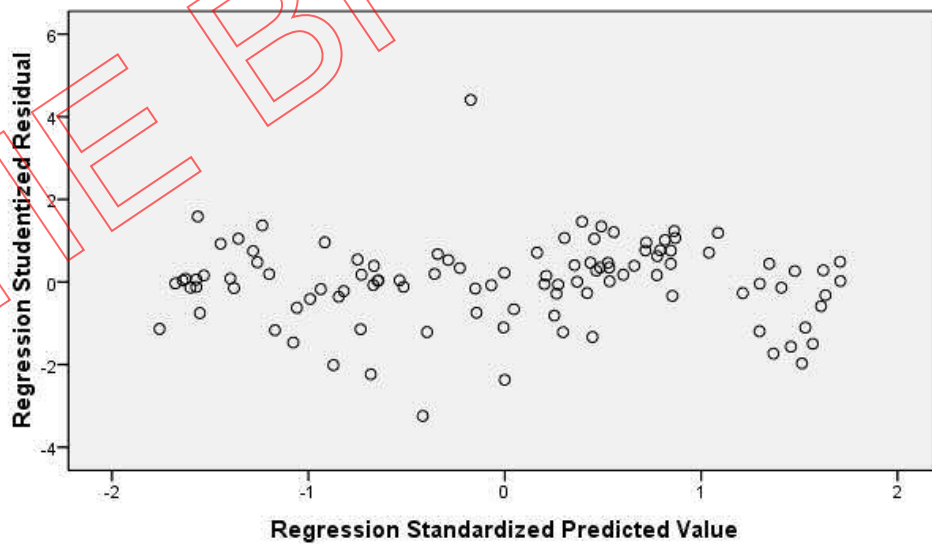
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: PERTUMBUHAN KREDIT



Scatterplot

Dependent Variable: PERTUMBUHAN KREDIT



## Regression

**Variables Entered/Removed<sup>b</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	NPK, CAR, DPK <sup>a</sup>		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Abs\_res

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.115 <sup>a</sup>	.013	-.016	.16485

a. Predictors: (Constant), NPK, CAR, DPK

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.037	3	.012	.449	.718 <sup>a</sup>
	Residual	2.718	100	.027		
	Total	2.754	103			

a. Predictors: (Constant), NPK, CAR, DPK

b. Dependent Variable: Abs\_res

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.188	.221		.850	.397
	DPK	.002	.011	.018	.153	.879

CAR	-.002	.003	-.082	-.729	.468
NPK	-.006	.008	-.083	-.746	.458

a. Dependent Variable: Abs\_res

## NPar Tests

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		104
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.23020729
Most Extreme Differences	Absolute	.123
	Positive	.066
	Negative	-.123
Kolmogorov-Smirnov Z		1.258
Asymp. Sig. (2-tailed)		.085
a. Test distribution is Normal.		

## Regression

### Variables Entered/Removed<sup>b</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	NPK, CAR, DPK <sup>a</sup>		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: PERTUMBUHAN KREDIT

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.991 <sup>a</sup>	.982	.981	.23363

a. Predictors: (Constant), NPK, CAR, DPK

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	293.322	3	97.774	1.791E3	.000 <sup>a</sup>
	Residual	5.459	100	.055		
	Total	298.780	103			

a. Predictors: (Constant), NPK, CAR, DPK

b. Dependent Variable: PERTUMBUHAN KREDIT

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.735	.313		2.347	.021
	DPK	.948	.015	.982	61.953	.000
	CAR	-.004	.005	-.013	-.841	.402
	NPK	-.009	.011	-.013	-.855	.394

a. Dependent Variable: PERTUMBUHAN KREDIT